



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

TESIS



**MARDAYELI DANHAS
1021206030**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

Judul Penelitian : **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat**

Nama Mahasiswa : **Mardayeli Danhas**

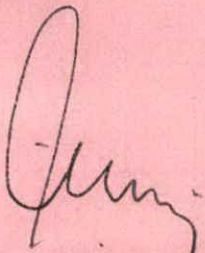
Nomor Buku Pokok : **10 21 206 030**

Program Studi : **Perencanaan Pembangunan**

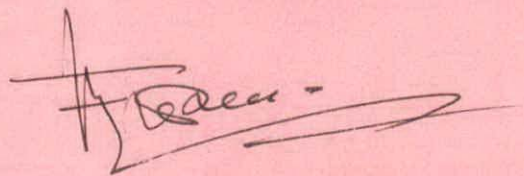
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian akhir Magister Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Oktober 2011

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

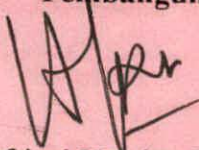


Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT
Ketua



Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec, DEA, Ing
Anggota

2. Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan



Dr. Hefrizal Handra, M. Soc, Sc
Nip. 19651020 199302 1 001

3. Direktur Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M. Sc
Nip. 19551106 198003 1 001

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Oleh : Mardayeli Danhas

(Dibawah bimbingan Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT dan
Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE. M.Ec. DEA.Ing)

RINGKASAN

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 telah merubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari reaktif menjadi proaktif, yaitu penanggulangan bencana dimulai sejak belum teridentifikasinya potensi bencana di suatu daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 selanjutnya mengatur tentang kewajiban penyusunan perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah Provinsi. Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini, telah membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang memuat visi Sumatera Barat Siaga, Tangguh dan Tawakkal menghadapi bencana. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 misi, 5 tujuan, 10 sasaran dan 23 kebijakan penanggulangan bencana. Setelah RPB ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008, telah terjadi dua bencana yang berskala Provinsi yaitu Gempabumi 30 September 2009 dan gempabumi dan tsunami 25 Oktober 2010. Dalam pelaksanaan kebijakan untuk penanggulangan bencana tersebut, terdapat beberapa temuan kendala yang dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan menganalisis tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 22 indikator *Hyogo Framework for Action* (HFA). Indikator HFA ini merupakan hasil kesepakatan dunia melalui konferensi yang diprakarsai

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kobe, Jepang. Berdasarkan kedua analisis ini, disusun kebijakan prioritas yang dapat menjadi kebijakan alternatif penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik *Focused Group Discussion* (FGD) dan Studi Dokumentasi.

Analisis efektivitas kebijakan dilakukan berdasarkan pencapaian sasaran. Dari hasil analisis, diperoleh tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 50%. Pencapaian sasaran yang paling rendah yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan pencapaian sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan BPBD Prov. Sumbar dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif.

Hasil analisis tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tingkat ketahanan daerah Kabupaten/Kota berada pada level 2, sedangkan Provinsi Sumatera Barat pada level 3. Kondisi paling rentan terutama pada ; Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas, Manajemen risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosedur penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan produksi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai penyediaan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hasil analisis efektivitas, disusun perencanaan yang terdiri dari 9 kebijakan, 11 strategi, 20 program dan 50 kegiatan. Kebijakan yang disusun merupakan kebijakan prioritas untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 17 Maret 1980, merupakan anak keenam dari pasangan Bapak Dahnius Has dan Ibu Jasni. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 10 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Naggalo pada tahun 1992, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 22 Padang pada tahun 1995 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) 03 Padang pada tahun 1998. Pada tahun 1998 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Andalas dan menyelesaikan studi tahun 2003. Pada tahun 2010 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Jurusan Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang ditulis dengan judul :

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Adalah hasil kerja/ karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan pustaka yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang,

Yang membuat pernyataan

Mardayeli Danhas

1021206030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan Shalawat kepada nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Perencanaan Pembangunan pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE. M.Ec. DEA.Ing sebagai anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan. Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Amin.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, karena itu saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan pembangunan.

Padang,

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
2.1. Konsep Efektivitas.....	14
2.2. Konsep Penanggulangan Bencana.....	15
2.3. Kajian Risiko Bencana.....	19
2.3.1. Potensi Bencana.....	19
2.3.2. Kerentanan Daerah.....	22
2.3.3. Kapasitas Daerah.....	23
2.3.4. Analisis Tingkat Ketahanan Daerah.....	25
2.4. Rencana Penanggulangan Bencana.....	29
2.5. Kajian Yang Pernah Dilakukan.....	30
2.6. Alur Pikir.....	31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Lokasi Penelitian	34
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3. Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1 Metode Pengambilan Sampel	35
3.3.2. Metode dan Tahapan Analisis Data	35
3.3.2.1. Metode Pengukuran Efektivitas.....	36
3.3.2.2. Metode Pengukuran Tingkat Ketahanan Daerah.....	36
3.3.2.3 Metode Penyusunan Alternatif Kebijakan	38
3.4. Defenisi Operasional Variabel	38
 BAB IV. GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DI	
PROVINSI SUMATERA BARAT	43
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat	43
4.2 Potensi Bencana di Provinsi Sumatera Barat	44
4.3 Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat.....	49
4.4 Penanggulangan Bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010	55
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana	
Provinsi Sumatera Barat	59
5.2 Tingkat Ketahanan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	63
5.3 Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera	
Barat.....	67

BAB VI. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
PROVINSI SUMATERA BARAT	73
6.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Prov. Sumbar.....	73
6.2. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.....	74
6.3. Program-Program Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat	79
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	83
7.1 Kesimpulan	83
7.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana.....	17
Gambar 2.2 Konsep Penyusunan RPB	30
Gambar 2.3 Alur Pikir Penelitian	33
Gambar 4.1 Lokasi Pusat Gempa 30 September 2009	55
Gambar 4.2 Lokasi pusat gempa Mentawai 25 Oktober 2010.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nilai Respon Pertanyaan Indikator HFA.....	37
Tabel 3.2	Range nilai Penentusn Indeks Ketahanan Daerah.....	37
Tabel 4.1	Kerugian akibat gempa 30 September 2009	56
Tabel 5.1	Hasil Identifikasi temuan penanggulangan bencana pada masing- masing sasaran.....	63
Tabel 5.2	Tingkat pencapaian sasaran penanggulangan bencana	65
Tabel 5.3	Nilai Indikator HFA Kabupaten/Kota	67
Tabel 5.4	Indeks Prioritas Aksi dan Tingkat Ketahanan Daerah	69
Tabel 5.5.	Penyusunan Kebijakan Alternatif PB berdasarkan Tingkat Ketahanan Daerah.....	73
Tabel 6.1.	Alternatif Rencana Penaggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana
Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 2. Temuan Penanggulangan Bencana 30 September 2009 dan 30
Oktober 2010.
- Lampiran 3. Dokumentasi FGD
- Lampiran 4. Kriteria indeks indikator HFA
- Lampiran 5. Kuisisioner Indikator HFA
- Lampiran 6. Jawaban Kuisisioner dan Perhitungan Tingkat Ketahanan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gempa yang terjadi tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.6 Skala Richter (SR) mengguncang Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Kota Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21.6 triliun atau setara dengan US\$ 2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan banyak terjadi pada zona yang memiliki amplifikasi gempa yang tinggi. Kerusakan ini juga disebabkan oleh struktur bangunan yang relatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehingga akses transportasi pada wilayah tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan (*A joint report by the BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international partners, October 2009*).

Pada saat gempa terjadi, sistem peringatan dini daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan radio internet dan sirine, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada masyarakat. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak.

Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem dan saluran informasi peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dari pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah kabupaten (korong dan nagari ke kecamatan atau ke kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan. Terbatasnya kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari para korban bencana sehingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk – truk yang memuat bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis salah satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI, 2010).

Gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan

Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit rumah, dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort pariwisata (BNPB, 2010).

Berbagai kebijakan untuk mengurangi risiko bencana gempabumi dan tsunami pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan telah diakomodir dalam RPB Sumbar. Namun demikian ternyata masih ditemukan berbagai kendala baik di pemerintahan maupun di masyarakat pada fase tanggap darurat dan pemulihan bencana gempabumi dan tsunami di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan penanggulangan bencana telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sejak tahun 2007 dan ditetapkan pada tahun 2008 untuk periode 2008-2012. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala sehingga sasaran penanggulangan bencana tidak tercapai optimal. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap RPB ini sangat penting mengingat beberapa ahli gempa percaya bahwa masih terdapat

potensi untuk terjadinya gempa yang lebih besar di Sumatera Barat dengan kekuatan mencapai 8.5 SR. Kemungkinan terjadinya gempa semacam itu dapat memicu munculnya tsunami (*A joint report by the BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international partners, October 2009*).

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam RPB Sumbar. Untuk itu, penelitian dan pengkajian tersebut disajikan dalam thesis dengan judul: "Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012 telah efektif dalam pengurangan risiko bencana...?
2. Bagaimana tingkat ketahanan (kapasitas dan kerentanan) daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi bencana ..?
3. Bagaimana alternatif kebijakan yang efektif dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat...?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan RPB Prov. Sumbar berdasarkan permasalahan (temuan) dalam penanggulangan bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010
2. Menganalisis tingkat ketahanan daerah (kapasitas dan kerentanan) Prov. Sumbar
3. Menyusun alternatif kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan masukan dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana, sehingga efektif dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pengurangan risiko bencana.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan perencanaan penanggulangan bencana yang efektif, dapat mengurangi kerugian yang timbul di masyarakat, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat lainnya.

3. Bagi penelitian berikutnya, semoga dapat menjadi referensi dalam mengenai perencanaan penanggulangan bencana sehingga dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup adalah :

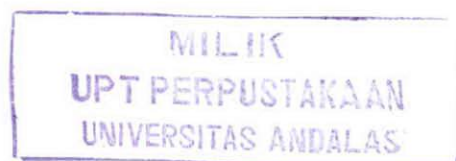
1. Penelitian difokuskan pada kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pra bencana (pencegahan dan mitigasi).
2. Penelitian dibatasi pada temuan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat berdasarkan pasca kejadian gempa bumi tanggal 30 September 2009 serta gempa bumi dan tsunami tanggal 25 Oktober 2010 di Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan thesis ini, terdiri dari 7 Bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan
- BAB II** : Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian dari literatur-literatur yang ada. Bab ini terdiri dari konsep tentang efektivitas dan rencana penanggulangan bencana

- BAB III : Metodologi penelitian, menjelaskan tentang metode dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian termasuk teknik pengambilan data.
- BAB IV : Gambaran umum penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan kondisi kebencanaan di Sumatera Barat, kebijakan yang ada serta penanggulangan bencana pada gempa bumi 30 September 2009 dan tsunami 25 Oktober 2010.
- BAB V : Hasil dan Pembahasan yang menggambarkan hasil yang diperoleh serta pembahasannya yang meliputi hasil kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana, analisis tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dan penyusunan kebijakan alternatif berdasarkan hasil kajian efektivitas dan analisis tingkat ketahanan daerah.
- BAB VI : Kebijakan dan Program, terdiri dari Alternatif kebijakan dan strategi, program, fokus prioritas dan indikator keberhasilan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.
- BAB VII : Kesimpulan dan saran, yang menggambarkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran-saran untuk perbaikan sehubungan dengan thesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Menurut Barnard, bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Barnard,1992:27).

Ahli sosiologi lebih menitikberatkan pada kemanfaatan bersama. Dalam kamus sosiologi, Soejono Soekanto membedakan dua pengertian yang sering disamakan artinya yaitu; efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan, sedangkan efisiensi adalah; 1) Pencapaian tujuan secara maksimal dengan sarana terbatas, 2) Rasio dari keluarga aktual terhadap keluarga standard dan 3) Derajat pencapaian tujuan.

Jadi, efektivitas merupakan suatu taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut, dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indicator special, misalnya; Pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989: 48).

Menurut JP Cambel, pengukuran efektivitas program secara umum dan paling menonjol adalah;

1. Keberhasilan program

2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Cambel, 1989:121). Sedangkan menurut Dunn.W, (2003), efektivitas merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dimana indikatornya dilihat dari pencapaian hasil yang diinginkan.

2.2. Konsep Penanggulangan Bencana

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana mulai muncul pada dekade 1900-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Beberapa konferensi tingkat dunia diinisiasi oleh United Nations International Strategy or Disaster Risk Reduction (UN-ISDR) yang merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditugaskan untuk mengawal Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional.

Pada bulan Januari 2005, lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), institusi akademik dan sector swasta berkumpul di Kobe, Jepang pada World Conference on Disaster Reduction (WCDR) kesebelas. Konferensi tersebut mengakhiri perundingan-perundingan tentang Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015; Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana (Hyogo Framework for Action/HFA).

Kerangka Aksi ini diadopsi oleh 168 negara (termasuk Indonesia) dan menetapkan tujuan yang jelas secara substansiil, mengurangi kerugian akibat bencana, baik korban jiwa maupun kerugian terhadap aset-aset social, ekonomi dan lingkungan suatu masyarakat dan Negara dan merinci seperangkat prioritas untuk mencapai tujuan setidaknya pada tahun 2015 (UN-ISDR, 2007).

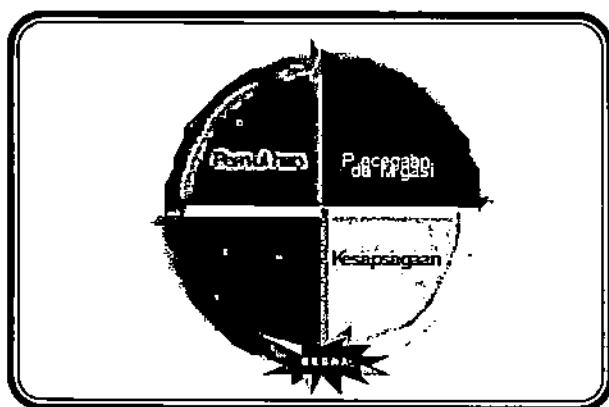
Indonesia sebagai salah satu negara partisipan, meratifikasi HFA ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-undang tersebut, terdapat Ketentuan Umum yang mendefinisikan penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66). Dari definisi tersebut terlihat bahwa penanggulangan bencana adalah upaya pengurangan risiko bencana pada fase sebelum, saat dan setelah bencana. Pada fase sebelum bencana dilaksanakan upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko dan kesiapsiagaan bencana. Pada fase saat bencana terjadi dilaksanakan upaya tanggap darurat. Pada fase setelah bencana terjadi dilaksanakan upaya pemulihan dampak bencana.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada pasal 5, dinyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ini membutuhkan Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun pada situasi tidak terjadi

bencana. Diamanatkan kembali pada pasal 6 bahwa setiap Provinsi wajib menyusun Rencana Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana UU No. 24 tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 04 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana juga menyebutkan bahwa penanggulangan bencana terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pencegahan dan mitigasi, fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan. Seluruh fase ini membentuk siklus seperti terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana



Sumber : Perka BNPB No. 04 Tahun 2008

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh

tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta.

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi, (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan, (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan (Perka BNPB No. 4 tahun 2008).

2.3. Kajian Risiko Bencana

Kajian risiko bencana yang terdapat dalam Perka BNPB No. 04 tahun 2008, disusun berdasarkan analisis risiko bencana dan digambarkan sebagai berikut:

$$R = H \times V / C$$

R = Risiko Bencana

H = *Hazard* / Potensi Bencana

V = *Vulnerability* / Kerentanan

C = Kapasitas

2.3.1. Potensi Bencana

Potensi bencana suatu wilayah tergantung pada kondisi wilayah yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari data kejadian bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

- a. Gempabumi, dampak yang dapat timbul oleh gempabumi ialah berupa kerusakan atau kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit dan bangunan umum lain) dan konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan laut/udara, jaringan listrik dan telekomunikasi dll) serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya kepanikan.
- b. Tsunami, adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempabumi di laut, letusan gunung api bawah laut atau longsor di laut. Namun, tidak semua fenomena tersebut dapat memicu terjadinya tsunami.

Syarat utama timbulnya tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk yang berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah laut. Terdapat empat faktor pada gempabumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu: 1) pusat gempabumi terjadi di laut, 2) Gempabumi memiliki magnitudo yang besar, 3) kedalaman gempabumi dangkal dan 4) terjadi deformasi vertikal pada lantai dasar laut. Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 600-800 km perjam, dengan tinggi gelombang dapat mencapai 20 meter.

- c. Letusan Gunung Api, dampak/risiko yang ditimbulkan oleh jatuhnya material letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, abu gunung api dan bencana sekunder berupa aliran lahar.
- d. Banjir, sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor yaitu; hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu dan disiplin masyarakat yang rendah.
- e. Tanah Longsor, merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan , ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Pemicu dari terjadinya gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing.

- f. Kebakaran, potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar. Hampir setiap musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya kebakaran lahan dan hutan dimana berdampak sangat luas tidak hanya kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga timbulnya gangguan asap di wilayah sekitar yang sering kali mengganggu Negara-negara tetangga.
- g. Kekeringan, Fenomena ini dialami berbagai wilayah di Indonesia hampir setiap musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut ditengarai akibatrusaknya ekosistem pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang terburuk adalah banyaknya gejala kurag gizi bahkan kematian.
- h. Epidemi dan Wabah Penyakit. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Epidemi baik yang berupa mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian.
- i. Kebakaran Gedung dan Permukiman. Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat marak pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia diantaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standar keamanan bangunan tidak dilaksanakannya pembaruan kabel listrik yang sudah ada serta prilaku manusia.

- j. Kegagalan Teknologi merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesenjangan manusia dalam menggunakan teknologi dan industri.

2.3.2. Kerentanan Daerah

Kerentanan (*vulnerability*) adalah keadaan atau sifat/prilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa:

- a. Kerentanan fisik. Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu. Misalnya, kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa. Adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tertinggal di bantaran sungai dan sebagainya.
- b. Kerentanan ekonomi. Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana.
- c. Kerentanan Sosial. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, umur, jenis kelamin kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan

mengurangi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan terhadap bahaya.

- d. **Kerentanan Lingkungan.** Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya.

2.3.3. Kapasitas Daerah

Kemampuan merupakan segala potensi sumber daya untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Dengan menggunakan perhitungan analisis risiko dapat ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

Sebagai langkah sederhana untuk pengkajian risiko adalah pengenalan bahaya/ancaman di daerah yang bersangkutan. Semua bahaya ancaman tersebut diinventarisasi, kemudian diperkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) dengan rincian :

- 5 Kemungkinan sangat besar (hampir dipastikan 80 – 99%)
- 4 kemungkinan besar (60 – 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
- 3 kemungkinan terjadi (40 – 60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)
- 2 kemungkinan kecil (20 – 40% dalam 100 tahun)
- 1 kemungkinan sangat kecil (hingga 20%)

Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain :

- Jumlah korban
- Kerugian harta benda
- Kerusakan sarana dan prasarana
- Cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan
- Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

Maka, jika dampak inipun diberi bobot sebagai berikut :

- 5 sangat parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
- 4 parah (60% - 80% wilayah hancur)
- 3 sedang (40% – 60% wilayah terkena rusak)
- 2 ringan (20% - 40% wilayah yang rusak)
- 1 sangat ringan (kurang dari 20% wilayah rusak)

2.3.4. Analisis Tingkat Ketahanan Daerah

Tingkat ketahanan daerah dapat dianalisis dengan menggunakan *Hyogo Framework for Action* (HFA). HFA memuat 5 prioritas aksi yang menjadi komitmen Negara penandatangan dalam pengurangan risiko bencana. 5 prioritas aksi HFA dijabarkan dalam 22 indikator pencapaian, setiap indikator pencapaian dinilai bersama dalam range nilai 1 – 5 dan setiap indikator diberikan indeks kepentingan. Jumlah total tertinggi indeks ketahanan suatu daerah adalah 100 (UN-ISDR, 2007).

Masing-masing prioritas aksi dan indikatornya diuraikan sebagai berikut:

- **PRIORITAS AKSI I :** Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat

Terdapat 4 indikator sebagai berikut :

1. Kebijakan dan kerangka hukum lokal untuk pengurangan risiko bencana ada dengan tanggung jawab dan kapasitas terdesentralisasi di semua tingkat.
2. Alokasi khusus sumber daya dan memadai tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di semua jenjang pemerintahan.
3. Partisipasi masyarakat dan desentralisasi dipastikan melalui pendelegasian kewenangan sumber daya ke tingkat-tingkat lokal.

4. Platform daerah yang bersifat multisektoral untuk pengurangan risiko bencana berfungsi.

- **PRIORITAS AKSI II** : Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut :

1. Penilaian risiko lokal dan nasional berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan tersedia dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor utama.
2. Tersedia sistem-sistem untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan utama
3. Sistem peringatan dini tersedia untuk semua bahaya utama, dengan jangkauan ke masyarakat-masyarakat
4. Penilaian risiko lokal dan nasional memperhitungkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerja sama regional mengenai pengurangan risiko.

- **PRIORITAS AKSI III** : Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut :

1. Informasi yang relevan mengenai bencana tersedia dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring pengembangan sistem bagi informasi, dst)
2. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep dan praktek mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan
3. Metode riset dan alat untuk penilaian multirisiko dan analisis manfaat dan biaya dikembangkan dan dimantapkan
4. Strategi kesadaran publik tersedia untuk merangsang budaya ketahanan bencana, dengan jangkauan ke masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

▪ **PRIORITAS AKSI IV** : Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar.

Terdapat 6 indikator sebagai berikut :

1. Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan dan rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam dan tata guna tanah serta penyesuaian terhadap perubahan iklim.
2. Kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko.
3. Rencana dan kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerawanan kegiatan-kegiatan ekonomi.

4. Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana, termasuk pemberlakuan syarat dan Izin Mendirikan Bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum.
 5. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.
 6. Prosedur-prosedur tersedia dan siap untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atas proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
- **PRIORITAS AKSI V** : Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat.

Terdapat 4 indikator sebagai berikut :

1. Kebijakan kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme untuk manajemen risiko bencana dengan perspektif pengurangan risiko bencana tersedia dan siap.
2. Rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana siaga (*contingency*) tersedia dan siap di semua jenjang pemerintahan, dan latihan simulasi dan geladi yang teratur diadakan untuk menguji dan mengembangkan program tanggap bencana
3. Cadangan finansial dan mekanisme antisipasi tersedia dan siap untuk mendukung sambutan efektif dan pemulihan bila diperlukan
4. Prosedur-prosedur tersedia dan siap untuk melakukan pertukaran informasi relevan selama peristiwa bencana bahaya dan bencana, dan untuk melakukan tinjauan-tinjauan pasca kejadian.

Masing-masing indikator mempunyai indeks sesuai dengan kondisi daerah. Pemberian indeks indikator untuk suatu daerah didasarkan pada kriteria-kriteria masing-masing indikator yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. Indeks indikator ini akan menentukan indeks prioritas dan selanjutnya dapat ditentukan tingkat ketahanan daerah. Tingkat ketahanan daerah 1-5 mempunyai arti masing-masing level sebagai berikut :

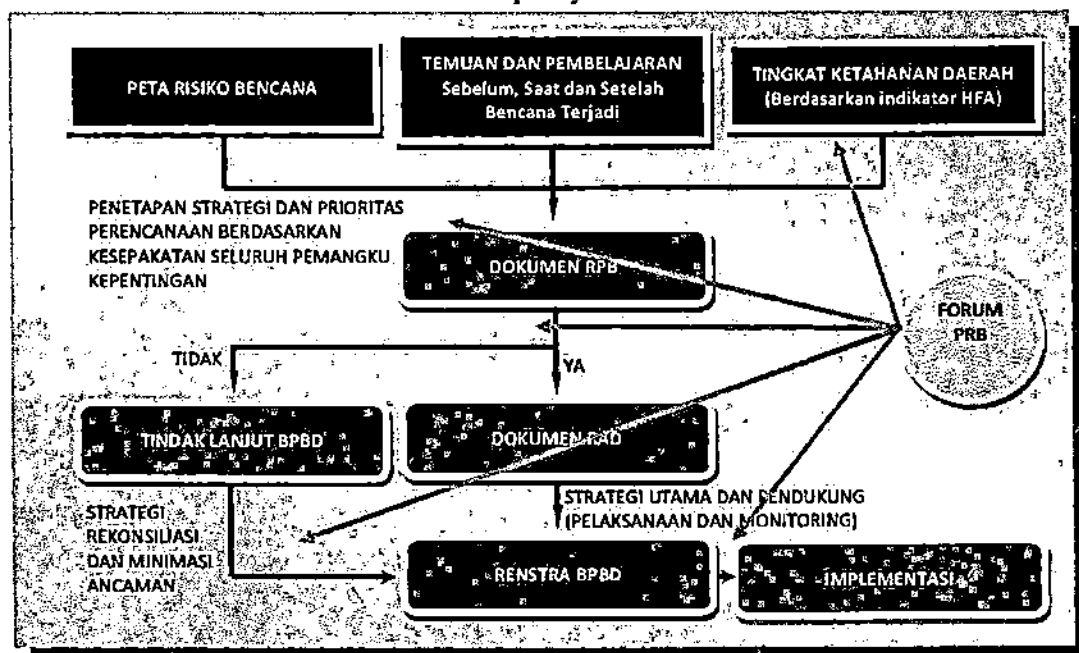
- 5 : Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat
- 4 : Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas perasional
- 3 : Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti
- 2 : Adanya pencapaian, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada
- 1 : Pencapaian kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan

2.4. Rencana Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk mengurangi risiko bencana. Perencanaan dimulai dari kajian risiko bencana dan analisis tingkat ketahanan daerah. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana disampaikan oleh BNPB dalam rangka pembentukan platform Nasional PRB direncanakan secara integratif, komprehensif dan berkelanjutan

dengan didukung oleh Forum PRB yang melibatkan semua unsur (Aisyah Hamid Baidlowi, 2008). Peran Forum PRB dapat digambarkan dalam gambar 2.2.

Gambar 2.2. Konsep Penyusunan RPB



Sumber :Skema Penyusunan RPB, Forum PRB Prov. Sumatera Barat

Seperti terlihat pada gambar 2.2, forum PRB berfungsi dalam setiap tahap penyusunan, mulai dari analisis tingkat ketahanan daerah, penetapan strategi sampai ke implementasi.

2.5. Kajian Yang Pernah Dilakukan

Kajian mengenai kebencanaan sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu dengan menganalisis pengaruh bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Analisis ini berguna sebagai salah satu temuan sebagai risiko bencana. Berbeda dari kajian ini, penelitian ini lebih

mengacu pada kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana.

Kajian lainnya yang dapat dijadikan acuan adalah mengenai efektivitas salah satu program penanggulangan bencana (Community Management Disaster Risk Reduction/CMDRR) di Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Pada kajian tersebut, program penanggulangan bencana dititik beratkan pada bencana banjir. Namun demikian, kajian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengukur efektivitas untuk pengurangan risiko bencana.

2.6. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dimulai dari perumusan masalah sebagaimana diterangkan pada BAB I, kemudian ditetapkan tujuan penelitian. Untuk mencapai masing-masing tujuan, ditetapkan alat penelitian yang digunakan.

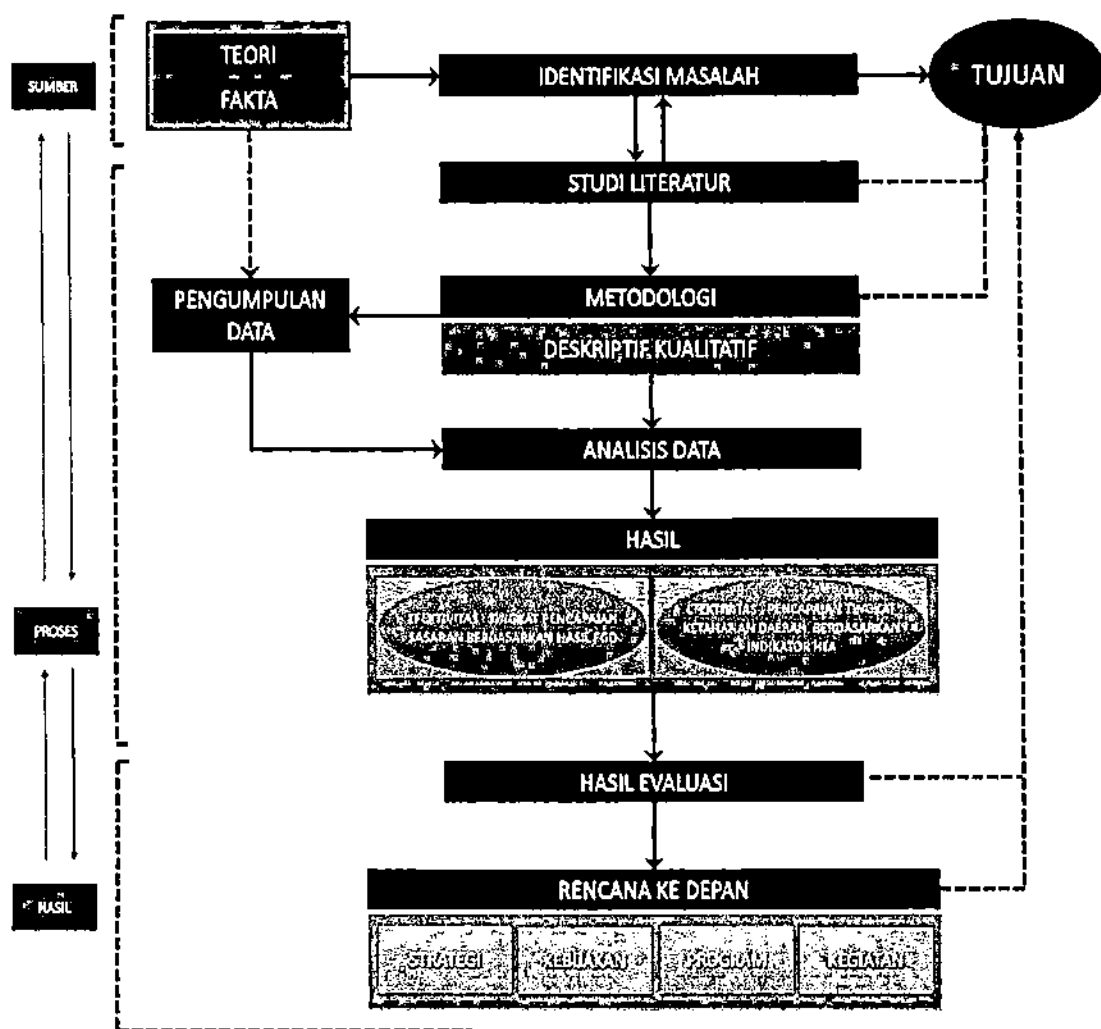
Pada langkah pertama, dilakukan uji efektivitas kebijakan dengan membandingkan antara kebijakan yang ada dalam RPB dengan temuan dalam penanggulangan bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010. Temuan ini diperoleh dengan studi dokumentasi dan diskusi grup terfokus.

Untuk tujuan kedua, analisis kapasitas dan kerentanan Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat dilakukan analisis indikator HFA. Penentuan indikator HFA diperoleh dari hasil pengisian kuisioner (dengan diskusi grup terfokus) oleh masing-masing daerah sampel. Selanjutnya,

dengan menggabungkan hasil kedua langkah di atas, dapat diperoleh rekomendasi kebijakandan strategi penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat.

Metodologi ini selanjutnya akan dijelaskan pada BAB III. Bagan alur pikir penelitian dapat diperlihatkan secara sistematis pada **gambar 2.3**.

Gambar 2.3. Alur Pikir Penelitian



Sumber : Diolah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Di Indonesia, daerah yang mempunyai potensi bencana yang cukup tinggi salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal penanggulangan bencana, Provinsi Sumatera Barat adalah Provinsi pertama yang menyusun Rencana Penanggulangan Bencana di Indonesia. Sejak Rencana Penanggulangan Bencana tersebut disusun, telah terjadi dua kali bencana yang berskala Provinsi. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas kebijakan penanggulangan bencana ini difokuskan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer, diperoleh melalui diskusi grup terfokus (FGD) untuk mendapatkan identifikasi temuan dan penilaian efektivitas kebijakan.
2. Data sekunder, diperoleh dari Yayasan Komunitas KOGAMI yaitu laporan tentang kondisi daerah berupa jawaban daftar isian indikator HFA untuk menentukan tingkat ketahanan daerah. Disamping itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan BNPB mengenai penanggulangan bencana gempa bumi 30 September 2009 dan gempa mentawai tanggal 25 Oktober 2010.

3.3. Populasi dan Sampel

Karena pada penelitian ini yang dianalisis adalah tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan, maka pengamatan dilakukan terhadap sektor pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sektor swasta. Sehingga, dalam pengambilan data primer dan sekunder perlu mewakili setiap unsur tersebut. Untuk daerah pengamatan, dipilih Kabupaten/Kota yang terkena dampak besar saat kejadian bencana gempa bumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010, yaitu kabupaten/kota yang menderita kerugian diatas 300 miliar Rupiah.

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk analisis tingkat ketahanan daerah, sampel yang diambil yaitu 6 dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terkena dampak besar bencana gempa bumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010 yaitu; Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Mentawai. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat tidak diikutsertakan karena tidak terdapat data dari yayasan KOGAMI.

3.3.2. Metode dan Tahapan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Dalam analisis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

3.3.2.1. Metode Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektifitas dilakukan melalui diskusi grup terfokus (FGD). FGD dilaksanakan dengan peserta yang hadir sebanyak 13 orang yaitu pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari perwakilan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, LSM nasional dan internasional yang terlibat penanggulangan bencana gempa bumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010. Keluaran pertama dari FGD ini adalah identifikasi temuan berdasarkan masing-masing sasaran. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase tingkat pencapaian sasaran sebagai ukuran efektivitas berdasarkan identifikasi temuan sebelumnya dan ditambah data temuan dari laporan BNPB.

3.3.2.2. Metode Pengukuran Tingkat Ketahanan Daerah

Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan daerah adalah dengan studi dokumentasi. Dari data sekunder yang diperoleh dari Yayasan KOGAMI, dihitung tingkat ketahanan daerah berdasarkan panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk masing-masing indikator terdapat 4 pertanyaan. Jawaban terhadap pertanyaan terdiri dari; Ya=1 dan Tidak=0. Terhadap jawaban kuisisioner diberikan nilai yang menjadi indeks masing-masing indikator yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Indeks indikator berdasarkan jawaban kuisioner

NO	JAWABAN PERTANYAAN	INDEKS INDIKATOR
1	Pertanyaan 1 = 2 = 3 = 4 = Tidak	0
2	Pertanyaan 1 = Ya, 2 = 3 = 4 = Tidak	40
3	Pertanyaan 1 = 2 = Ya, 3 = 4 = Tidak	60
4	Pertanyaan 1 = 2 = 3 = Ya, 4 = Tidak	80
5	Pertanyaan 1 = 2 = 3 = 4 = Ya	100

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011

22 indikator HFA dikelompokkan ke dalam lima prioritas aksi, untuk mengetahui nilai masing-masing prioritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Prioritas} = \frac{\sum (\text{indeks indikator} \times \text{nilai kepentingan})_i}{n}$$

Dimana; n = Jumlah indikator pada masing-masing prioritas aksi
 nilai kepentingan ditentukan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat
 dapat dilihat pada lampiran 6.

Selanjutnya indeks ketahanan daerah diperoleh dari rata-rata nilai prioritas. Untuk menentukan indeks ketahanan daerah dan indeks prioritas aksi dilakukan berdasarkan range nilai prioritas. Range nilai untuk penentuan indeks dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Range nilai untuk penentuan indeks ketahanan daerah

Nilai Prioritas	Indeks Prioritas
85,1-100	5
70,1-85	4
55,1-70	3
35,1-55	2
≤ 35	1

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011

3.3.2.3. Metode Penyusunan Kebijakan

Metode yang digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana adalah berdasarkan hasil analisis tingkat ketahanan daerah berdasarkan indikator HFA. Hasil analisis tingkat ketahanan daerah ini digabung dengan hasil uji efektivitas.

3.4. Defenisi Operasional Variabel

Batasan dalam penelitian ini dijabarkan dengan mendefenisikan variabel operasional menurut Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 118 tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012, yaitu sebagai berikut :

1. **Bencana (*disaster*)** adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa-bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, konflik sosial dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan

fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

4. **Kemampuan (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
5. **Risiko (*risk*)** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
7. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana
8. **Mitigasi Fisik (*Structure Mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan / atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
9. **Mitigasi Non-Fisik (*Non Structure Mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan / atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

10. **Kesiap-siagaan (*preparedness*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat-guna dan berdaya-guna.
11. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Tanggap darurat (*emergency response*)** bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
13. **Bantuan darurat (*relief*)** bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
14. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
15. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana
16. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan

pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.

17. **Penanggulangan Bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiap-siagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
19. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. **Korban bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. **Prosedur Tetap** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
22. **Gagal teknologi** adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu.
23. **Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan

kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak pada kedudukan 00 54' Lintang Utara sampai dengan 30 30' Lintang Selatan serta 980 36' sampai dengan 1010 53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.297,21 Km² atau 4.229.721 Ha. Provinsi Sumatera Barat meliputi areal daratan seluas $\pm$ 42.297 Km² termasuk $\pm$ 375 pulau besar dan kecil di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan $\pm$ 186.500 Km². Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat adalah $\pm$ 2.420.388 Km, yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan rincian panjang pantai sebagai berikut :

- Pasaman Barat = 142.955 Km
- Agam = 38.469 Km
- Padang Pariaman = 62.332 Km
- Padang = 99.632 Km
- Pesisir Selatan = 278.200 Km
- Kepulauan Mentawai = 1.798.800 Km

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta 7 (tujuh) Kota yaitu Kota Padang, Solok, Kota Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang dan Kota Pariaman. Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten baru. Pada akhir tahun 2003 terjadi pemekaran 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung masing-masing dipecah menjadi dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, serta Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya.

4.2 Potensi Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumbar memiliki banyak potensi bencana, selain disebabkan oleh aktivitas alam, Provinsi ini juga memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh manusia (non alam) seperti konflik social, epidemic wabah penyakit, kebakaran bangunan dan lain-lain. Dari identifikasi data, diperoleh potensi bencana yang ada di Provinsi Sumbar adalah sebagai berikut:

4.2.1. Gempabumi

Berdasarkan catatan data sejarah kegempaan, daerah Sumatera Barat memang sudah berapa kali mengalami gempabumi merusak. Sejak 1822 hingga 2009 telah terjadi setidaknya 14 kali kejadian gempabumi kuat dan merusak di Sumatera Barat dan diantaranya menyebabkan tsunami. Sejarah panjang

gempabumi merusak di Sumatera Barat, diantaranya adalah Gempabumi Padang (1822, 1835, 1981, 1991, 2005), Gempabumi Singkarak (1943), Gempabumi Pasaman (1977) dan Gempabumi Agam (2003). Sedangkan gempabumi yang diikuti gelombang tsunami terjadi di Mentawai (1861) dan Sori-Sori (1904). Catatan paling tua menunjukkan bahwa di Padang pada tahun 1822 telah terjadi gempabumi kuat yang diikuti suara gemuruh yang berpusat di antara Gunung Talang dan Gunung Merapi. Meski tidak ada laporan secara rinci menyebutkan, namun gempabumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa cukup banyak.

Pada tanggal 28 Juni 1926, gempabumi dahsyat 7.8 Skala Richter juga dilaporkan pernah mengguncang Padang Panjang. Akibat gempabumi ini tercatat korban tewas lebih dari 354 orang. Kerusakan parah terjadi di sekitar Danau Singkarak Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto dan Alahan Panjang. Gempabumi susulan mengakibatkan kerusakan pada sebagian wilayah Danau Singkarak. Tercatat di Kabupaten Agam sebanyak 472 rumah roboh, 57 orang tewas dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang sebanyak 2.383 rumah roboh, 247 orang tewas. Dampak gempabumi juga menimbulkan banyak tanah terbelah, longsor di Padang Panjang, Kubu Krambil dan Simabur.

Gempabumi kuat dengan magnitudo 5.6 Skala Richter juga pernah terjadi pada 16 Februari 2004. Getaran gempabumi ini dirasakan di sebagian besar daerah Sumatera Barat hingga pada VI MMI (Modified Mercalli Intensity) yang menimbulkan korban tewas sebanyak 6 orang dan meluluhlantakkan ratusan

bangunan rumah di Kabupaten Tanah Datar. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 22 Pebruari 2004, gempabumi yang lebih besar kembali mengguncang Sumatera Barat dengan magnitudo 6 Skala Richter. Gempabumi ini mengakibatkan satu orang korban tewas dan beberapa orang luka parah serta ratusan rumah rusak berat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi seismik yang aktif dan kompleks zona gempabumi Sumatera Barat tersusun atas dua generator gempabumi. Pertama, pembangkit gempabumi berasal dari kawasan barat Sumatera yaitu zone subduksi lempeng yang berpotensi menimbulkan gempa kuat yang besar kemungkinan diikuti tsunami. Gempabumi-gempabumi yang dipicu oleh aktivitas penyusupan lempeng sebagian besar hiposenternya berpusat di perairan sebelah barat Sumatera. Hal ini berkaitan dengan adanya pertemuan lempeng benua di dasar laut. Untuk kawasan Sumatera Barat, potensi gempa besar justru akibat aktivitas lempeng di zona subduksi yang dicirikan dengan magnitudonya yang relatif lebih besar.

Generator gempabumi kedua adalah zona patahan Sumatera atau yang populer dikenal sebagai Semangko Fault. Semangko Fault merupakan patahan sangat aktif di daratan yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua, membentang sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Teluk Semangko di Selat Sunda sampai ke wilayah Aceh di utara. Gempabumi berkekuatan 7,0 skala Richter yang mengejutkan masyarakat Sungai Penuh pada hari Kamis (1/10) yang episentrumnya sekitar 160 kilometer dari Kota Padang merupakan gempabumi akibat aktivitas Patahan Semangko. Tampaknya pelepasan energi gempabumi

utama Padang berkekuatan 7.6 skala Richter yang dibangkitkan oleh aktivitas subduksi lempeng berdampak telah memicu aktivitas sesar di daratan.

Berdasarkan data sejarah gempabumi Sumatera, dalam 100 tahun terakhir, sudah sekitar 20 gempa besar dan merusak terjadi zona patahan ini. Berdasarkan penelitian, aktivitas gempabumi di patahan Semangko rata-rata sekitar 5 tahun sekali. Meskipun gempabumi di zona patahan ini magnitudonya relatif kecil, namun dampaknya bisa sangat berbahaya disebabkan sumbernya di daratan yang berdekatan dengan kawasan pemukiman.

4.2.2. Tsunami

Dari dokumen pemerintah Belanda, pada 10 Februari 1797 dan 24 Nopember 1833, telah terjadi Tsunami yang cukup besar dengan ketinggian 3-4 meter di Kota Padang, dan landaannya mencapai 1 km. Dalam waktu dekat, para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4.2.3. Banjir

Provinsi Sumatera Barat memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai bagian barat. Secara tradisional, perkembangan penduduk di Provinsi Sumbar dimulai dari daerah

tepiian sungai-sungai besar seperti asal-usul masyarakat di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Agam. Lokasi yang

4.2.4. Gunung Api

Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat Gunung ini berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Pada tahun 2007, aktivitas Gunung Talang sempat menyemburkan lahar meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar. Namun, kejadian tersebut telah menarik perhatian ahli nasional dan internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung api untuk memprediksi aktivitasnya di masa yang akan datang. Selain Gunung Talang, beberapa tahun belakang, Gunung Merapi juga masih terus mengeluarkan asap sehingga potensi bencana yang ditimbulkan terhadap penduduk di sekitar cukup besar.

4.2.5. Longsor

Sejarah bencana longsor di Sumatera Barat terjadi di Padang Panjang pada tanggal 4 Mei 1987 yang diperkirakan merupakan longsor terbesar. Korban yang ditimbulkannya sebanyak 143 orang meninggal, 49 rumah rusak berat dan 1 buah bangunan sekolah tertimbun.

4.2.6. Abrasi Pantai

Provinsi Sumatera barat berbatasan langsung dengan lautan India di sebelah barat. Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam siklus aliran laut yang berpotensi menimbulkan abrasi pantai.

4.2.7. Penggunaan Narkoba dan Obat Terlarang

Era informasi membawa masyarakat Provinsi Sumatera Barat ikut dalam budaya global. Dampak buruk pengaruh dari budaya global ini terhadap budaya lokal tak dapat dihindari. Beberapa kelompok masyarakat teridentifikasi memiliki ketergantungan terhadap obat terlarang. Kelompok ini juga memiliki potensi besar untuk terkena HIV/AIDS. Jika tidak ditangani dengan baik, bencana social ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

4.2.8. Konflik Sosial

Secara umum, masyarakat di Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya yang sama. Namun, di beberapa daerah sekelompok masyarakat dari suku yang memiliki budaya yang berbeda datang dan menetap. Kedatangan mereka disebabkan oleh program pemerintah transmigrasi dan oleh keinginan mereka sendiri. A adanya perbedaan budaya ini, menimbulkan potensi konflik horizontal antar masyarakat. Disamping itu, konflik akibat ego manusia juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Konflik social yang telah terjadi di Provinsi Sumatera Barat adalah di Kabupaten Solok pada tahun 1993, 2003 dan 2008.

4.3 Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012 (RPB Sumbar) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2008. Penyusunan RPB Sumbar memiliki 4 tujuan yaitu :

1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan kinerja lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat
3. Mensinergikan kinerja pemerintah, swasta, masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sesuai dengan budaya masing-masing daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dari bahaya yang mengancam.

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kajian risiko bencana, potensi bencana yang terjadi di Sumatera Barat dibagi dalam tiga skala prioritas. Skala prioritas ini disusun berdasarkan faktor kemungkinan terjadinya bencana, kerentanan masyarakatnya dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1. Tingkat Risiko I, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan yang amat besar dengan potensi terjadinya amat tinggi. Bencana pada tingkat risiko ini mendesak untuk ditangani. Yang termasuk dalam kategori ini adalah; gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi wabah penyakit, penggunaan narkoba dan obat terlarang.
2. Tingkat Risiko II, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan yang amat besar dengan potensi terjadinya rendah atau kerugian/kerusakan yang ditimbulkan sedikit dengan potensi terjadinya tinggi. Bencana pada tingkat risiko ini segera ditangani namun belum mendesak. Yang termasuk

dalam kategori ini adalah; Longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai, kebakaran bangunan, badai puting beliung dan gelombang pasang.

3. Tingkat Risiko III, adalah bencana yang menimbulkan kerugian /kerusakan sedikit dengan potensi terjadinya rendah. Bencana pada tingkat risiko ini dapat ditangani secara bertahap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah; kekeringan, gagal teknologi, konflik sosial dan pencemaran lingkungan.

Sebagai rencana induk penanggulangan bencana daerah, RPB Sumbar terdiri dari 23 kebijakan penanggulangan bencana pada fase sebelum, saat dan setelah bencana. Kebijakan ini diuraikan dari 10 sasaran dan 5 tujuan penanggulangan bencana. Selanjutnya terdapat 3 misi yang hendak dicapai untuk mewujudkan Visi Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, yaitu : ***“Sumatera Barat Siaga, Tangguh dan Tawakal Menghadapi Bencana”***. Adapun misi penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu.
- b. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis
- c. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis.

Dari misi tersebut, ditetapkan 5 tujuan PB Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. Membangun system PB yang handal
- b. Membangun Kesiapsiagaan Bencana Secara Partisipatif
- c. Mempersiapkan Infrastruktur PB yang tangguh

- d. Meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana
- e. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.

Dari 5 tujuan, dijabarkan menjadi 10 sasaran, yaitu :

- a. Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan PB Sumbar
- b. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar.
- c. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar
- d. Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.
- e. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum
- f. Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana
- g. Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal
- h. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif
- i. Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana
- j. Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Selanjutnya, terdapat 23 kebijakan PB Provinsi Sumbar yaitu :

- a. Menerbitkan aturan PB Prov. Sumbar
- b. Mempercepat pembentukan aturan PB di Kota/Kab di Prov. Sumbar

- c. Mendirikan BPBD Prov. Sumbar dengan sumber daya yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar
- d. Mempercepat pembangunan BPBD Kota/Kab di Prov. Sumbar dengan metode terstandarisasi.
- e. Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber daya di Prov. Sumbar dalam PB
- f. Membangun jaringan kerja PB untuk optimalisasi mobilisasi sumber daya
- g. Membangun system peringatan dini bencana yang handal dan responsive bagi masyarakat
- h. Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam PB
- i. Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan kemampuan penduduk dalam memobilisasi sumber daya.
- j. Membangun kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana
- k. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternative pengurangan kerentanan bencana
- l. Menyusun scenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis PB di Kota/Kab Prov. Sumbar
- m. Melaksanakan mitigasi structural pada daerah rentan
- n. Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan
- o. Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana
- p. Pengerahan sumber daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis.
- q. Menjamin distribusi logistic yang tepat sasaran

- r. Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemic penyakit.
- s. Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana
- t. Memulihkan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana
- u. Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk
- v. Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum
- w. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas umum

Seluruh kebijakan penanggulangan bencana dalam RPB Sumbar diterjemahkan pelaksanaannya dengan 39 program kerja serta 92 kegiatan penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya tersebut, terdiri dari 3 fase penanggulangan bencana yang dilakukan selama 5 tahun mulai dari Tahun 2008 hingga Tahun 2012 untuk 10 potensi bencana alam dan 6 potensi bencana non alam. Dari 23 kebijakan tersebut, diuraikan menjadi 39 program dan 92 kegiatan. Untuk pengelolaan pelaksanaan RPB Sumbar ini, dilakukan oleh Lembaga BPBD yang menggantikan peran satkorlak PB yang bersifat koordinatif dan fungsional. Selain lembaga pemerintah, sumber daya yang turut berperan dalam penanggulangan bencana terdiri dari masyarakat umum, swasta, lembaga non pemerintahan, perguruan tinggi dan media massa. Pendanaan kegiatan penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, sector swasta, donor nasional dan internasional.

4.4 Penanggulangan Bencana 30 September 2009 dan 25 Oktober 2010

Pada tanggal 30 September 2009, telah terjadi gempa bumi dengan magnitude 7,1 SR di Sumatera Barat pada pukul 17.16 WIB dengan episenter 71 kilometer berdasarkan BMKG. Intensitas gempa dilaporkan mencapai skala MMI VII-VIII di Kota Padang dan V-VI di Kab/Kota sekitarnya. Lokasi pusat gempa dapat dilihat pada gambar 4.1. Kerugian yang ditimbulkan pada gempa ini tersebar pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Gambar 4.1. Lokasi Pusat Gempa 30 September 2009



Sumber : BNPB, 2009

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September ini merupakan rangkaian gempa yang diakibatkan karena posisi Pulau Sumatera di sepanjang jalur tumbukan dua lempeng bumi, di mana lempeng (Samudra) Hindia bergerak menunjam ke bawah lempeng (benua) Sumatra. Sumatra dan busur kepulauan di bagian baratnya adalah bagian dari lempeng Eurasia. Sedangkan lempeng lainnya berada di bawah Lautan Hindia. Batas dua lempeng ini dapat diamati berupa jalur palung laut

dalam di sebelah barat Sumatra sampai ke Kep. Andaman. Lempeng Hindia menunjam di bawah Sumatra 50-60 cm/tahun dengan kemiringan sekitar 12 derajat. Bagian dangkal (di atas 60km) dari batas antara lempeng yang menunjam

dan lempeng di atasnya disebut sebagai (patahan) megathrust. Megathrust ini berpotensi mengeluarkan gempa dengan kekuatan diatas M8. Sejak tahun 2000 zona subduksi Sumatra sudah berkali-kali mengeluarkan gempa besar, termasuk kulminasi gempa sangat besar tahun 2004 di wilayah Aceh Andaman yang mengakibatkan bencana tsunami yang sangat fenomenal.

Tabel 4.1 Kerugian akibat gempabumi 30 September 2009

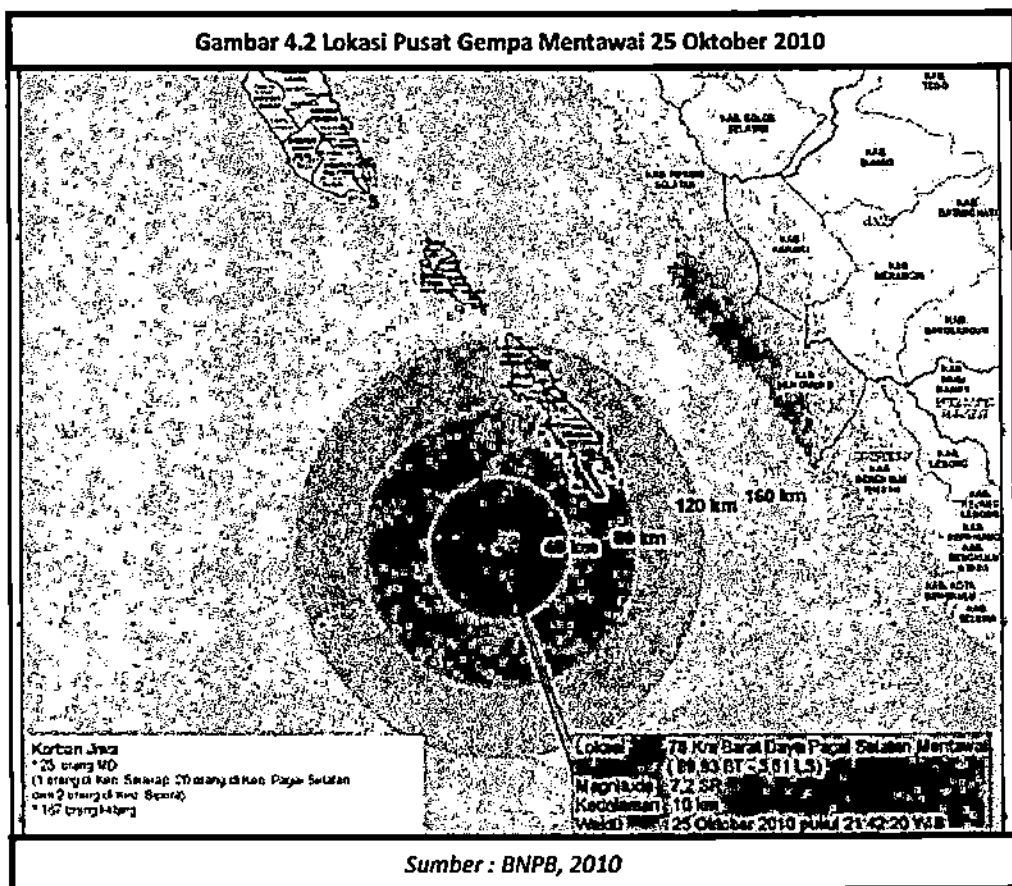
Kabupaten/Kota	% Kerusakan perumahan	Kerugian bidang Perumahan (Miliar Rupiah)	Kerugian pada Gedung Pemerintah (Miliar Rupiah)	Jumlah kerugian (Miliar Rupiah)
Kota Padang	71	84	1066,5	1150,5
Kota Pariaman	88	887	174	1061
Kota Solok	0	0,3	0,1	0,4
Kota Padang Panjang	6	8,2	2,6	10,8
Kab. Tanah Datar	0	6,6	1,9	8,5
Kab. Pdg. Pariaman	96	954	1285,8	2239,8
Kep. Mentawai	0	24,6	5,8	30,4
Kab. Solok	1	1,1	0,2	1,3
Kab. Pesisir Selatan	10	250,1	67,1	317,2
Kab. Agam	20	1481	268,9	1749,9
Kab. Pasaman Barat	2	28,2	4,9	33,1
Kab. Pasaman Barat	12	463,8	97,6	561,4

Sumber : BNPB, 2009

Studi paleogeodesi dengan mempergunakan terumbu karang jenis mikroatol berhasil mengetahui sejarah dan mekanisme gempa-gempa besar yang sudah terjadi tidak hanya yang tercatat dalam sejarah melainkan juga gempa-gempa pra-sejarah yang terjadi dalam kurun waktu 700 tahun terakhir. Hasil studi terakhir menunjukkan bahwa peristiwa gempa besar di wilayah zona subduksi Mentawai terjadi pada tahun 1300-an, 1600-an, dan 1797 dan 1833 (tercatat dalam sejarah); dengan lain kata mempunyai perioda ulang/masa akumulasi gempa sekitar 200 tahunan. Rekaman paleogeodesi juga mengindikasikan bahwa peristiwa gempa besar atau pelepasan akumulasi energi gempa yang sudah terjadi biasanya merupakan rentetan gempa besar bukan dilepaskan oleh gempa besar tunggal.



Rentetan gempa besar berikutnya adalah pada tanggal 25 Oktober 2010 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan magnitudo 7,7 SR gempa bumi terjadi dilepas pantai Sumatera pada pukul 21:42 WIB. Lokasi pusat gempa dapat dilihat pada gambar 4.2. Badan Survey Geologi Amerika Serikat, USGS awalnya melaporkan episentrum gempa bumi terjadi pada kedalaman 20.5 mil (33,0 km), tapi kemudian melaporkan bahwa kedalaman episentrum gempa pada kedalaman 8.8 mil (14,2 km) dan kemudian 12.8 mil (20,6 km) USGS juga awalnya memperkirakan magnitudo gempa 7,5 skala richter sebelum merevisi menjadi 7,7 skala richter.



Pada gempa tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan tsunami. Peringatan kemungkinan tsunami disampaikan, tetapi kemudian dicabut setelah kemungkinan ancaman tsunami berlalu. Setelah Peringatan dari BMKG dicabut,

tsunami terjadi setinggi 3-10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Berdasarkan Pacific Tsunami Warning Center, gempa menyebabkan sebuah tsunami yang dilaporkan melanda Resor Selancar Macaronis di Kepulauan Mentawai, yang menghantam dua perahu sewaan. Akibatnya 286 orang dilaporkan tewas dan 252 orang lainnya dilaporkan hilang, hal ini disebabkan terpencilnya lokasi (pulau hanya dapat dijangkau dengan kapal laut) sehingga membuat laporan korban mengalami keterlambatan.

Upaya penanggulangan bencana kedua gempabumi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dari pengalaman bencana tersebut, dapat diidentifikasi temuan sebagai pembelajaran sebagai bahan evaluasi kebijakan PB Prov. Sumbar. Masing-masing temuan tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pada fase tertentu. Untuk itu temuan penanggulangan bencana tersebut dikelompokkan sesuai dengan fase perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera

Barat

Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dilihat dari pencapaian sasaran. Indikator pencapaian sasaran dilihat dari temuan kendala berdasarkan penanggulangan bencana gempa bumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010. Temun kendala diidentifikasi berdasarkan masing-masing sasaran dan dapat dijadikan tolak ukur efektivitas kebijakan

Temuan kendala yang diperoleh dari hasil diskusi grup terfokus dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Hasil Identifikasi Temuan Kendala pada masing-masing sasaran Penanggulangan
Bencana Prov. Sumbar

SASARAN	TEMUAN KENDALA	
Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana Sumatera Barat	1.	Koordinasi antar SKPD belum terlaksana, kapasitas SDM masih lemah dalam pengaturan dan pelaksanaan
	2.	Sosialisasi aturan tidak terlaksana dengan baik
	3.	Aturan yang dibuat belum dapat memadai dan melibatkan semua SKPD (Dinas Pendidikan)
Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar.	1.	Komitmen Politis masih kurang sehingga struktur BPBD tidak optimal; unsur pengarah dan kapasitas SDM
	2.	Kapasitas SDM belum memadai
	3.	Standarisasi BPBD (Perka 3/2008) tidak dilaksanakan

Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar	1.	Belum adanya identifikasi aset, belum adanya rencana kontijensi
	2.	Koordinasi susah dilaksanakan baik karena ego sektoral maupun karena kurangnya kapasitas BPBD atau perbedaan potensi bencana di daerah, nampak jelas dalam distribusi logistik
	3.	Sistem peringatan dini belum dirancang dengan menggunakan kearifan lokal dan berbeda untuk masing-masing daerah sesuai geografis
	4.	Komitmen dalam implementasi program tidak ada
Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.	1.	Sosialisasi Budaya siaga belum berkembang di sekolah, masyarakat dan pemerintahan
	2.	Standarisasi yang belum ada sehingga banyak kegiatan siaga yang mandeg dan tidak dapat diaplikasikan ke sekolah lain/kabupaten/kota
Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum	1.	Perencanaan wilayah belum berorientasi PRB
	2.	Sarana dan prasarana evakuasi yang masih kurang
	3.	Koordinasi antar SKPD belum memadai, tidak adanya kesatuan visi
Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana	1.	Belum terlaksananya ARB untuk bangunan- bangunan perumahan (keterbatasan kapasitas dan dana)
	2.	ARB tidak optimal dalam menurunkan kerentanan
	3.	Tidak adanya koordinasi SKPD dalam menurunkan kerentanan lingkungan dan masyarakat
Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal	1.	Adanya permasalahan dalam pengumpulan dan ketersediaan data penduduk untuk distribusi logistik
	2.	Kurangnya sarana-prasarana, SDM untuk pertolongan; diperlukan kemandirian masyarakat dalam masa krisis
Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif	1.	Relokasi perlu dilakukan dengan penyiapan mata pencaharian alternatif
	2.	Perencanaan pemulihan perlu dilakukan dengan koordinasi, partisipatif (bottom up) dan top down

Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana	1.	Koordinasi dengan masy rantau, SKPD, perbankan, swasta, LSM lemah
	2.	Perlu pemulihan psikologis, misalnya terhadap mental masy yang terlalu mengharapkan bantuan
Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.	1.	Pelaksanaan proyek yang banyak penyelewengan dan masalah penganggaran
	2.	Pemeliharaan fasilitas tidak dilakukan
	3.	Pemulihan sangat lambat dilakukan

Sumber : Hasil Analisis Data Primer (FGD), 2011

Berdasarkan temuan kendala di atas, ditetapkan secara bersama tingkat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran. Dengan merata-ratakan tingkat pencapaian pada masing-masing sasaran, persentase efektivitas dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Tingkat Pencapaian Sasaran penanggulangan bencana

Sasaran		Tingkat Pencapaian
1.	Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan PB Sumbar	52%
2.	Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar.	60%
3.	Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar	42%
4.	Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.	42%
5.	Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum	42%
6.	Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana	42%

7.	Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal	50%
8.	Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif	65%
9.	Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana	54%
10.	Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.	50%
	Rata-rata Pencapaian Sasaran RPB	50%

Sumber : Hasil FGD, 2011

Dari hasil penilaian tingkat efektivitas di atas, diperoleh rata-rata pencapaian sasaran adalah 50%. Sasaran 3,4,5 dan 6 memiliki tingkat pencapaian yang paling rendah (42%) yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan sasaran 2 dan 8 memiliki tingkat pencapaian sasaran yang paling baik (65%) yaitu mengenai pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan perencanaan pemulihan secara partisipatif.

5.2 Tingkat Ketahanan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tingkat ketahanan daerah diketahui dari 22 indikator HFA berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Analisis tingkat ketahanan daerah diperlukan untuk mengetahui penyebab adanya temuan dalam penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerentanan dan kapasitas sumber daya daerah, sehingga dapat mempertajam perbaikan strategi dan kebijakan.

Analisis tingkat ketahanan daerah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terkena dampak bencana paling tinggi pada kejadian gempa bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi dan Tsunami 25 Oktober 2010; Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Rekapitulasi level masing-masing daerah dapat dilihat pada tabel 5.3. indeks indikator masing-masing daerah dirata-ratakan untuk dibandingkan dengan indeks indikator Provinsi.

Tabel 5.3. Nilai indikator HFA Kabupaten/Kota

No	Indikator	A	B	C	D	E	F	G	H
I.1	Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	2	4	4	2	4	2	3	5
I.2	Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	2	3	3	3	4	4	3	3
I.3	Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	2	3	3	2	5	2	3	1
I.4	Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	2	3	3	2	4	2	3	3
II.1	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	2	2	3	2	3	2	2	2

II.2	Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	2	2	2	1	3	1	2	2
II.3	Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	2	3	2	2	4	2	3	4
II.4	Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	2	1	3	2	2	1	3	1
III.1	Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	3	2	2	2	3	1	2	2
III.2	Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	3	1	3	2	3	3	2	3
III.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	2	1	2	1	3	1	1	3
III.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	2	2	4	3	3	2	3	3
IV.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	5	3	4	4	5	2	4	4
IV.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	5	1	4	3	4	2	3	4
IV.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	2	1	2	2	2	1	1	2
IV.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	5	2	4	3	4	2	3	4
IV.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	4	4	3	2	4	1	3	3
IV.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	2	1	2	2	2	1	1	1
V.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	2	3	4	3	4	4	3	3

V.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	2	2	2	2	2	2	2	2
V.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	2	2	3	3	3	3	3	3
V.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	2	4	4	3	3	2	3	2

Ket :

A : Kabupaten Agam

B : Kabupaten Kepulauan Mentawai

C : Kabupaten Padang Pariaman

D : Kabupaten Pesisir Selatan

E : Kota Padang

F : Kota Pariaman

G : Rata-rata Kab/Kota

H : Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Analisis data sekunder, 2011

Dari level indikator dapat dihitung level prioritas masing-masing daerah dan tingkat ketahanan daerah. Perhitungan untuk masing-masing daerah dapat dilihat pada lampiran 6. Tingkat ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4. Indeks Prioritas Aksi dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Aksi	A	B	C	D	E	F	G	H
I	Prioritas Aksi Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat	2	3	3	2	4	2	3	3
II	Prioritas Aksi Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	2	2	2	1	3	1	2	2
III	Prioritas Aksi Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	2	1	3	2	3	1	2	3
IV	Prioritas Aksi Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	4	1	3	2	3	1	2	2
V	Prioritas aksi Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	2	2	3	3	3	3	3	2
	INDEKS KETAHANAN DAERAH	2	2	3	2	3	2	2	3

Sumber : Analisis data sekunder, 2011

Dari tabel 5.4, tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat berada pada level 3 yang artinya *"Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti"*. Jika dibandingkan dengan level kabupaten/kota, rata-rata kabupaten/kota berada pada level 2, yang artinya *"Pencapaian ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada"*. Jika dilihat berdasarkan prioritas aksi, rata-rata kabupaten/kota tidak terlalu berbeda jauh dengan level Provinsi. Namun, terdapat daerah yang menonjol dalam prioritas aksi tertentu, yaitu Kota Padang dalam hal tata pemerintahan (prioritas aksi 1) dan Kabupaten Agam dalam hal pengurangan faktor-faktor risiko yang mendasar (prioritas aksi 4). Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan sangat rentan dalam hal pengukuran risiko (prioritas aksi 2). Sedangkan, untuk prioritas aksi 3 (pendidikan dan edukasi) dan 4 (Manajemen risiko dan penurunan kerentanan), daerah yang paling rentan adalah Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, prioritas aksi berdasarkan kondisi yang paling rentan adalah :

1. Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas
2. Manajemen risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosedur penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan produksi.
3. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat.

4. Pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai penyediaan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan.
5. Tata pemerintahan, terutama belum adanya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal.

5.3 Penyusunan Alternatif Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil FGD, diidentifikasi temuan-temuan pada penanggulangan bencana yang menjadi pembelajaran dan harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki atau mempertajam kebijakan atau program Penanggulangan Bencana yang ada. Pembelajaran yang dimaksud adalah :

1. Memperkuat koordinasi intern pemerintahan (SKPD), antar pemerintah - swasta, perbankan, LSM, masyarakat rantau pada saat fase prabencana, tanggap darurat dan pemulihan.
2. Meningkatkan kapasitas Kepala Daerah dan SDM Pemerintahan (BPBD serta instansi terkait).
3. Menyusun Rencana Kontijensi untuk menilai kebutuhan sumber daya dan logistik.
4. Perencanaan dan penerapan aturan penataan ruang dengan perspektif PB.
5. Menyempurnakan aturan PB dengan meningkatkan keterlibatan semua SKPD, stakeholder.

6. Sosialisasi tentang PB perlu lebih diperluas, baik tentang peraturan yang ada maupun untuk prosedur kesiapsiagaan kepada komunitas.
7. Menyusun sistem peringatan dini berdasarkan kearifan lokal dan kondisi geografis daerah.
8. Membuat rencana pemulihan dengan relokasi dan penyiapan alternatif mata pencaharian.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan.

Selanjutnya, hasil pembelajaran ini dikombinasikan dengan hasil analisis tingkat ketahanan daerah berdasarkan 22 indikator HFA menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan hasil analisis tingkat ketahanan daerah, diperoleh kondisi kerentanan daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan menurunkan kerentanan atau peningkatan indeks indikator HFA sesuai dengan kriteria yang ada pada lampiran 4, dapat direncanakan kebijakan penanggulangan bencana. Digabungkan dengan hasil pembelajaran pada kajian efektifitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat, kebijakan yang direncanakan disamping dapat lebih efektif, juga dapat meningkatkan indeks ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat pada akhir periode perencanaan. Pada tabel 5.5 dapat dilihat hasil analisis terhadap tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar penyusunan alternatif kebijakan penanggulangan bencana.

Tabel 5.5. Penyusunan Kebijakan Alternatif PB berdasarkan Tingkat Ketahanan Daerah

PRIORITAS AKSI	INDIKATOR DENGAN INDEKS ≤ 2		PEMBELAJARAN HASIL IDENTIFIKASI TEMUAN PADA FGD	KEBIJAKAN
Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat	1.	Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	Memperkuat koordinasi intern pemerintahan (SKPD), antar pemerintah - swasta, perbankan, LSM, masyarakat rantau pada saat fase prabencana, tanggap darurat dan pemulihan	Kebijakan Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal
			Meningkatkan kapasitas Kepala Daerah dan SDM Pemerintahan (BPBD serta instansi terkait)	Kebijakan Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana
Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	1.	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah		
	2.	Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	Sosialisasi tentang PB perlu lebih diperluas, baik tentang peraturan yang ada maupun untuk prosedur kesiapsiagaan kepada komunitas	Kebijakan Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama

			Menyusun sistem peringatan dini berdasarkan kearifan lokal dan kondisi geografis daerah	
	3.	Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	Perencanaan dan penerapan aturan penataan ruang dengan perspektif PB	Kebijakan Memperkuat dokumen Kajian Risiko Daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko
Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	1.	Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)		
	2.	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset		Kebijakan Menerapkan metode riset untuk kajian tentang kebencanaan di Provinsi Sumatera Barat
Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	1.	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	Membuat rencana pemulihan dengan relokasi dan penyiapan alternatif mata pencaharian	Kebijakan Memperkuat bidang ekonomi produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat

	2.	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan	Kebijakan Menerapkan prosedur-prosedur penilaian dampak risiko bencana terhadap proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur
Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	1.	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	Menyusun Rencana Kontijensi untuk menilai kebutuhan sumber daya dan logistik	Kebijakan Menyusun Rencana Kontijensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, mengadakan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana
	2.	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat		Kebijakan Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana selama masa tanggap darurat

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Kebijakan yang disusun diuraikan ke dalam strategi pelaksanaan, dan program penanggulangan bencana yang lebih spesifik. Meskipun uji efektivitas dilakukan berdasarkan temuan bencana gempa 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010, karena indikator HFA bersifat multi bencana, maka perencanaan yang dibuat diharapkan tidak hanya dapat mengurangi risiko bencana gempabumi dan tsunami saja, tapi untuk semua jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

6.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Prov. Sumbar

Berdasarkan uraian di atas, disusun kebijakan yang menjadi prioritas yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembangian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal
2. Kebijakan Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana
3. Kebijakan Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama
4. Kebijakan Memperkuat dokumen Kajian Risiko Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Kebijakan Menerapkan metode riset untuk kajian tentang kebencanaan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Kebijakan Memperkuat bidang ekonomi produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat
7. Kebijakan Menerapkan prosedur-prosedur penilaian dampak risiko bencana terhadap proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur

8. Kebijakan Menyusun Rencana Kontijensi bencana, mengadakan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana
9. Kebijakan Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana selama masa tanggap darurat.

6.2. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan kebijakan di atas, ditetapkan strategi pelaksanaan kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Menjamin partisipasi dan pembagian wewenang melalui legalitas dan sistem insentif
2. Menyusun sistem partisipatif dalam penganggaran
3. Memberdayakan sumber daya lokal dari tingkat pemerintahan, LSM dan swasta
4. Penggunaan teknologi dan mengoptimalkan sumber daya dengan pengembangan kearifan lokal
5. Mengutamakan kajian risiko untuk 2 daerah atau lebih dan menggaling kerjasama lintas batas
6. Pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah
7. Pengembangan riset kebencanaan di lingkungan pemerintahan
8. Pengembangan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat pada daerah rawan bencana

9. Pengintegrasian dokumen Analisis Risiko Bencana dengan dokumen lingkungan (AMDAL)
10. Menyusun rencana kontijensi berdasarkan kajian risiko bencana daerah
11. Membangun mekanisme komunikasi pada masa tanggap darurat terutama untuk kepentingan distribusi logistik

6.3. Program-Program Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, disusun program yang menjadi prioritas yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi Sistem KODAL dan Mekanisme Pembagian Peran saat tanggap darurat bencana
2. Pembangunan Mekanisme Anggaran Partisipatif untuk Penyelenggaraan PB
3. Pembangunan Mekanisme Insentif keterlibatan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB
4. Membangun kapasitas personil PB sesuai dengan kriteria standar yang dibutuhkan
5. Pembangunan mekanisme Forum PRB Prov. Sumbar untuk memonitoring PRB yang mandiri, transparan dan akuntabel
6. Mengembangkan dan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini
7. Pembangunan sistem informasi kebencanaan Provinsi Sumatera Barat
8. Penyusunan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi
9. Pembangunan Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lintas Batas

10. Pembentukan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Kebencanaan
11. Pemberdayaan kapasitas internal pemerintah untuk riset dan penelitian kebencanaan
12. Pemantauan efektivitas upaya pengurangan risiko bencana Provinsi Sumatera Barat
13. Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah di daerah rawan bencana
14. Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Berdasarkan Peta Sektor Pengentasan Kemiskinan Di Zona Prioritas PB Provinsi
15. Penyusunan aturan dan pedoman analisis risiko bencana untuk proyek-proyek besar
16. Pemantauan dan penilaian analisis risiko bencana
17. Penyusunan Rencana Kontinjensi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi
18. Pembangunan Mekanisme Penerapan Rencana Kontinjensi
19. Pembangunan Sistem Distribusi Logistik untuk menjamin stabilitas harga pasar kebutuhan tanggap darurat provinsi
20. Pembangunan fasilitas pendukung Sistem Distribusi Logistik di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi

Program-program di atas, diuraikan menjadi 50 kegiatan. Untuk lebih jelasnya kebijakan, strategi pelaksanaan, program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1.

TABEL 6.1. ALTERNATIF RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROPINSI SUMATERA BARAT

KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Kebijakan Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	1. Menjamin partisipasi dan pembagian wewenang melalui legalitas dan sistem insentif	1. Penyusunan Regulasi Sistem KODAL dan Mekanisme Pembagian Peran saat tanggap darurat bencana	1. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana	1. Adanya Peraturan Gubernur tentang POS Peran dan Fungsi Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat serta status darurat bencana
				Mempercepat waktu pelaksanaan penanganan darurat bencana dari rencana kontinjensi yang disusun
			2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Skala Bencana Daerah	2. Adanya Peraturan Gubernur tentang Status Bencana
				Status bencana memperhatikan sebab dan rentang waktu kejadian bencana
			3. Peningkatan Mekanisme Koordinasi BPBD Propinsi Sumatera Barat, dengan menjadikan Kota Padang sebagai percontohan	3. Terbentuk Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah di BPBD dan BPBD Kab/Kota
				Teridentifikasinya tupoksi SKPD dalam penyelenggaraan PB Propinsi Sumatera Barat
				Terbangunnya Jejaring antar institusi PB yang siap sedia untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan PB
			4. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat 2012-2017	4. Adanya Peraturan Gubernur tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana berdasarkan kajian risiko di Provinsi Propinsi Sumatera Barat 2012 - 2017
			5. Mengintegrasikan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi kedalam Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat	5. Diterapkannya IMB di kabupaten/kota pada fasilitas publik, fasilitas komersial dan rumah masyarakat di ZPPB dengan metode insentif dan disentif dari pemerintah provinsi
				Kawasan Rawan Bencana dijadikan Kawasan Lindung berbasis Mitigasi Bencana

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		2. Pembangunan Mekanisme Insentif keterlibatan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB	6. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Dukungan Partisipasi Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB	6. Adanya aturan/kebijakan terkait penegakan hukum yang diatur dengan melibatkan lintas institusi secara terpadu terkait dunia usaha dalam meningkatkan kapasitas masyarakat rentan
			7. Pelaksanaan malam donasi komitmen pemerintah-perusahaan untuk Pengentasan Kerentanan masyarakat di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	7. Adanya agreement perusahaan besar untuk menjamin komitmen bersama (yang diketahui dan disetujui oleh lintas stakeholder) dalam mengembangkan kapasitas masyarakat di daerah rentan
				Dunia usaha melaksanakan program peningkatan masyarakat di daerah rentan.
	2. Menyusun sistem partisipatif dalam penganggaran	3. Pembangunan Mekanisme Anggaran Partisipatif untuk Penyelenggaraan PB	8. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Partisipasi Penganggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	8. Adanya Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			9. Promosi RPB Propinsi Sumatera Barat untuk Penggalangan Anggaran Partisipatif PB	9. Institusi memiliki dana dan kontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Kebijakan Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	3. Memberdayakan sumber daya lokal dari tingkat pemerintahan, LSM dan swasta	4. Membangun kapasitas personil PB sesuai dengan kriteria standar yang dibutuhkan	10. Menyusun Kurikulum Pendidikan Standar Personil BPBD untuk tingkat pelaksana, administrasi, pengelola dan pengambil kebijakan	10. Tersedianya kurikulum standar dalam PB.
			11. Pembangunan mekanisme seleksi khusus personil BPBD	11. Personil PB mampu bekerja secara mandiri dan profesional.
			12. Pelaksanaan Diklat BPBD berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan	12. Keterampilan personil BPBD sesuai dengan tupoksinya.
			13. Pelaksanaan latihan dan simulasi internal secara periodik untuk sistem penanggulangan bencana Propinsi Sumatera Barat	13. Adanya peningkatan ketrampilan teknis PB di setiap BPBD.
			Pengisian formasi fungsional dalam BPBD	Tersedianya tenaga fungsional dalam BPBD

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		5. Pembangunan mekanisme Forum PRB Prop. Sumbar untuk memonitoring PRB yang mandiri, transparan dan akuntabel	14. Pendampingan pembentukan Forum PRB kabupaten/kota di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat	14. Terbentuknya minimal 5 Forum PRB Kabupaten / Kota yang diakui oleh semua pihak mewakili setiap Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat
			15. Membangun Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan RPB yang mandiri, transparan dan akuntabel pada FPRB	15. Terbentuknya partisipasi forum dengan prinsip kemandirian.
				Dilaksanakannya Monev Logitudinal yang mengacu kepada ketermanfaatan komunitas masyarakat dalam pelayanan yang diberikan Institusi penanggulangan bencana di Propinsi Sumatera Barat
3. Kebijakan Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	4. Penggunaan teknologi dan mengoptimalkan sumber daya dengan pengembangan kearifan lokal (Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman)	6. Mengembangkan dan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini	16. Penyusunan sistem dan prosedur operasional dari pemantauan dan penginformasian peringatan dini	16. Adanya sistem dan prosedur peringatan dini terhadap bencana dengan potensi besar di Propinsi Sumatera Barat
		7. Pembangunan sistem informasi kebencanaan Propinsi Sumatera Barat	17. Pembuatan website kebencanaan Propinsi Sumatera Barat	17. Adanya satu website kebencanaan propinsi Sumatera Barat yang dapat diakses secara luas
			Sosialisasi Sistem Informasi kebencanaan daerah	Banyaknya daerah, kelompok masyarakat, sekolah yang mengakses
4. Kebijakan Memperkuat dokumen Kajian Risiko Daerah Propinsi Sumatera Barat	5. Menyusun kajian risiko untuk 2 daerah atau lebih untuk menggalang kerjasama lintas batas	8. Penyusunan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	18. Pembaruan Kajian Risiko Bencana Propinsi Sumatera Barat	18. Adanya Kajian dan Peta Risiko Bencana untuk 10 Bencana Propinsi Sumatera Barat
			19. Penyusunan Zonasi Risiko Bencana Lintas Batas berdasarkan Kajian Risiko Bencana	19. Adanya Rencana Usulan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat
		9. Pembangunan Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lintas Batas	20. Penyusunan Mekanisme Penyelenggaraan PB Lintas Batas	20. Mekanisme penganggaran penyelenggaraan PB Lintas Batas
				Mekanisme Penanganan Darurat PB Lintas Batas
			21. Konsolidasi Periodik Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	21. Pendeknya birokrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Terbangunnya komunikasi antar penyelenggara penanggulangan bencana di dalam zona yang telah ditetapkan

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
5. Kebijakan Menerapkan metode riset untuk kajian tentang kebencanaan di Propinsi Sumatera Barat.	6. Pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah (Prioritas pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman)	10. Pembentukan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Kebencanaan	22. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Propinsi Sumatera Barat	22. Kelompok Kerja Pengembang Kurikulum yang berasal dari guru, praktisi PB dan akademisi (nama yang mewakili institusi tersebut)
			23. Penyusunan dan penerapan Kurikulum PB di Lembaga Pendidikan Formal	23. Kurikulum Pendidikan Kebencanaan diperbarui secara periodik sesuai dengan kondisi kebencanaan Propinsi Sumatera Barat dan difokuskan kepada peningkatan keterampilan serta kemampuan inovasi teknologi peserta didik untuk meredam risiko bencana
			24. Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kebencanaan	24. Ikutsertanya Praktisi/ahli Bidang Ilmu Geografi dan mata pelajaran terkait dalam MGMP
	7. Pengembang riset kebencanaan di lingkungan pemerintahan	11. Pemberdayaan kapasitas internal pemerintah untuk riset dan penelitian kebencanaan	25. Sinkronisasi prosedur izin Tugas Belajar dengan Arah Penerapan inovasi teknologi untuk penanggulangan bencana	25. Adanya 10 % dari kuota PNS tiap kabupaten/kota yang fokus penelitian untuk penanggulangan bencana
			26. Pembentukan Dewan Riset Propinsi Sumatera Barat	26. Berfungsinya Komisi Kebencanaan dalam Dewan Riset Propinsi Sumatera Barat
			27. Pemberdayaan peneliti internal pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk PB	27. Adanya persyaratan karya ilmiah tentang kebencanaan untuk PNS yang akan tugas belajar Arah penelitian PB menjadi prioritas bagi PNS yang akan melakukan tugas belajar
		12. Pemantauan efektivitas upaya pengurangan risiko bencana	28. Inventarisasi Kegiatan dan Dampak upaya PRB di Propinsi Sumatera Barat	28. Daftar yang dibuat selalu mendapat update setiap enam bulanan Masuknya daftar kegiatan PB pada Propinsi Sumatera Barat dalam angka
			29. Penerapan Mekanisme Analisis Risiko Bencana bagi proyek pembangunan berskala besar	29. Diterapkannya mekanisme analisis risiko bencana pada proyek pembangunan berskala besar Terpenuhinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan analisis risiko bencana pada proyek berskala besar

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				Diterapkannya mekanisme hukum dan penghargaan berdasarkan hasil monitoring pemenuhan upaya pengurangan risiko bencana
			30. Penerbitan Rasio investasi dan biaya pemulihan dampak bencana	30. Rasio kegiatan PB menalami pembaharuan setiap tahun
6. Kebijakan Memperkuat bidang ekonomi produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat	8. Pengembangan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat pada daerah rawan bencana (Prioritas pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman)	13. Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah di daerah rawan bencana	31. Penetapan Sektor-Sektor Pengembangan Mata Pencarian Alternatif masyarakat di Zona Prioritas PB Provinsi	31. Adanya peta sektoral pengembangan mata pencarian alternatif di Zona Prioritas PB Provinsi yang disepakati seluruh pemangku kepentingan
			32. Pelatihan Sektoral Keterampilan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif	32. Terselenggaranya pelatihan-pelatihan keterampilan oleh lembaga pelatihan masyarakat yang ada
			33. Pemberian modal dan insentif bergilir untuk pengembangan Mata Pencarian Alternatif	33. Terselenggaranya permodalan bergilir yang sehat tanpa kredit macet di masyarakat pengguna bantuan
			34. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keterampilan Untuk Mata Pencarian Alternatif Masyarakat Rentan secara sektoral di Zona Prioritas PB Provinsi	34. Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan mata pencarian alternatif
		14. Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Berdasarkan Peta Sektor Pengentasan Kemiskinan Di Zona Prioritas PB Provinsi	35. Pembangunan Jaringan Pemasaran Produk Mata Pencarian Alternatif Masyarakat Di Zona Prioritas PB Provinsi	35. Terjaminnya mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan di daerah rentan.
			36. Adaptasi teknologi pengembangan lanjut usaha masyarakat	36. tersedianya teknologi tepat guna
			37. Pengembangan usaha masyarakat dengan inovasi teknologi	37. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tepat guna
				Terjaminannya produk masyarakat laku di pasaran
			38. Penerapan sistem Anak Angkat pada perusahaan besar	38. Tersalurnya produk usaha masyarakat di perusahaan-perusahaan mapan
				Adanya produk masyarakat yang terpakai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar.
				Usaha masyarakat dipakai oleh perusahaan mapan untuk mensupply kebutuhan perusahaan besar.

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
7. Kebijakan Menerapkan prosedur-prosedur penilaian dampak risiko bencana terhadap proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	9. Pengintegrasian dokumen Analisis Risiko Bencana dengan dokumen lingkungan (AMDAL)	15. Penyusunan aturan dan pedoman analisis risiko bencana untuk proyek-proyek besar	39. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pedoman analisis risiko dampak bencana	39. Adanya sebuah Peraturan daerah yang mengatur analisis risiko dampak bencana
			40. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pedoman analisis risiko dampak bencana	40. Pemerintah daerah, swasta dan BUMN mengetahui dan memahami Pedoman penyusunan analisis risiko dampak bencana
		16. Pemantauan dan penilaian analisis risiko bencana	41. Pemantauan dan penilaian analisis risiko bencana	41. Setiap pembangunan proyek besar tingkat propinsi, harus mempunyai analisis risiko bencana
8. Kebijakan Menyusun Rencana Kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, mengadakan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	10. Menyusun rencana kontinjensi berdasarkan kajian risiko bencana daerah	17. Penyusunan Rencana Kontinjensi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi	42. Pembaruan Kajian Risiko Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	42. Adanya Rencana Kontinjensi dan POS untuk bencana lintas daerah.
			43. Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	43. Terbangunnya komunikasi antar kabupaten/kota di zona prioritas Dipenuhinya standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penyusunan rencana kontinjensi suatu bencana
		18. Pembangunan Mekanisme Penerapan Rencana Kontinjensi	44. Pembentukan Tim Gabungan kabupaten/kota - Provinsi untuk menyusun Rencana Kontinjensi	44. Adanya rencana kontinjensi di tingkatan kabupaten/kota.
			45. Sinkronisasi SOP Bencana dengan Rencana Kontinjensi Daerah	45. Operasi darurat dilakukan sesuai dengan Rencana kontinjensi yang telah disusun.
9. Kebijakan Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana selama masa tanggap darurat	11. Membangun mekanisme komunikasi untuk masa tanggap darurat terutama untuk kepentingan distribusi logistik	19. Pembangunan Sistem Distribusi Logistik untuk menjamin stabilitas harga pasar kebutuhan tanggap darurat provinsi	46. Penyusunan kontrak kerjasama antara pemerintah dengan produsen-produsen kebutuhan pokok darurat bencana	46. Terjaminnya kebutuhan darurat saat terjadi bencana dengan jumlah yang cukup.
			47. Pengadaan kebutuhan darurat bencana langsung ke produsen	47. Terjaminnya kebutuhan darurat saat terjadi bencana dengan harga yang wajar.
			48. Penerapan sanksi dan penghargaan atas komitmen produsen dalam penanganan darurat bencana	48. Meningkatnya jumlah produsen yang menandatangani kontrak kerjasama untuk penanganan darurat bencana
		20. Pembangunan fasilitas pendukung Sistem Distribusi Logistik di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	49. Pembangunan jalur distribusi logistik daerah dari produsen hingga masyarakat	49. Diterimanya barang bantuan dari produsen induk ke tangan masyarakat penerima manfaat.
			50. Pembangunan Pos KODAL Lapangan Kabupaten/Kota di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	50. Adanya bufferstok di setiap zona prioritas PB sesuai dengan rencana kontinjensi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis efektivitas kebijakan, diperoleh tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 50%. Pencapaian sasaran yang paling rendah (42%) yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan pencapaian sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan BPBD Prov. Sumbar sebesar 60% dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif sebesar 65%.
2. Tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berdasarkan indikator HFA masih rendah yaitu berada pada level 2-3. Kondisi paling rentan terutama pada ; Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas, Manajemen risiko dan penurunan kerentanan terutama untuk prosedur penilaian dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan produksi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai

penyediaan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hasil analisis efektivitas, disusun kebijakan dan program penanggulangan bencana untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu terdiri dari 9 kebijakan, 11 strategi dan 20 program penanggulangan bencana. Dari 20 program diuraikan menjadi 50 kegiatan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat koordinasi sesama pemerintahan (SKPD), dengan daerah Kabupaten/Kota, LSM dan swasta.
2. Komitmen politis kepala daerah sangat diperlukan untuk menjamin pengarusutamaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidlowi, Aisyah Hamid, Hj.** Urgensi Pembentukan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Dukungan Legislatif, Jakarta, Nopember 2008.
- Barnard,I. Chester,** 1992, Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses, Gramedia, Jakarta.
- BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international partners,** a joint report. West Sumatra and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss and Preliminary Needs Assessment, October 2009.
- , Rencana Aksi Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013, Desember 2010.
- , Kajian Risiko Bencana Tsunami; Panduan Penilaian Ketahanan Daerah, 2011.
- Cambel, JP,** Riset Dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Coastal Development Institute of Technology (CDIT) Japan,** Menyelamatkan Diri Dari Tunami, Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor, 2008.
- Diposaptono,Subandono.Budiman,** Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami, Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor, 2008.
- Dunn .W,** (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press.
- IDEA,** Meredam Risiko Bencana; Upaya Integrasi PRB Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Nindya Grafika, Yogyakarta, 2010.
- Irwanto, Ph.D,** Focused Group Discussion, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- KOGAMI.** Panduan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana Komunitas kota/kabupaten. 2009.

-----, Public-Private Partnership For Disaster Management Progm (Lesson Learn), 2010.

Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI). Kerangka Aksi Hyogo; Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. Desember 2007.

Natawidjaja, Danny Hilman, dkk, Studi Gempa Bumi Dan Tsunami Di Sumatra: Analisis Gerakan G30S (Gempa 30 September) Di Padang Dan Potensi Gempa Megathrust Mentawai Di Masa Datang, Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Badung, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014.

Sjafrizal, Prof, Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Baduose Media, 2008.

Soekanto, Soejono, 1989, Teori Sosiologi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

United Nation-International Strategy for Disaster Reduction, Perkataan Menjadi Tindakan : Panduan untuk Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo, 2007.

-----, Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risks and the Implementation of the Hyogo Framework for Action. 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008-2012

MISI	TUJUAN	SABARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN MEMBANGUN KESIAPSIAGAAN DAN INFRASTRUKTUR DI SELURUH LINI SECARA TERENCANA DAN TERPADU	1. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal	1. Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana Sumatera Barat	1. Menetapkan aturan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat	1. Pembentukan Aturan Perundangan Terkait PB di Tingkat Provinsi Sumatera Barat	1. Review Perda PB Provinsi Sumatera Barat 2. Inisiasi Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat 3. Penyusunan Peraturan Gubernur terkait perda PB 4. Sinkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda PB dan Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat
			2. Mempercepat Pembentukan Aturan Penanggulangan Bencana di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat	2. Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penyusunan perda PB Kota/Kabupaten 3. Pendampingan Kelompok Kerja dalam penyusunan aturan/perundangan terkait penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten	5. Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2007 dan Perda No. 5 tahun 2007 tentang PB 6. Pelatihan Fasilitator UU No.24 tahun 2007 dan Perda PB Sumatera Barat 7. Inisiasi Perda PB Kota/Kabupaten. 8. Inisiasi Perda BPBD Kab./Kota 9. Sinkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda PB dan Perda BPBD Kota/Kabupaten
			3. Mendirikan BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan Sumber Daya yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar	4. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM Lembaga BPBD 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPBD	10. Pemenuhan Kuantitas SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat 11. Pemenuhan Kualitas SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat 12. Pemenuhan Kebutuhan perlengkapan kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat 13. Pengadaan Peralatan dan fasilitas pendukung PB BPBD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar
			4. Mempercepat Pembangunan BPBD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan metode yang terstandarisasi	6. Penyusunan Modul dan Standarisasi BPBD Kota/Kabupaten 7. Replikasi modul dan standarisasi BPBD di Sumatera Barat	14. Design Sistem BPBD Kota/Kabupaten 15. Uji coba modul Sistem BPBD Kota/Kabupaten 16. Penyusunan Modul Pembangunan Sistem BPBD Kota/Kabupaten 17. Sosialisasi modul sistem BPBD 18. Percepatan pembentukan BPBD Kota/Kabupaten dengan pendekatan legal 19. Monitoring standar kualitas BPBD Kota/Kabupaten di Sumatera Barat

MISI		TUJUAN		STRATEGI		KEGIATAN	
1. MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN MEMBANGUN KESIAPSIAGAAN DAN INFRASTRUKTUR DI SELURUH LINI SECARA TERENCANA DAN TERPADU	1. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal	3. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya penanggulangan bencana yang melingkupi wilayah Sumatera Barat	5. Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber daya di Provinsi Sumatera Barat dalam PB	6. Membangun Jaringan kerja PB untuk optimalisasi mobilisasi sumber daya	8. Penyusunan Rencana dan Mekanisme PB Provinsi Sumatera Barat	10. Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat	20. Pembuatan Rencana
						21. Pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat	21. Pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat
						22. Pembuatan Rencana kontinjensi untuk bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat	22. Pembuatan Rencana kontinjensi untuk bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat
						23. Pembuatan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat (Peta gerakan tanah, landaan tsunami dan Peta gunung api)	23. Pembuatan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat (Peta gerakan tanah, landaan tsunami dan Peta gunung api)
						24. Pembuatan Prosedur Tetap penanganan bencana	24. Pembuatan Prosedur Tetap penanganan bencana
						25. Penyusunan Mekanisme Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat	25. Penyusunan Mekanisme Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
					9. Pembangunan kerjasama antar kepala daerah dalam upaya PB	26. Pembangunan komitmen antar kepala daerah dalam upaya PB di Sumatera Barat	26. Pembangunan komitmen antar kepala daerah dalam upaya PB di Sumatera Barat
						27. Pembentukan Jaringan Kerja antar BPBD di Kota/Kabupaten wilayah Sumatera Barat	27. Pembentukan Jaringan Kerja antar BPBD di Kota/Kabupaten wilayah Sumatera Barat
						28. Pembentukan Jaringan kerja bencana dengan sektor swasta	28. Pembentukan Jaringan kerja bencana dengan sektor swasta
					10. Pembangunan Jaringan kerja Internal Wilayah Sumatera Barat	29. Pembentukan Jaringan kerja bencana dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Barat	29. Pembentukan Jaringan kerja bencana dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Barat
						30. Mobilisasi Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat	30. Mobilisasi Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat
						31. Pembentukan Jaringan Kerja PB Nasional untuk wilayah Sumatera Barat	31. Pembentukan Jaringan Kerja PB Nasional untuk wilayah Sumatera Barat
					11. Pembangunan Jaringan kerja Provinsi dengan Nasional dalam PB	32. Penyusunan Grand Design Sistem Peringatan Dini bencana yang melingkupi wilayah Sumatera Barat	32. Penyusunan Grand Design Sistem Peringatan Dini bencana yang melingkupi wilayah Sumatera Barat
						33. Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat	33. Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat
						34. Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah rawan banjir Provinsi Sumatera Barat	34. Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah rawan banjir Provinsi Sumatera Barat
					12. Pembangunan Sistem Peringatan dini bencana yang melingkupi wilayah Sumatera Barat	35. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam merespon peringatan dini	35. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam merespon peringatan dini
						36. Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber informasi dan peringatan dini bencana	36. Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber informasi dan peringatan dini bencana
					13. Pembangunan sistem peringatan dini bencana berdasarkan kearifan lokal daerah		

MIS	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KECIATAN
1 MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN MEMBANGUN KESIAPSIAGAAN DAN INFRASTRUKTUR DI SELURUH LUNI SECARA TERENCANA DAN TERPADU	2 Membangun Kesiapsiagaan Bencana secara Partisipatif	4 Tumbuhnya Budaya Siaga Bencana pada masyarakat	8 Membangun Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam PB	14 Peningkatan kapasitas Aparatur Daerah di Sumatera Barat tentang PB	37 Peningkatan kapasitas calon Kepala Daerah tentang PB di Sumatera Barat
					38 Peningkatan kapasitas PNS dalam kerangka upaya PB Provinsi
					39 Peningkatan kapasitas Aparatur dalam kerangka upaya PB Provinsi
				15 Penyusunan Standarisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB	40 Penyusunan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB
					41 Sosialisasi Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB
					42 Design Standar Sistem Komunitas Siaga Bencana di masyarakat
			9 Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan kemampuan penduduk dalam memobilisasi sumber daya	16 Penyusunan modul standarisasi sistem Komunitas siaga bencana di masyarakat	43 Uji coba modul Sistem standarisasi kesiapsiagaan di masyarakat
					44 Penyusunan Modul Pembangunan Komunitas penanggulangan bencana di masyarakat
					45 Sosialisasi modul sistem Kesiapsiagaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
			10 Membangun Kesiapsiagaan Sekolah dalam menghadapi bencana	17 Aplikasi modul dan standarisasi Sistem Kesiapsiagaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	46 Percepatan pembentukan Komunitas Siaga Bencana di masyarakat Sumatera Barat
					47 Monitoring standar kualitas komunitas siaga bencana masyarakat Sumatera Barat
				18 Penyusunan Kurikulum Siaga Bencana Sekolah	48 Penyusunan Pedoman dan Silabus Kurikulum Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada
					49 Percepatan Penyusunan Pedoman dan Silabus Kurikulum Muatan Lokal Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten

MISI	TUJUAN	ASASAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. MENGURANGI RISIKO BENCANA DENGAN MEMBANGUN KESIAPSIAGAAN DAN INFRASTRUKTUR DI SELURUH LINTAS SECARA TERENCANA DAN TERPADU	2. Membangun Kesiapsiagaan Bencana secara Partisipatif	4. Tumbuhnya Budaya Siaga Bencana pada masyarakat	10. Membangun Kesiapsiagaan Sekolah dalam menghadapi bencana	19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan kurikulum muatan lokal	50. Pengadaan buku pegangan pelajaran siaga bencana
				20. Pelaksanaan Pekan Budaya Siaga Bencana	51. Pengadaan alat peraga pendukung pelajaran siaga bencana
				21. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana	52. Pekan budaya siaga bencana
				22. Penciptaan peluang alternatif penghasilan bagi penduduk di daerah rawan bencana	53. Pembangunan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di daerah aman
	3. Mempersiapkan Infrastruktur Penanggulangan Bencana yang Tangguh	5. Peningkatan daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum	12. Menyusun Skenario Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah berbasis PB di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat	22. Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan wilayah berbasis PB	54. Monitoring keberhasilan diversifikasi mata pencaharian penduduk di daerah rentan
					55. Penyusunan Disain Umum Pengelolaan dan Pengembangan wilayah berbasis PB
					56. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi
					57. Pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan RTRK
					58. Integrasi Grand Design PB Sumatera Barat ke dalam Program Kerja Jaringan Nasional Mitigasi Bencana
					59. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi
					60. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana tsunami
					61. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah
					62. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana banjir
					63. Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung PB tingkat Sumatera Barat
	6. Penurunan kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana		14. Menerapkan Analisis Risiko Bencana pada rencana pembangunan	24. Penyusunan Pedoman Pembuatan Dokumen Analisis Risiko Bencana (ARB) Provinsi Sumatera Barat	64. Sinkronisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Nasional dengan Provinsi Sumatera Barat
					65. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KECIATAN
2 MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN PADA MASA KRISIS	4 Meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana	7 Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa meninggal	15 Mengaktifkan Petugas Tanggap Darurat dalam upaya Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana	25 Pengerahan Insur Search And Rescue (SAR) dalam tanggap darurat	66 Penetapan status bencana di BPBD Provinsi
			16 Pengerahan sumberdaya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis	26 Mobilisasi sumber daya provinsi untuk upaya penyelamatan pengungsi	67 Pengerahan Tim SAR ke Daerah bencana
			17 Menjamin distribusi logistik yang tepat sasaran	27 Pendataan bantuan logistik yang berasal dari daerah lain	68 Pengerahan dukungan logistik ke daerah bencana
			18 Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit	28 Pemerataan distribusi logistik disetiap lokasi relokasi	69 Pengerahan sumber daya luar provinsi dalam kondisi tertentu
			8 Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif	29 Pemulihan kesehatan fisik pengungsi	70 Pengerahan unit teknis untuk pemenuhan fasilitas kritis
				30 Pemulihan kesehatan mental pengungsi	71 Penjaminan akurasi pengumpulan data dan desiminasi data bencana kepada media
				31 Penyediaan pemerintahan lokal untuk memasuki masa pemulihan bencana	72 Pembangunan Pos Bantu Distribusi Logistik
			19 Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana	32 Penyediaan pengungsi dan masyarakat sekitar bencana untuk memasuki masa pemulihan bencana	73 Analisis Kebutuhan Logistik dalam kebutuhan Tanggap Darurat secara berkala
					74 Penjaminan kualitas dan kuantitas bantuan medis di lokasi relokasi
					75 Penjaminan keberfungsian Rumah Sakit/ klinik/puskesmas saat terjadi bencana
					76 Pelaksanaan traumatic healing di daerah relokasi
					77 Penyelenggaraan fungsi pemerintahan lokal dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadi bencana berskala provinsi
					78 Pengaktifan kembali aktivitas perekonomian masyarakat
					79 Penyusunan skenario partisipatif untuk fase pemulihan bencana

MISI		TUGAS		PROGRAM		KEGIATAN	
3 MEMULIHKAN DAMPAK BENCANA SECARA FISIK DAN PSIKOLOGIS	5 Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana	9 Tersedianya standar kesejahteraan minimum penduduk korban bencana	20 Memulihkan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana	33 Pemulihan sumber pangan penduduk di daerah korban bencana	80 Percepatan pemulihan sumber pangan masyarakat		
				34 Rehabilitasi perumahan masyarakat dalam skala prioritas	81 Analisis prioritas pemulihan perumahan penduduk		
					82 Pemberian bantuan langsung kepada prioritas utama pemulihan perumahan		
					83 Pemberian bantuan stimulan kepada prioritas non-utama pemulihan perumahan		
				21 Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk	35 Pemulihan sumber penghasilan masyarakat dalam proses perekonomian penduduk	84 Pemberian dana pinjaman lunak kepada pelaku ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktivitas perekonomian	
						85 Penyelenggaraan fungsi pasar sebagai pusat perekonomian	
						86 Monitoring keberhasilan dalam pemberian pinjaman	
				36 Rehabilitasi pasar sebagai pendukung perekonomian masyarakat		87 Percepatan pemulihan prasarana pasar	
				37 Pemberdayaan persatuan pedagang rantau dalam upaya pemulihan perekonomian		88 Pemfasilitasian persatuan pedagang rantau dalam pemulihan aktivitas pasar	
				10 Pulihnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum	22 Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum	38 Perbaikan fasilitas dan utilitas pelayanan umum akibat bencana dalam kewenangan provinsi	89 Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan lingkungan kewenangan provinsi
						90 Rehabilitasi utilitas umum kewenangan provinsi	
				23 Membesdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas umum	39 Pendampingan pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum akibat bencana yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten	91 Pembuatan norma, standar, prosedur dan mekanisme (NSPM) pembangunan dan rehabilitasi fasilitas yang ramah bencana	
						92 Pendampingan pembangunan dan rehabilitasi kerusakan fasilitas dan utilitas umum di Kota/Kabupaten (Klinik Konstruksi)	

Sumber : Bappeda Propinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN 2

Temuan Penanggulangan Bencana Gempabumi tanggal 30
September 2009 dan Gempabumi dan Tsunami tanggal 30
Oktober 2010

**Temuan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Pada Bencana
Gempabumi 30 September 2009**

Fase Prabencana			
Fase Pencegahan dan Mitigasi	Fase Kesiapsiagaan	Fase Tanggap Darurat	Fase Pemulihan
1. Banyaknya korban jiwa akibat robohnya bangunan pada zona amplifikasi gempa tinggi	1. Adanya bencana susulan beberapa saat setelah gempa yaitu longsor yang banyak menimbulkan kerugian	1. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi pemerintah dalam pengelolaan penanganan krisis masih belum jelas. Hal ini terlihat dari Posko Penanganan Darurat pada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan yang baru terbentuk pada hari ke dua (H+2) setelah kejadian gempabumi	1. Pemulihan Awal di mulai dengan HRNA (Human Recovery Need Assessment) yang bekerjasama dengan LSM local (KOGAMI) melalui sekitar 120 enumerator lapangan dari Unand untuk menilai pemulihan awal yang dirasakan dan kebutuhan rekonstruksi masyarakat di enam daerah terparah di Sumbar.
2. 80% kerugian dan kerusakan terjadi pada sector infrastruktur	2. Dilakukannya proses evakuasi ketempat tinggi oleh masyarakat di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat	2. Posko masih dikendalikan oleh Badan Kesbangpolinmas pada masing-masing daerah karena belum terbentuknya BPBD di masing-masing kabupaten	
3. Lebih dari 88% kerugian dan kerusakan pada keemilika swasta	3. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak	3. Manajemen Posko baru tertata dengan baik baru pada 2 hari setelah berdirinya Posko setelah diberikan bantuan pengelolaan dari KOGAMI dan beberapa lembaga bantuan lainnya	
4. Banyaknya gedung pemerintahan yang rusak di kabupaten/kota sehingga melumpuhkan kegiatan pemerintahan	4. Sistem Siaga Daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan radio internet dan sirine, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi	4. Ketidakjelasan tugas pada aktor penanganan bencana di pemerintahan juga terlihat pada fungsi komando yang langsung berada pada pimpinan daerah, dalam hal ini bupati. Tanpa keputusan	

	ini dapat dilihat dari tidak siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebarkan kepada masyarakat	bupati, tidak ada satupun aktor yang mampu mengambil keputusan cepat. Oleh karenanya banyak sekali hal-hal krusial yang terlambat ditangani karena harus menunggu keputusan dari Bupati yang sangat sibuk	
5. Kerusakan pada infrastruktur perhubungan relative terbatas dan terkonsentrasi pada jalan dan jembatan dan kebanyakan jalan dapat dilalui setelah beberapa hari, meskipun kendaraan melaju lebih lambat.	5. Terjadinya kemacetan pada jalur evakuasi	5. Terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dari pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah kabupaten (korong dan nagari ke kecamatan atau ke kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan baik berupa kebutuhan dasar dan Tim SAR dari kabupaten ke lokasi yang membutuhkan	
6. Sejumlah masyarakat mengalami gangguan ketersediaan air selama beberapa minggu dan hampir sebulan masih belum pulih sepenuhnya		6. Terbatasnya kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari para korban bencana sehingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk – truk yang memuat bantuan korban bencana	

7. Kerusakan pada sector social relative lebih terbatas; sector pendidikan dan kesehatan masing-masing 40%, sector keagamaan dan fasilitas masyarakat rentan dan miskin. Kerusakan dinilai akibat struktur bangunan yang relative lemah tidak sesuai standar bangunan aman gempa		7. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis yang disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi yang sebenarnya dapat diperhitungkan dalam Dokumen Rencana Kontingensi	
8. Kerusakan pada sector produktif; perdagangan dan industry mengalami dampak terparah, terutama UKM di perkotaan Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman			

Sumber : BNPB, 2009

**Temuan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Pada Bencana
Gempabumi dan Tsunami 25 Oktober 2010.**

Fase Prabencana		Fase Tanggap Darurat	Fase Pemulihan
Fase Pencegahan dan Mitigasi	Fase Kesiapsiagaan		
1. Sampai dengan tanggal 22 November 2010, berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat, pasca kejadian bencana gempabumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan 509 jiwa meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka. Selain itu, kejadian bencana tersebut juga mengakibatkan 11.425 orang mengungsi yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Sikakap	1. Tidak adanya peringatan dini (sirine) yang berbunyi ketika gempa. Informasi mengenai Tsunami baru diperoleh BMKG 4 menit 46 detik setelah gempa dari alat pendeteksi tsunami melalui pemerintah Jerman. Namun, masyarakat di pesisir tidak memperoleh informasi karena terbatasnya sarana.	1. Hingga tanggal 8 November 2010, penyaluran bantuan ke berbagai lokasi yang terkena dampak masih belum merata. Beratnya medan serta keadaan cuaca yang sering tidak mendukung menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan dan logistik kepada korban bencana. Selain karena beberapa dusun tidak bisa terjangkau akibat kerusakan dan tidak tersedianya sarana transportasi darat maupun transportasi laut yang memadai.	1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung konsep Relokasi Permukiman dari kawasan pesisir terdampak tsunami ke area yang lebih aman pada ketinggian ± 25 dpl, yang saat ini merupakan area kehutanan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penentuan lokasi baru bagi relokasi perumahan dan pembangunan prasarana lingkungan permukiman.
2. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif, dimana hampir 80% kerusakan dan kerugian terjadi pada sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan. Akibatnya sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan kehilangan pendapatan karena kerusakan pada		2. Masa tanggap darurat yang semula 2 minggu diperpanjang sampai 31 Desember 2010 oleh Keputusan Gubernur Sumbar	

lahan pertanian dan kegagalan panen serta kerusakan pada peralatan tangkap nelayan. Selanjutnya kerusakan dan kerugian yang di alami sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor sosial dan lintas sector			
--	--	--	--

Sumber : BNPB, 2010

LAMPIRAN 3

Dokumentasi FGD

- Undangan dan Kerangka Acuan Kerja FGD
 - Foto-foto pelaksanaan FGD
 - Laporan Hasil FGD

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

DISKUSI GRUP TERFOKUS

KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Latar Belakang

Gempa yang terjadi tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.6 pada Skala Richter mengguncang Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Kota Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21.6 triliun atau setara dengan US\$ 2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan banyak terjadi pada zona yang memiliki amplifikasi gempa yang tinggi. Kerusakan ini juga disebabkan oleh struktur bangunan yang relatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehingga akses transportasi pada wilayah tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan (*A joint report by the BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international partners, October 2009*).

Pada saat gempa terjadi, sistem siaga daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan radio internet dan sirine, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada masyarakat. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak. Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem dan saluran informasi peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dari pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah kabupaten (korong dan nagari ke kecamatan atau ke kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan. Terbatasnya kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari para korban bencana sehingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk – truk yang memuat bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis salah satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI, 2010).

Pada lain peristiwa, gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan,

Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit rumah, dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort pariwisata (BNPB, 2010).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal penanggulangan bencana sejak tahun 2008 telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012 (RPB Sumbar). RPB Sumbar ini terdiri dari 23 kebijakan untuk penanggulangan bencana pada fase pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Temuan kendala yang terjadi pada dua bencana berskala Provinsi dalam rentang implementasi RPB Sumbar – Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 dan Bencana Tsunami 25 Oktober 2010 – dapat dijadikan acuan dalam mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat.

Kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memberikan dasar yang kuat bagi proses penyusunan RPB Sumbar periode selanjutnya. Kajian efektivitas difokuskan kepada sejauh mana pencapaian sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan berhasil diraih. Sejalan dengan itu, kajian efektivitas juga dilaksanakan dengan melaksanakan uji silang setiap komponen kebijakan penanggulangan bencana yang telah ada dengan konsep ideal penanggulangan bencana yang telah termaktub dalam *Hyogo Framework for Actions* (HFA - Kerangka Aksi Hyogo; selanjutnya disebut KAH). Dari hasil kajian efektivitas kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi bagi kebijakan penanggulangan bencana ke depan untuk membangun ketahanan Provinsi Sumatera Barat dalam meredam risiko bencana yang ada.

Proses kajian efektivitas tersebut telah dilaksanakan dalam tatanan konseptual. Untuk menguji silang hasil kajian tersebut, dibutuhkan masukan dari para pakar/praktisi penanggulangan bencana dalam sebuah diskusi terfokus. Hasil diskusi ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan kajian yang tengah dilaksanakan.

Tujuan

1. Menetapkan tingkat efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan bencana pada RPB Sumbar
2. Memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana untuk penyusunan RPB Sumbar periode berikutnya.



**FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FORUM PRB)
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Kantor BPBD SUMBAR, Jl. Sudirman No. 47
Padang - Sumatera Barat

Padang, 12 September 2011

No : 07/Forum-PRB/SB/IX/2011
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan Diskusi Grup Terfokus (FGD)

Kepada Yth.

Bapak /Ibu _____

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya kajian "Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat", Forum PRB Sumbar akan memfasilitasi dilaksanakan kegiatan Diskusi Grup Terfokus (FGD) untuk keperluan tersebut. FGD ini dimaksudkan untuk menghimpun pendapat para pemangku kebijakan dalam meninjau tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012. Tinjauan efektivitas dilakukan dengan melihat pembelajaran pada bencana gempabumi 30 September 2009 dan Bencana Tsunami 25 Oktober 2010 serta indikator HFA. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode selanjutnya.

Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Diskusi Grup Terfokus (FGD) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : **Senin/19 September 2011**
Waktu : **09.00 – 15.00**
Tempat : **Sekretariat Forum PRB, (Kantor BPBD) Propinsi Sumatera Barat, Lantai 3, Jl. Sudirman No. 47 Padang**

Demikianlah undangan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pengurus Forum PRB Sumbar


Zaihal MS
Ketua

Output

1. Verifikasi temuan kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat;
2. Korelasi temuan kendala yang telah diverifikasi dengan sasaran penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;
3. Tingkat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketercapaian sasaran penanggulangan bencana;
4. Korelasi indikator KAH dengan kebijakan penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;
5. Daftar rekomendasi bagi penyempurnaan RPB Sumbar periode berikutnya.

Narasumber/Fasilitator

1. BPBD/Forum PRB Propinsi Sumatera Barat
2. Mardayeli Danhas
3. Revanche Jefrizal

Tempat, waktu dan agenda Kegiatan

Diskusi terfokus ini dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 19 September 2011 di Sekretariat Forum PRB (BPBD Propinsi Sumatera Barat) Agenda diskusi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Agenda Diskusi Terfokus Kajian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat

WAKTU	AGENDA KEGIATAN	PJ/NARSUM
9:00 - 9:30	☐ Pembukaan Kata Sambutan	BPBD/Forum PRB
9:30 - 12:00	Pengantar Diskusi ☐ Sesi I : Verifikasi dan Korelasi Korelasi Sasaran PB vs Temuan Kendala Korelasi Kebijakan PB dengan indikator HFA	Fasilitator Fasilitator
12:00 - 13:30	☐ Ishoma	Fasilitator
13:30 - 15:30	☐ Sesi II : Kajian dan Rekomendasi Tingkat efektivitas kebijakan PB Sumbar Rekomendasi Tindak Lanjut	

Peserta

Peserta diskusi diharapkan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Peserta Diskusi

NO	NAMA	INSTITUSI
1.	Indra Bakti	BPBD Provinsi Sumatera Barat
2.	Ranti Komala	Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3.	Dedi Henidal	Kalak BPBD Kota Padang
4.	Asrizal	Kalak BPBD Kota Pariaman Kabid Pencegahan BPBD Kab. Padang Pariaman
5.	Naylus	Kalak BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Nashariadi	PSB Unand
7.	Abdul Hakam	Forum PRB Sumbar/Walhi
8.	Khalid Syaifullah	Forum PRB Sumbar/KOGAMI
9.	Patra Rina Dewi	Mercycorps Indonesia
10.	Willy Wicaksono	PMI Sumatera Barat
11.	Febri Azarsyah	Lembaga Nurani Perempuan
12.	Yefri Heriani	LP2M
13.	Fitri Yenti	Dunia Usaha
14.	Librina A Sabri	Bapedalda
15.	Yuli	UNP
16.	Ahmad Fauzi	UNDP
17.	Lora	Forum PRB
18.	Lany Verayanti	

Padang, 6 September 2011.

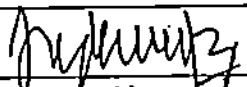
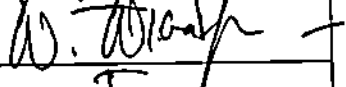
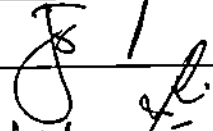
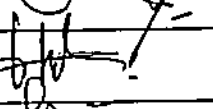
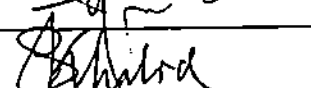
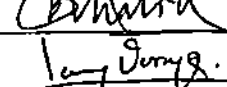
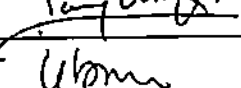
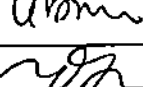
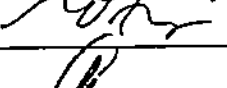
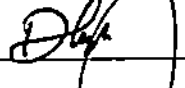
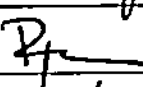
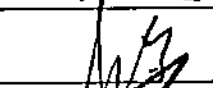
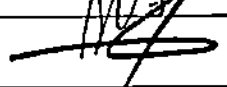
Hormat kami
Pengurus Forum

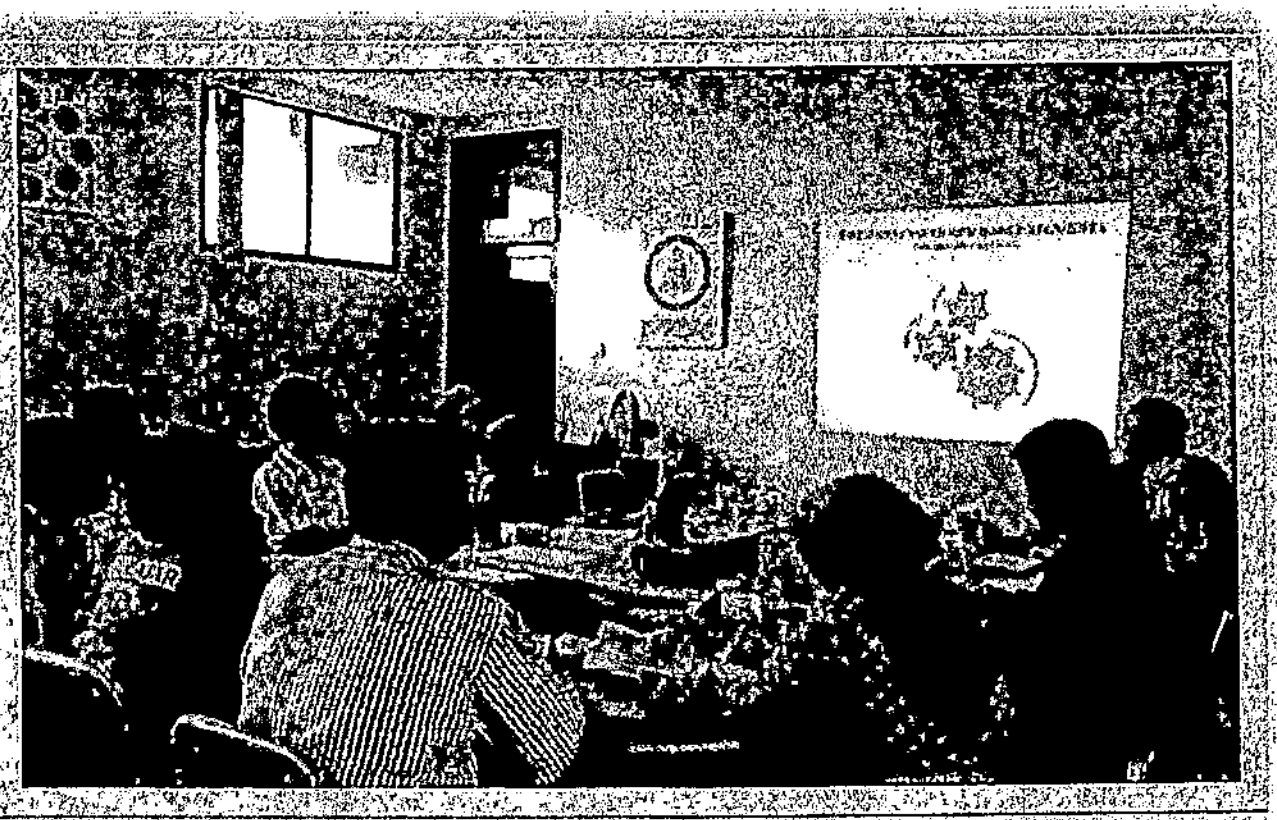


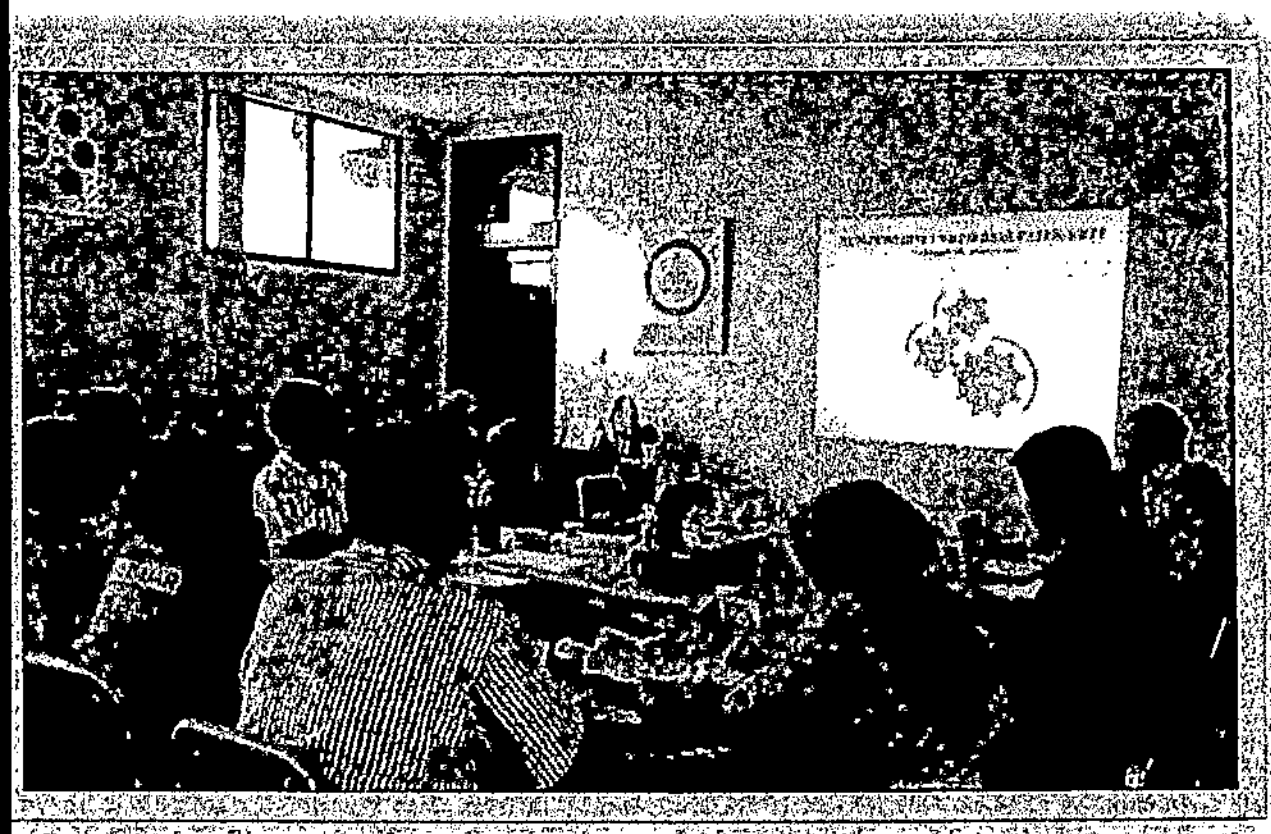
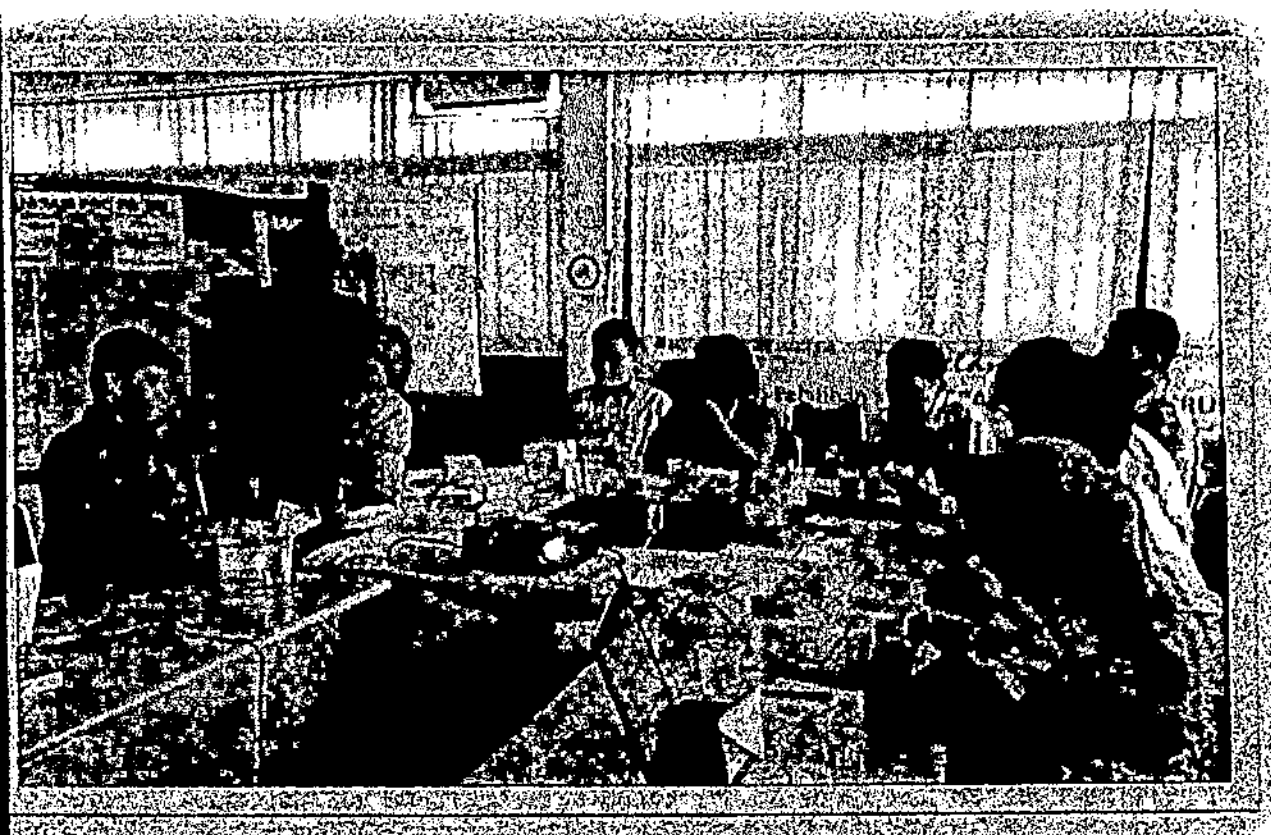
Inal MS

Ketua

DAFTAR HADIR
DISKUSI GRUP TERFOKUS FORUM PRB
"Afektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Pripinsi Sumatra Barat"
Senin, 19 September 2011

NO	NAMA	LEMBAGA	T.TANGAN
1	INDRA BAKTI	BPPD Sumbar	
2	Willy Wicaksono	Mercy Corps	
3	TOMMY S	KOGAMI	
4	Revanche Daffa	FASILITATOR	
5	ELFA TENI	PPTV SCDP	
6	Sri Mayanti	Forum PRB	
7	Wahyuli	Mercy Corps	
8	Khalid Darfullah	Deputi Kepala Wakil Sumbar / F.PRB	
9	Lany Verayanti	FIELD-Buti Ceria - FORUM PRB Sumbar	
10	LIBRINA	Forum Suasta	
11	Yefri Heriani	Nurani Dt WCC	
12	Arizal	BPPD Kota Pekanbaru	
13	DIRMAYANTO		
14	Paully - H	BPPD Pening Uleh	
15	Mardayel Dhuha	UNAND	
16	Eulait	Resaver	
17	WAILUG	BPPD P. P. P. P.	
18	IKRIADI H.	BPPD. Pd Pmm	

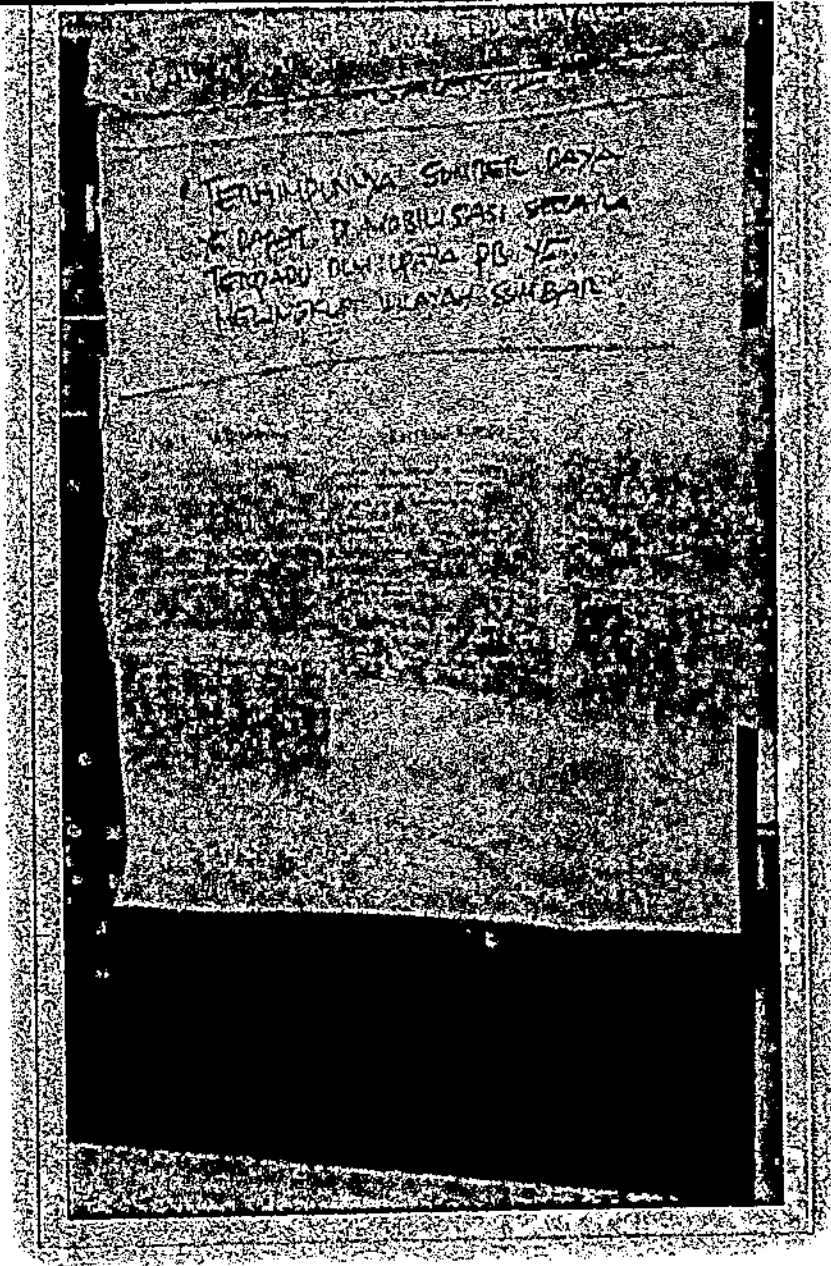
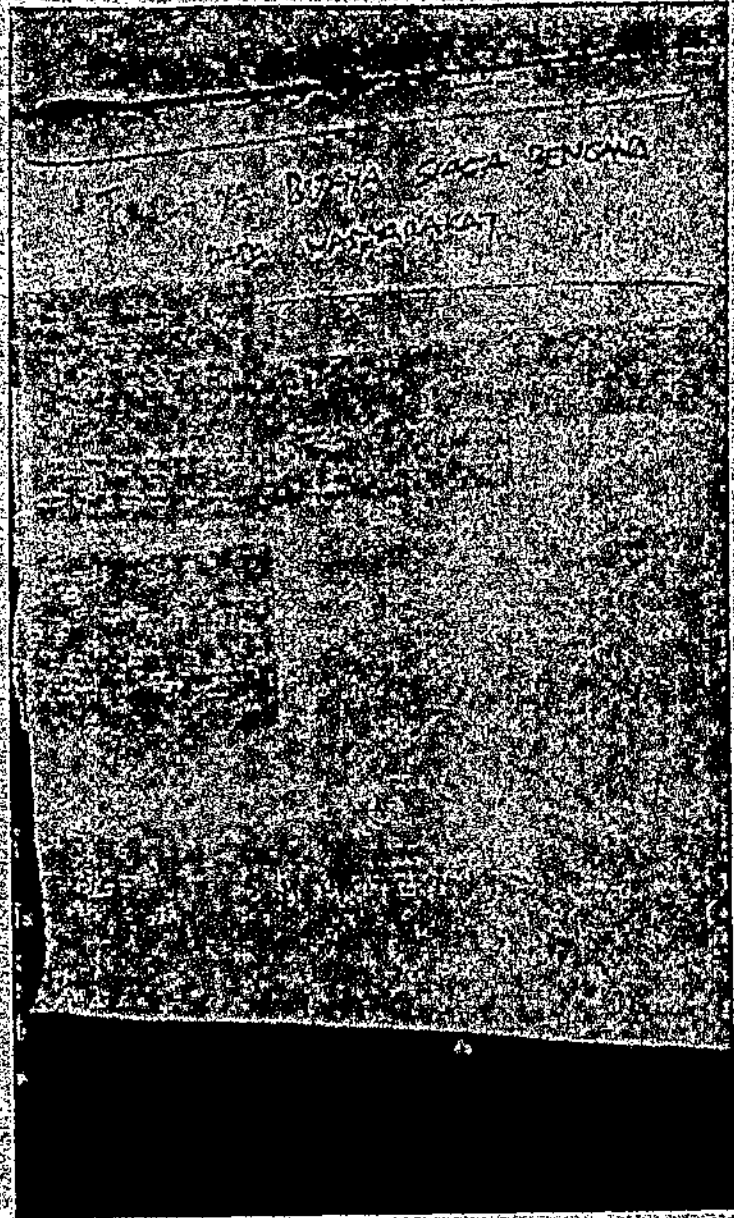




KELENTIKAN BPED. PROKINS
SUKATELA BALAT

SAGARAH

KELENTIKAN KUDAN PER-
INDA DAN KEKAWI BAGA
KELENTIKAN PERA GULALI
KUDAN SUKATELA BALAT

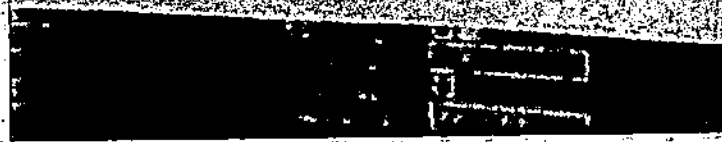


PERMINTAAN KANTOR
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

PERMINTAAN KANTOR
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

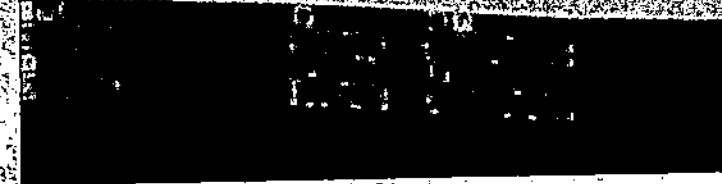
SASARAN III

TERSEDANYA TENAGA DEMUKHA
KURANG DARI 10%
PADA 12/12/1961



SASARAN VII

TERSEDANYA PERTOLONGAN CEPAT
DAN TEHT SASARAN DUA KORBAN
BENCANA UTE LENDURANGI JALAN
KORBAN DUA MENINGGAL



~~SASARAN IX~~
Ketersediaan daya dalam fasilitas
& utilitas pelayanan umum

~~SASARAN IX~~
Ketersediaan standar kesehatan
minimum penduduk kawasan perumahan

RUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Propinsi Sumatera Barat

LAPORAN FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD)

Kajian Efektivitas Rencana Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat 2008-2012

Daftar Isi

PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
TUJUAN.....	3
OUTPUT.....	3
METODE.....	4
WAKTU PELAKSANAAN.....	4
KENDALA DAN HAMBATAN.....	4
TEMUAN DAN HASIL.....	5
TEMUAN KENDALA.....	5
TINGKAT EFEKTIVITAS KEBUAKAN.....	11
TINDAK LANJUT.....	13
PENUTUP.....	14

Pendahuluan

Dalam pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, perlu disusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan menjadi dasar penyusunan RPJM dalam bidang bencana. Oleh karena itu, RPB disusun untuk jangka waktu lima tahunan. Penyusunan RPB dilakukan untuk seluruh bencana diseluruh tahapan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan setelah kejadian bencana) dan melingkupi seluruh bencana alam yang berpotensi di wilayah tersebut.

Tujuan utama penyusunan RPB ini adalah untuk mengurangi risiko bencana. Yang menjadi dasar penyusunan adalah kajian risiko bencana, pembelajaran pada sebelum, saat dan terjadi bencana serta prioritas penanggulangan bencana. Bencana yang terjadi dapat menjadi dasar evaluasi terhadap RPB untuk perbaikan sehingga lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana.

Latar Belakang

Gempa yang terjadi tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.6 pada Skala Richter mengguncang Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Kota Padang, Kota Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21.6 triliun atau setara dengan US\$ 2.3 milyar. Kerusakan rumah dan bangunan banyak terjadi pada zona yang memiliki amplifikasi gempa yang tinggi. Kerusakan ini juga disebabkan oleh struktur bangunan yang relatif lemah. Kerusakan juga banyak ditemukan pada jalan-jalan umum sehingga akses transportasi pada wilayah tertentu pasca gempa menjadi sulit dilakukan (*A joint report by the BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international partners, October 2009*).

Pada saat gempa terjadi, sistem siaga daerah walau telah dibantu oleh BMKG dengan radio internet dan sisdine, masih belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh

pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi atau tidak yang kemudian disebar kepada masyarakat. Kepanikan terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya informasi resmi dari pemerintah yang menyatakan kondisi potensi tsunami atau tidak. Kondisi ini disebabkan karena tidak mencukupinya sistem dan saluran informasi peringatan bencana yang mampu melingkupi kebutuhan seluruh masyarakat di daerah berisiko. Untuk masa pemulihan, terputusnya jalur informasi terkait data kerusakan dan korban dari pemerintahan terbawah ke pemerintah daerah kabupaten (korong dan nagari ke kecamatan atau ke kabupaten) menghambat upaya penghitungan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan. Terbatasnya kapasitas perangkat nagari dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan menyebabkan banyaknya ketidakmerataan pembagian bantuan kepada korban bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari para korban bencana sehingga pada beberapa tempat terjadi penjarahan truk – truk yang memuat bantuan korban bencana. Terputusnya distribusi dalam rentang penanganan masa krisis salah satunya disebabkan kerusakan prasarana dan sarana transportasi (KOGAMI, 2010).

Pada lain peristiwa, gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010, berkekuatan 7,2 SR telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap. Berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilakukan, jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit rumah, dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit rumah rusak sedang, dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort pariwisata (BNPB, 2010).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal penanggulangan bencana sejak tahun 2008 telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012 (RPB Sumbar). RPB Sumbar ini terdiri dari 23 kebijakan untuk penanggulangan bencana pada fase pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Temuan kendala yang terjadi pada dua bencana berskala Provinsi dalam rentang implementasi RPB Sumbar – Bencana Gempa Bumi 30

LAPORAN KEGIATAN

September 2009 dan Bencana Tsunami 25 Oktober 2010 - dapat dijadikan acuan dalam mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat.

Kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dibutuhkan untuk memberikan dasar yang kuat bagi proses penyusunan RPB Sumbar periode selanjutnya. Kajian efektivitas difokuskan kepada sejauh mana pencapaian sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan berhasil diraih. Sejalan dengan itu, kajian efektivitas juga dilaksanakan dengan melaksanakan uji silang setiap komponen kebijakan penanggulangan bencana yang telah ada dengan konsep ideal penanggulangan bencana yang telah termaktub dalam *Hyogo Framework for Actions* (HFA - Kerangka Aksi Hyogo; selanjutnya disebut KAH). Dari hasil kajian efektivitas kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi bagi kebijakan penanggulangan bencana ke depan untuk membangun ketahanan Provinsi Sumatera Barat dalam meredam risiko bencana yang ada.

Proses kajian efektivitas tersebut telah dilaksanakan dalam tatanan konseptual. Untuk menguji silang hasil kajian tersebut, dibutuhkan masukan dari para pakar/praktisi penanggulangan bencana dalam sebuah diskusi terfokus. Hasil diskusi ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempumakan kajian yang tengah dilaksanakan.

Tujuan

1. Menetapkan tingkat efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan bencana pada RPB Sumbar
2. Memberikan rekomendasi penyempumaan kebijakan penanggulangan bencana untuk penyusunan RPB Sumbar periode berikutnya.

Output

Output dari kegiatan ini adalah :

1. Verifikasi temuan kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat;
2. Korelasi temuan kendala yang telah diverifikasi dengan sasaran penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;
3. Tingkat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketercapaian sasaran penanggulangan bencana;
4. Korelasi indikator KAH dengan kebijakan penanggulangan bencana pada RPB Sumbar;
5. Daftar rekomendasi bagi penyempumaan RPB Sumbar periode berikutnya.

LAPORAN KEGIATAN

Metode

Metode yang dipakai untuk pencapaian tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Pemaparan
2. Diskusi terfokus

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada Tanggal 19 September 2011. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat Forum PRB, Kantor BPBD Propinsi Sumatera Barat mulai pukul 09.00 WIB.

Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan tidak ada.

Temuan dan Hasil

Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat dari pencapaian sasaran. Indikator pencapaian sasaran dilihat dari temuan kendala berdasarkan penanggulangan bencana gempa bumi 30 September 2009 dan bencana tsunami 25 Oktober 2010. Dalam RPB Prop. Sumbar terdapat 10 sasaran yang dicapai dengan 23 kebijakan dan 39 program. Sasaran RPB Prop. Sumbar yaitu sebagai berikut :

1. Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan PB Sumbar
2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sumbar.
3. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar
4. Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.
5. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum
6. Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana
7. Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal
8. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif
9. Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana
10. Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Uraian kebijakan dan program per masing-masing sasaran dapat dilihat pada lampiran 1.

Temuan Kendala

Temun kendala diidentifikasi berdasarkan masing-masing sasaran dan dapat dijadikan pembelajaran terhadap perbaikan kebijakan dan program pada RPB Prop. Sumbar.

LAPORAN KEGIATAN

Pembelajaran dan temuan kendala yang diperoleh dari pemaparan dan diskusi bersama narasumber dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Temuan Kendala pada masing-masing sasaran Penanggulangan Bencana Prop. Sumbar

SASARAN	IDENTIFIKASI TEMUAN KENDALA
Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana Sumatera Barat	1. Pemda Propinsi belum mempunyai kapasitas yang dibutuhkan (SDM) untuk menyusun aturan dan melaksanakannya
	2. Belum mengatur secara tegas hubungan dan kewajiban SKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam PB di bawah koordinasi BPBD
	3. Masih kurangnya koordinasi antar sektor pemegang kewenangan dalam PB, bagi penyelenggara juga merasa masih baru dan butuh pendalaman dalam peran sebagai PB. Untuk lebih diefektifkan dengan pejabat di pemerintahan yang mempunyai background PB dan tidak mudah dimutasikan.
	4. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang eringatan dini terutama daerah terpencil
	5. Perda belum dipahami sehingga gagap dalam mengaplikasikannya
	6. Aturan tidak tersosialisasi dan tidak dipahami oleh pelaksanan
	7. Pelaksanaan belum efektif karena masih merupakan hal yang baru
	8. Tidak semua instansi (SKPD) masuk ke dalam struktur (unsur pengarah) seperti Dinas Pendidikan
Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sumbar.	1. Rotasi jabatan di pemerintahan mengakibatkan SDM di BPBD tidak memadai dan kompeten
	2. Belum diisinya unsur pengarah dalam struktur BPBD
	3. Masih lemahnya kapasitas SDM di BPBD dalam PB

LAPORAN KEGIATAN

	4.	Personil di BPBD belum memenuhi kualifikasi dalam merespon bencana
	5.	Kualitas SDM yang belum memadai
	6.	Kuantitas personil BPBD tidak diimbangi dengan kualitas
	7.	Penempatan SDM belum sesuai dengan keahlian
	8.	BPBD masih menjadi "Tong Sampah"
	9.	Standar BPBD dari nasional tidak dilaksanakan di daerah (Perka No. 3 thn 2008)
	10.	Latar belakang personil belum tepat atau tidak sesuai keahlian dan tingkat pendidikan
	1.	Belum adanya identifikasi sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam PB sehingga menghambat koordinasi aksi tanggap darurat
	2.	Belum adanya rencana kontijesi
	3.	Belum adanya sumber daya yang dapat dimobilisasi
Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar	4.	Program yang dilaksanakan belum tuntas (tidak optimal)
	5.	Penyusunan rencana tidak diaplikasikan
	6.	Koordinasi dan ego sektoral masih tinggi sehingga belum adanya kerjasama antara satu sama lain dalam mobilisasi sumber daya
	7.	BPBD sebagai koordinator PB belum diakui atau dikenali oleh masyarakat atau SKPD lainnya
	8.	Sulitnya koordinasi karena beda potensi bencana daerah (kab/kota)
	9.	Pendistribusian bantuan yang terpusat ke Propinsi karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas
	10.	Sistem peringatan dini masih mengabaikan keraifan lokal
	11.	Identifikasi dan pengembangan kultur terkait EWS (Early Warning System) belum dilakukan (ex; tsunami mentawai)
	12.	Rendahnya komitmen legislatif dalam mendukung sumber daya yang dibutuhkan

LAPORAN KEGIATAN

	13.	Penyusunan EWS harus sesuai kondisi geografis setempat.
Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.	1.	Belum menjadi arus utama di SKPD terkait membangun ekonomi alternatif di daerah rawan bencana
	2.	Budaya siaga bencana meningkat sesuai dengan musimnya (da sebaliknya)
	3.	Budaya siaga bencana perlu ditingkatkan dan dikembangkan di tingkat aparaturnya pemerintah, justru masyarakat dan komunitas sekolah terkadang lebih siap
	4.	Aplikasi program tidak tepat sasaran
	5.	Sosialisasi masih rendah dan tingkat pemahaman tentang waspada bencana masih kurang
	6.	Belum adanya standarisasi budaya siaga bencana di sekolah dan komunitas masyarakat
	7.	Harus ada modul standarisasi di masing-masing daerah
	8.	Standar SOP bagi masyarakat dan daerah dibuat dan disesuaikan dengan daerah kab/kota
	9.	Kurikulum siaga bencana di sekolah mandeg, berhenti di sekolah pilot saja
Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum	1.	RTRW belum mempunyai perspektif PB/PRB
	2.	Belum adanya RTRW setiap wilayah (Kab/Kota)
	3.	Penataan ruang belum terlaksana sesuai kaidah daerah rawan bencana termasuk peraturan tentang konstruksi
	4.	Rencana pembangunan yang terlalu lama dibahas
	5.	Rencana pembangunan tidak memperhitungkan PRB
	6.	Adanya keterbatasan anggaran, kapasitas SDM
	7.	Jalur evakuasi belum cukup karena keterbatasan anggaran

LAPORAN KEGIATAN

	8.	Tidak adanya sarana komunikasi yang dapat digunakan saat terjadi bencana untuk peringatan dini
	9.	Jalur infrastruktur jalan dan telekomunikasi pada daerah terpencil (rawan bencana) masih kurang
	10.	Belum adanya kesatuan visi antara SKPD terkait
Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana	1.	Adanya pembangunan perumahan untuk nelayan di daerah zona merah dengan sistem sanitasi yang justru menimbulkan bencana
	2.	Pembangunan Rusunawa yang tanpa memperhatikan AMDAL
	3.	Implementasi Rehab-Rekon tanpa analisa penurunan risiko bencana
	4.	Keterbatasan kemampuan daerah dan kelangsungan dari rencana PB
	5.	Adanya pendapat SKPD lain di Kab/Kota bahwa PB hanya menjadi tanggung jawab BPBD
	6.	Tidak adanya dasar hukum yang mengikat untuk melaksanakan ARB
	7.	Belum tentu program ARB dapat menurunkan kerentanan lingkungan
	8.	Belum adanya pelaksanaan ARB dan adanya keterbatasan dana
Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal	1.	Data sebaran penduduk yang tidak up to date sehingga kesulitan dalam pendistribusian logistik
	2.	Data penduduk yang tidak jelas
	3.	Belum adanya data terpilah
	4.	Distribusi logistik yang tidak tepat sasaran sehingga rentan penjarahan
	5.	Belum tersebarnya logistik (Gudang logistik tidak memadai)
	6.	Peralatan yang belum memadai
	7.	Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang memadai
	8.	Belum memenuhinya tenaga medis untuk pemulihan kesehatan

LAPORAN KEGIATAN

	9.	Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pertolongan pertama bagi lingkungan sekitarnya
	10.	Kurangnya tingkat ketahanan masyarakat
Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif	1.	Daerah relokasi yang disiapkan tanpa menyiapkan alternatif mata pencarian untuk masyarakat
	2.	Belum siapnya pemerintah untuk pemindahan penduduk/relokasi tempat tinggal masyarakat
	3.	Lebih didominasi oleh NGO dan INGO dalam hal pemulihan kawasan bencana
	4.	Renaksi RR tidak/ belum partisipatif
	5.	Koordinasi di tingkat para aktor (SKPD, NGO, swasta, dll) tidak berjalan sehingga rencana yang disusun tidak bisa diimplementasikan
	6.	Perlu dilaksanakan dengan kombinasi partisipatif + top down
Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana	1.	Masyarakat rantau belum dapat dimobilisasi dan adanya ketidaklaksanaan pemerintah dalam rehab-rekon sarana-prasarana fisik
	2.	Tidak adanya kerjasama antar SKPD terkait pelaksanaan program
	3.	Lemahnya pengawasan pemulihan perumahan
	4.	Sangat lambat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat
	5.	Perbankan masih setengah hati dalam membantu perekonomian masyarakat
	6.	Pemulihan lingkungan fisik yang lambat sehingga melemahkan motivasi untuk bangkit dan memenuhi kebutuhan hidup.
	7.	Pemulihan belum didasari keadaan pertimbangan penghidupan masyarakat ke depan
	8.	Pemerintah tidak mengakomodir permintaan korban bencana terkait pembangunan sentra ekonomi

LAPORAN KEGIATAN

	9.	Rehabilitasi infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat bermasalah
	10.	Masyarakat terlalu mengharapkan bantuan
	11.	Peningkatan SDM masyarakat
Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.	1.	Banyak penyelewengan proyek
	2.	Pemulihan fasilitas belum memadai dengan dana
	3.	Penanganan bencana di Kab/Kota dilakukan oleh Kab/Kota sendiri (prinsip yang berjalan saat ini)
	4.	Fasilitas yang sudah dibangun tidak dipelihara
	5.	Perbaikan jalan dan jembatan dengan sistem tambal sulam menimbulkan bencana turunan
	6.	Pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum hanya sebatas proyek sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan masyarakat
	7.	Fasilitas dan utilitas pelayanan umum masih berorientasi proyek
	8.	Pemulihan fasilitas umum belum berorientasi PRB
	9.	Renaksi pemerintah pusat sangat lambat terealisasi
	10.	Belum tersedianya pembiayaan yang memadai

Tingkat Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan temuan kendala di atas, ditetapkan secara bersama tingkat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran, dengan kriteria sebagai berikut :

1. 0 - 25%
2. >25 - 50%
3. >50 - 75%
4. >75 - 100%

Dengan merata-ratakan tingkat pencapaian pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Pencapaian Sasaran

Sasaran		Tingkat Pencapaian
1.	Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan PB Sumbar	52%
2.	Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sumbar.	60%
3.	Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya PB yang melingkupi wilayah Sumbar	42%
4.	Tumbuhnya budaya Siaga Bencana pada masyarakat.	42%
5.	Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum	42%
6.	Penurunan Kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana	42%
7.	Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal	50%
8.	Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif	65%
9.	Tersedianya Standar Kesejahteraan Minimum Penduduk Korban Bencana	54%
10.	Pulihnya Daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.	50%
Rata-rata Pencapaian Sasaran RPB		50%

Dari hasil penilaian tingkat efektivitas di atas, diperoleh bahwa sasaran 3,4,5, dan 6 tingkat pencapaian sasarnya sangat rendah (42%) yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum dan penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan sasaran 2 dan 8 memiliki tingkat pencapaian sasaran yang cukup baik yaitu mengenai pembentukan BPBD Propinsi Sumatera Barat dan perencanaan pemulihan secara partisipatif.

Tindak Lanjut

Dari hasil FGD ini, akan ditindak lanjuti dengan melanjutkan kajian efektivitas kebijakan penanggulangan bencana di Propinsi Sumatera Barat dengan menjadikan hasil ini sebagai dasar kaian. Dari dasar kajian efektivitas dilengkapi dengan analisis tingkat ketahanan daerah berdasarkan 22 indikator HFA (Hyogo Framework for Action) atau Kerangka Aksi Hyogo. Berdasarkan dua kajian tersebut, akan disusun alternatif kebijakan penanggulangan bencana Propinsi Sumatera Barat.

Penutup

Peningkatan efektifitas kebijakan penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan beberapa tindak lanjut yang disebutkan di atas. Peran Forum PRB sangat besar dan penting dalam meningkatkan efektifitas kebijakan PB Propinsi Sumatera Barat. Untuk itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas dan keterlibatan Forum PRB dalam kegiatan-kegiatan PB yang dilakukan di Propinsi Sumatera Barat.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu dokumentasi kegiatan kajian efektifitas kebijakan penanggulangan bencana Prop. Sumbar dan semoga dapat menjadi masukan bagi Propinsi Sumbar dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

LAMPIRAN 4

Kriteria indeks indikator HFA

PRIORITAS I : MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI PELAKSANAANNYA			
INDIKATOR I : KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN NASIONAL/LOKAL UNTUK PRB TELAH ADA DENGAN TANGGUNGJAWAB EKSPLISIT DITETAPKAN UNTUK SEMUA JENJANG PEMERINTAHAN			
TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Kebijakan/Peraturan nasional/daerah telah ditujukan untuk mengarusutamakan pelaksanaan PRB berbasis komunitas pada setiap tingkatan pemerintahan oleh seluruh pemangku kepentingan, aturan tersebut telah disinkronisasi dengan aturan lain yang terkait baik pada konteks lokal, regional, nasional maupun internasional dan telah pula diintegrasikan dalam strategi pelaksanaan PRB secara tertulis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kerja secara terukur dan terstruktur, aturan tersebut telah ditegakkan secara hukum dan dimengerti oleh komunitas	UU terkait PRB, Peraturan daerah terkait PRB
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Strategi aksi pengurangan risiko bencana telah ada dan Kebijakan tertulis/peraturan nasional/daerah telah disinkronisasi terhadap peraturan terkait lainnya (building code, pengelolaan LH dsb), kebijakan tersebut juga telah mewajibkan pengarusutamaan PRB pada setiap tingkatan pemangku kepentingan yang dilaksanakan dengan basis komunitas walau belum ditunjang dengan penegakan hukum yang baik dan keterbatasan sumberdaya dalam	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Kebijakan tertulis/peraturan nasional/daerah telah disusun dan pelaksanaan PRB telah menjadi agenda kerja oleh sebagian besar pemangku kepentingan dari setiap tingkatan, walau implementasi masih terpisah-pisah dan belum berbasis komunitas serta belum	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Kebijakan tertulis/Peraturan nasional/daerah belum disusun, tetapi upaya untuk PRB telah mulai dilaksanakan oleh daerah/sekelompok orang dengan	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum ada kebijakan tertulis/peraturan nasional/daerah yang berikhtisar khusus tentang PRB, kebijakan yang ada biasanya menyangkut penanganan darurat bencana dan bersifat sementara	

PRIORITAS I : MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI PELAKSANAANNYA			
INDIKATOR II : TERSEDIAANYA SUMBERDAYA YANG DIALOKASIKAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEMUA TINGKAT PEMERINTAHAN			
TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Tercukupinya kebutuhan manusia dan sarana fisik yang terkait dengan pengurangan risiko bencana baik secara kualitas maupun kuantitas serta tersedianya alokasi anggaran untuk aktivitas pengurangan risiko bencana dan anggaran darurat nasional/lokal dalam APBN/APBD secara mandiri menggunakan sumber pendanaan nasional/lokal dengan menerapkan mekanisme audit dan keterbukaan informasi secara memadai	APBN/APBD; SOTK
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Secara kuantitas kebutuhan manusia dan sarana fisik yang terkait dengan pengurangan risiko bencana telah tercukupi, serta telah tersedianya alokasi anggaran untuk aktivitas pengurangan risiko bencana dan anggaran darurat nasional/lokal dalam APBN/APBD dengan dana pendamping dari lembaga bilateral/multilateral yang menerapkan mekanisme audit dan keterbukaan informasi secara memadai	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Adanya lembaga khusus yang menangani pengurangan risiko bencana dengan anggaran khusus dalam pemerintahan yang menjamin keberadaan sumberdaya fisik dan manusia, walau terbatas pada komponen kesiapsiagaan dan penanganan darurat dan masih membutuhkan pendamping sumberdaya dari lembaga bilateral/multilateral	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Pemenuhan pendanaan pengurangan risiko bencana mulai diserasi oleh investasi nasional/lokal walau dengan presentase yang jauh lebih kecil dibanding bantuan luar, pemenuhan sumberdaya manusia mulai dilihat sebagai kebutuhan prioritas	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Pemenuhan sumber daya untuk pengurangan risiko bencana masih amat bergantung pada inisiatif dan bantuan lembaga/donor luar, sumber daya hanya disediakan untuk keadaan darurat bencana dengan jumlah yang belum memadai	

PRIORITAS I : MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI PELAKSANAANNYA

INDIKATOR III : TERJALINNYA PARTISIPASI KOMUNITAS DAN DESENTRALISASI MELALUI PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN SUMBER DAYA PADA TINGKAT LOKAL

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terwujudnya jalinan pembagian kewenangan dan sumber daya dengan kebijakan-kebijakan yang relevan serta pembagian peran dan tanggung jawab yang sistematis antara pemerintahan lokal dengan komunitas lokal yang disertai partisipasi aktif seluruh sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku kepentingan dalam aktivitas pengurangan risiko bencana yang sudah dipublikasikan secara transparan oleh media-media lokal yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat	Mekanisme Desentralisasi
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diaku ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Terwujudnya jalinan pembagian kewenangan dan sumber daya dengan kebijakan-kebijakan yang relevan serta pembagian peran dan tanggung jawab yang sistematis antara pemerintahan lokal dengan komunitas lokal yang disertai partisipasi aktif seluruh sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku kepentingan dalam aktivitas pengurangan risiko bencana walau belum terpublikasi oleh media lokal sehingga belum diterima dengan baik oleh masyarakat yang berperan sebagai kontrol dari kualitas kerja	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Terwujudnya jalinan pembagian kewenangan dan sumber daya dengan kebijakan-kebijakan yang relevan serta pembagian peran dan tanggung jawab yang sistematis antara pemerintahan lokal dengan komunitas lokal walau belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan mengadopsi partisipasi dan aktivitas yang terlokasi cenderung terpisah-pisah dalam jangka pendek	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Jalinan pembagian kewenangan dan sumberdaya belum ada, tetapi upaya untuk menjalin pembagian kewenangan antara pemerintah dan komunitas lokal sudah mulai dirumuskan dengan adanya kerjasama-kerjasama dalam aktivitas pengurangan risiko bencana dengan capaian yang cukup berarti	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum adanya jalinan pembagian kewenangan dan sumber daya antara pemerintah lokal dan komunitas lokal, kerjasama dalam aktivitas pengurangan risiko bencana selama ini hanya bersifat dadakan ketika terjadi bencana saja	

PRIORITAS I : MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI PELAKSANAANNYA

INDIKATOR IV : BERFUNGSI NYA FORUM/JELARING NASIONAL/LOKAL UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Pencapaian forum/jelaring nasional/lokal untuk PRB telah mencakup semua tujuan, bidang dan program secara terukur dan terstruktur dengan partisipasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan dan pencapaian-pencapaian tersebut selalu ditinjau secara berkala terkait kapasitas pengaruh anggota forum dalam penetapan kebijakan	
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diaku ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Pencapaian forum/jelaring nasional/lokal untuk PRB telah mencakup semua tujuan, bidang dan program secara terukur dan terstruktur dengan partisipasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan walau pencapaian-pencapaian tersebut belum ditinjau secara berkala terkait kapasitas pengaruh anggota forum dalam penetapan kebijakan	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana yang merangkul seluruh komponen pemangku kepentingan terkait dalam pengurangan risiko bencana dengan tingkat partisipatif yang bagus walau terbatas pada penyelesaian isu-isu terkait dalam pengurangan risiko bencana dan belum mempertimbangkan keberlanjutan pencapaian	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Forum resmi untuk pengurangan risiko bencana belum terbentuk tetapi telah mulai ada kelompok kerja lintas sektor di pemerintah ataupun pada organisasi terkait peredaman risiko bencana	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Forum resmi untuk pengurangan risiko bencana belum terbentuk, upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan oleh kelompok dengan intensitas yang cukup besar dari pihak luar daerah/komunitas	

PRIORITAS II : MENDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

INDIKATOR I : TERSEDIA ANALISIS RISIKO LOKAL DAN NASIONAL BERDASARKAN DATA BAHAYA DAN INFORMASI KERENTANAN DAN MELIPUTI PENILAIAN RISIKO UNTUK SEKTOR-SEKTOR UTAMA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Penilaian risiko bencana yang akurat dan multisektoral (sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan fisik) untuk setiap ancaman bencana telah tersusun dan selalu di perbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru hingga telah dijadikan dasar bagi pembangunan dan penanaman modal pada tingkat lokal/nasional	Dokumen analisis risiko bencana daerah
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Penilaian risiko bencana yang akurat dan multisektoral (sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan fisik) untuk setiap ancaman bencana telah tersusun dan selalu di perbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru yang dilengkapi dengan rekaman/data risiko bencana yang dianalisis pengaruhnya terhadap perubahan iklim dan variasi iklim walau belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam perencanaan pembangunan	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Dokumen analisis risiko bencana daerah telah tersusun berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan yang tersedia pada tingkat lokal dan Nasional untuk beberapa potensi bencana yang menjadi prioritas	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Belum terdapat dokumen analisis risiko bencana yang disusun secara sistematis pada suatu wilayah, analisis baru menghasilkan peta-peta potensi bencana tanpa dilengkapi dengan data-data kerentanan wilayah baik sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan fisik	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum terdapat dokumen analisis risiko bencana yang disusun secara sistematis pada suatu wilayah, analisis dilaksanakan dengan mengidentifikasi potensi bahaya berdasarkan sejarah kebencanaan secara partisipatif	

PRIORITAS II : MENDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

INDIKATOR II : TERSEDIA SISTEM-SISTEM YANG SIAP UNTUK MEMANTAU, MENGARSIP DAN MENYEBARLUASKAN DATA TENTANG BAHAYA-BAHAYA DAN KERENTANAN-KERENTANAN UTAMA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Hasil pencatatan dan analisis data-data kunci tentang risiko bencana berdasarkan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal dalam sistem yang terstruktur, mudah diakses serta memiliki format terstandar dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain dan dasar keputusan terkait PRB bagi komunitas di daerah tersebut	Sistem Informasi bencana Wilayah
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Hasil pencatatan dan analisis data-data kunci tentang risiko bencana berdasarkan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal dalam sistem yang terstruktur, mudah diakses serta memiliki format terstandar yang sudah ditetapkan dan direkam secara sistematis	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Telah tersedianya sistem informasi untuk pemantauan dan pencatatan data tentang bahaya dan kerentanan utama namun masih belum dapat diakses atau belum terintegrasi dengan sistem nasional/internasional	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Sistem informasi bencana wilayah belum tersedia, data-data yang tersedia terbatas pada pencatatan manual dari kejadian-kejadian bencana serta data statistik yang ada	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Sistem informasi bencana wilayah belum tersedia, data baru diperoleh bila terjadi kejadian bencana dari berbagai institusi dengan keakuratan dan validasi yang lemah	

PRIORITAS II : MENDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

INDIKATOR III : TERSEDIA NYA SISTEM PERINGATAN DINI YANG SIAP BEROPERASI UNTUK SKALA BESAR DENGAN JANGKAUAN YANG LUAS KESELURUH TINGKAT LEVEL MASYARAKAT

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Sistem peringatan dini telah stabil untuk segala jenis bencana yang mungkin terjadi dan telah ditunjang dengan sebuah prosedur dengan daftar (cheeklist) yang jelas serta dievaluasi berkala oleh multistakeholder hingga mampu beroperasi dengan baik dan menjangkau seluruh level masyarakat yang terancam untuk bertindak cepat mengatasi datangnya setiap jenis bencana	Sistem peringatan dini
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi capaian-capaian selain belum komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Sistem peringatan dini telah stabil terbatas pada beberapa jenis bencana prioritas yang mungkin terjadi namun telah ditunjang dengan sebuah prosedur dengan daftar (cheeklist) yang jelas serta dievaluasi berkala oleh multistakeholder dengan ketersediaan komunikasi yang tepat dan diperluas di wilayah yang memiliki resiko bahaya	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersedianya sistem peringatan dini walau masih terbatas pada beberapa jenis bencana prioritas namun telah digunakan dan menjangkau komunitas secara luas dengan prosedur yang telah dipahami	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Sistem Peringatan dini belum terbangun hingga ke komunitas lokal, peringatan kejadian bencana dalam komunitas bersumber dari kebijakan lokal dan fenomena alam	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Sistem Peringatan Dini belum ada dalam suatu wilayah, pengetahuan masyarakat tentang fenomena alam yang memicu bencana terbatas, tetapi beberapa institusi telah mulai menyampaikan pesan-pesan peringatan secara partisipatif tanpa prosedur yang jelas	

PRIORITAS II : MENDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

INDIKATOR IV : PENILAIAN RISIKO LOKAL DAN NASIONAL MEMPERTIMBANGKAN RISIKO-RISIKO REGIONAL/LINTAS BATAS GUNA MENGGALANG KERJASAMA REGIONAL MENGENAI PENGURANGAN RISIKO

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terlaksananya aksi pengurangan risiko bencana yang terencana dengan melaksanakan sinkronisasi terhadap risiko-risiko lintas batas sebagai acuan bagi pengaturan pemberian peringatan dini, informasi risiko bencana dan dampak kerugian yang ditimbulkannya yang dapat diakses dengan cepat dan tepat oleh semua pemangku kepentingan antar daerah	Rencana Aksi PRB Lintas batas
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tersusunnya rencana aksi bersama dalam komitmen antar daerah untuk mengurangi risiko bencana yang mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas sebagai acuan tindak bersama yang dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan antar daerah walau terbatas pada beberapa risiko bencana saja	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersusunnya rencana aksi bersama dalam komitmen antar daerah untuk mengurangi risiko bencana yang mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas sebagai acuan tindak bersama walau terbatas pada beberapa risiko bencana saja dan informasi yang belum dapat diakses secara langsung	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Rencana aksi pengurangan risiko bencana telah ada, tetapi belum dilaksanakan sinkronisasi dengan rencana aksi daerah lain, kerjasama lintas batas bersifat kasuistik yang muncul terpaut fenomena yang terjadi dan mendasak	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Rencana aksi pengurangan risiko bencana belum ada, risiko bencana yang melingkupi 2 atau lebih wilayah difasilitasi oleh komunitas yang lebih besar sesuai dengan aturan yang telah ada	

- PRIORITAS III : TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT
- INDIKATOR III : ADANYA METODE RISET DAN ALAT UNTUK PENILAIAN MULTIRISIKO SERTA ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPERKUAT

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Menurunnya risiko pemaknaan dana pemulihan bencana akibat tumbuhnya kesadaran lokal dan nasional untuk berinvestasi pada praktik pengurangan risiko bencana berdasarkan kajian yang resmi antar pakar dari berbagai disiplin ilmu mencakup seluruh potensi bencana	Riset Kebencanaan
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan nasional untuk meningkatkan kapasitas teknis dan ilmiah dalam meneliti dan menilai kerentanan daerah sehingga dapat meningkatkan kapasitas pantau dan penilaian regional	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Telah tersedia beberapa riset dan alat untuk mengkaji risiko bencana secara lokal dengan mengadopsi kajian ilmiah terbatas oleh pusat studi atau lembaga pendidikan tinggi saja dan belum berorientasi pada kebutuhan pengurangan risiko bencana secara universal yang dapat diterapkan secara umum	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Alat-alat dan hasil riset yang dihasilkan terbatas pada analisis potensi dan intervensi pengurangan risiko bencana yang tengah dilaksanakan oleh beberapa institusi belum berorientasi pada kebutuhan pengurangan risiko bencana secara universal yang dapat diterapkan secara umum	

- PRIORITAS III : TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT
- INDIKATOR IV : ADANYA STRATEGI KESADARAN SELURUH KOMUNITAS UNTUK PELAKSANAAN PRAKTIK BUDAYA KETAHANAN BENCANA DENGAN JANGKAUAN LUAS BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN MAUPUN PEDESAAN

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Peningkatan kualitas capaian praktik pengurangan risiko bencana yang diperoleh dari meningkatnya kesadaran komunitas secara luas mengenai budaya pengurangan risiko bencana dengan diterapkannya strategi informasi yang disusun secara partisipatif berdasarkan data-data yang memadai oleh para pemangku kepentingan dan informasi yang menjangkau seluruh level komunitas dengan media dan bahasa yang mudah dipahami dan selalu diperbarui	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Daerah, difokuskan kepada strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Diterapkannya strategi peningkatan ketahanan masyarakat secara partisipatif yang terintegrasi dengan rencana-rencana pengurangan risiko bencana lokal secara terencana dan teratur dengan memanfaatkan peran media untuk saling berbagi informasi, data, praktik baik dan pemanfaatan momentum hari pengurangan risiko bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersusunnya rencana strategi peningkatan kesadaran masyarakat secara partisipatif yang terintegrasi dengan rencana-rencana pengurangan risiko bencana lokal yang ditujukan bagi terciptanya kesadaran komunitas dan kemudahan akses informasi bencana bagi penduduk maupun tamu daerah yang selalu diperbarui	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Peningkatan kesadaran masyarakat terbatas pada strategi terpicu oleh institusi-institusi yang peduli, sering terjadi bias informasi karena perbedaan pendekatan dalam pengumpulan data, prioritas penanganan dan perbedaan bahasa	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Kesadaran masyarakat dibangun dengan informasi yang tidak lengkap, dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan terbatas pada masyarakat yang memiliki akses memadai terhadap terpaan informasi	

PRIORITAS II : TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR I : TERSEDIA NYA INFORMASI YANG RELEVAN MENGENAI BENCANA DAN DAPAT DIAKSES DI SEMUA TINGKAT OLEH SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN [MELALUI JEJARING, PENGEMBANGAN SISTEM UNTUK BERBAGI INFORMASI, DST]

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Tersusunnya rencana-rencana pembangunan yang mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan informasi bencana yang akurat, selalu diperbarui, berdasarkan catatan sejarah, pengetahuan lokal dan ilmiah yang terintegrasi dengan sistem nasional serta dapat diakses dengan mudah oleh komunitas lokal	Sistem Informasi Bencana
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tersedianya Sistem Informasi bencana yang didukung dengan data yang akurat berdasarkan risiko, peristiwa, dampak dan dokumen sejarah serta pengetahuan lokal maupun ilmiah terkait lainnya yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersedianya Sistem Informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berbasis data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Dilaksanakannya upaya-upaya pengumpulan informasi bencana yang akurat, berdasarkan catatan sejarah, pengetahuan lokal dan ilmiah yang selalu diperbarui walau akses terhadap informasi tersebut masih sangat terbatas bagi masyarakat umum	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Upaya pengumpulan informasi bencana telah dilaksanakan terbatas pada catatan sejarah dan pengetahuan lokal serta ilmiah	

PRIORITAS III : TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR II : KURIKULUM SEKOLAH, MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG RELEVAN MENCAKUP KONSEP-KONSEP DAN PRAKTIK-PRAKTIK MENGENAI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMULIHAN

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Berlangsungnya transisi budaya menuju budaya pengurangan risiko bencana dengan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada generasi muda yang ditunjang dengan kurikulum dan bahan ajar yang memadai untuk memunculkan inisiatif dan praktik pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan	Kurikulum Siaga Bencana
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tertaksananya pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur dengan mengintegrasikan pengetahuan dan kebiasaan asli daerah setempat dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan pengetahuan semua pihak sekolah tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan pemulihan pasca bencana yang disertai dengan pelatihan-pelatihan keterampilan penanganan bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tertaksananya pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Upaya pengurangan risiko bencana telah dididik kepada komunitas sekolah, walau belum memiliki kurikulum yang jelas dan dalam jangka pendek, kajian yang diberikan sebatas peningkatan keterampilan dalam menangani keadaan darurat beberapa bencana saja	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Pendidikan pengurangan risiko bencana terbatas kepada pemberian pengetahuan dan penyusunan rencana aksi untuk mempersiapkan komunitas sekolah pada beberapa bencana yang sering terjadi pada suatu wilayah	

PRIORITAS IV : ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOR I : PENGURANGAN RISIKO BENCANA MERUPAKAN TUJUAN INTEGRAL DARI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN RENCANA-RENCANA YANG BERHUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, TATA GUNA TANAH DAN PENYESUAIAN TERHADAP IKLIM

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Meluasnya praktik-praktik baik yang dilaksanakan oleh komunitas secara berkelanjutan mengikuti strategi pengurangan risiko bencana yang dilandasi kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan tata guna tanah serta perubahan iklim terkait dalam aktivitas peredaman faktor-faktor risiko yang mendasar	Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Tata Guna Lahan dan kebijakan lain terkait pemanfaatan sumberdaya alam
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan tata guna lahan telah memuat semua unsur-unsur pengurangan risiko bencana untuk mengurangi faktor-faktor risiko dasar serta perubahan iklim	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana walau dalam pelaksanaannya masih belum menjadi prioritas	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan telah ada dan mulai memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana, namun belum terintegrasi secara proporsional dan saling tumpang tindih	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Beberapa kebijakan dasar terkait pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan masih belum memadai dan belum memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana, namun telah ada beberapa inisiatif sektoral untuk mengakomodasi pengurangan risiko bencana pada kegiatan pembangunan lahan pertanian	

PRIORITAS IV : ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOR II : RENCANA-RENCANA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL TENGAH DILAKSANAKAN UNTUK MENGURANGI KERENTANAN PENDUDUK YANG PALING BERISIKO TERKENA DAMPAK BAHAYA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terbangunnya budaya komunitas yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dalam seluruh aspek ketahanan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan aset penduduk secara terstruktur dan terencana atas partisipasi setiap komponen komunitas	Kebijakan pembangunan sosial, aksi peningkatan ketahanan jaringan pangan, perekonomian bencana, asuransi bencana, diversifikasi mata pencarian (mata pencarian alternatif)
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan aset penduduk pada hampir keseluruhan wilayah	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pangan, kesehatan umum dan aset	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Diselenggarakannya aksi sosial dalam kelompok-kelompok komunitas, walau belum terintegrasi namun telah mengarah kepada upaya pengurangan risiko bencana khususnya peningkatan ketahanan pangan dan mata pencarian alternatif pada daerah berisiko tinggi	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Beberapa aksi sosial yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok komunitas belum terintegrasi, walau tidak ditujukan pada pengurangan risiko bencana, tetapi secara tidak langsung telah mengarah pada pengurangan risiko bencana	

PRIORITAS IV : ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOR III : RENCANA-RENCANA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SEKTORAL DI BIDANG EKONOMI DAN PRODUKSI TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENGURANGI KERENTANAN KEGIATAN-KEGIATAN EKONOMI

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terbangunnya iklim kondusif bagi peningkatan dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi yang mencakup kemitraan publik dan swasta yang ditujukan untuk peningkatan ketahanan komunitas dalam bidang perekonomian	
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Teselenggaranya aksi-aksi yang terukur dan terarah berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan kapasitas komunitas dibidang ekonomi dan produksi mencakup semua sektor kemitraan publik dan swasta yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan publik dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Belum adanya perlindungan khusus terhadap sektor produksi yang mencakup kemitraan publik dan swasta untuk pengurangan risiko bencana, tetapi beberapa sektor produksi mulai mengembangkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum adanya perlindungan khusus terhadap sektor produksi yang mencakup kemitraan publik dan swasta untuk pengurangan risiko bencana, upaya-upaya terbatas pada intervensi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi saat tanggap darurat	

PRIORITAS IV : ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOR IV : PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PEMUKIMAN MANUSIA MEMUAT UNSUR-UNSUR PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERMASUK PEMBERLAKUAN SYARAT DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Tertaksananya pembangunan kawasan seluruh wilayah huni yang sesuai dengan rencana tata guna lahan dan perluasan yang mampu mengurangi risiko bencana bagi seluruh komponen komunitas	Perda IMB dan Penegakan Hukum
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Pemukiman penduduk telah dirancang dengan tepat dan ketat sesuai dengan strategi rencana tata guna lahan yang ditunjang dengan penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang ketat dan konsisten hingga mampu meminimalkan risiko bencana yang mungkin timbul	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Rencana Tata Ruang Wilayah telah tersusun walau belum memuat strategi yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana tetapi beberapa perluasan pembangunan telah mulai memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Rencana Tata Ruang Wilayah telah tersusun, walau demikian belum ada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana secara terpadu	

PRIORITAS IV : ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOR V : LANGKAH-LANGKAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA DIPADUKAN KE DALAM PROSES-PROSES REHABILITASI DAN PEMULIHAN PASCABENCANA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terselenggaranya pemulihan pasca bencana berdasarkan norma dan standar yang disusun oleh para pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan prinsip pengurangan risiko bencana hingga tidak mendatangkan risiko baru dari pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Perancangan proses-proses pemulihan pasca bencana berdasarkan norma dan standar serta mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko baru dari pembangunan, namun demikian rencana proses tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan sumber	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang namun masih bersifat kebijakan sepihak dari pemerintah tanpa mendengarkan aspirasi korban dikarenakan keterbatasan sumber-sumber daya dan sistematisa pengambilan keputusan	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Upaya pemulihan bencana tanpa dengan rencana yang memadai, hanya memprioritaskan pembagian bantuan konstruksi yang merata tergantung kerusakan, tanpa ada proktik untuk penjaminan ketahanan pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan	

PRIORITAS IV : ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA

INDIKATOR VI : SIAP SEDIANYA PROSEDUR-PROSEDUR UNTUK MENILAI DAMPAK-DAMPAK RISIKO BENCANA ATAU PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN BESAR, TERUTAMA INFRASTRUKTUR

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terwujudnya pelaksanaan prosedur-prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam strategi, rencana dan program pembangunan yang berkelanjutan di bidang-bidang pengentasan kemiskinan, perumahan, air, sanitasi, energi, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan lingkungan hidup yang lengkap dan memadai untuk melayani kebutuhan semua tingkat masyarakat sehingga pembangunan tidak mendatangkan bencana-bencana lebih lanjut	
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diakui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan, perumahan, air, sanitasi, energi, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan lingkungan hidup yang telah diupayakan secara maksimal walau masih terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan hasil penilaian tersebut akibat kurangnya sumberdaya	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan belum baku, upaya penilaian baru menggunakan standar pengelolaan lingkungan atau standar lain yang dapat digunakan sehingga ada kendala yang cukup besar sewaktu mengintegrasikannya ke sektor pengurangan risiko bencana	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum ada upaya penilaian dampak risiko bencana, namun demikian strategi pengelolaan lingkungan telah tersedia dan dilaksanakan secara maksimal	

PRIORITAS V : PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA

INDIKATOR I : Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif pengurangan risiko bencana

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terlaksananya upaya penanganan darurat bencana secara efektif dan efisien disebabkan memadainya kapasitas kelembagaan, memadainya metode dan sumberdaya pada seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkat komunitas, memadainya kapasitas teknis personal untuk melaksanakan penilaian cepat mengenai kerusakan, pemulihan infrastruktur vital dan penyediaan mata pencarian baru masyarakat pasca bencana, secara sukarela dengan perencanaan bersama yang matang terhadap risiko bencana sehingga meminimalkan jumlah korban bencana	Lembaga khusus untuk penanggulangan bencana
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diikuti ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan kuat didukung dengan kapasitas teknis yang memadai untuk menjalankan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan bencana seperti penilaian cepat mengenai kerusakan, pemulihan infrastruktur vital dan penyediaan mata pencarian baru masyarakat pasca bencana yang selalu dievaluasi dengan mengikutsertakan partisipasi pemangku kepentingan pada seluruh tingkat komunitas secara sukarela untuk membangun prosedur penanganan darurat yang efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Belum ada lembaga yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam upaya penanganan darurat bencana, praktik penanganan darurat terbatas pada upaya multisektoral di pemerintahan yang didukung oleh sukarelawan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan saat terjadi bencana	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum ada lembaga yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam upaya penanganan darurat bencana, praktik penanganan darurat terbatas pada upaya multisektoral di pemerintahan tanpa dukungan sukarelawan	

PRIORITAS V : PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA

INDIKATOR II : TERSEDIAKAH RENCANA KESIAP-SIAGAAN BENCANA DAN RENCANA ANTISIPASI YANG SIAP DI SEMUA JENJANG PEMERINTAHAN, LATIHAN REGULER DIADAKAN UNTUK MENGUJI DAN MENGEMBANGKAN PROGRAM PROGRAM TANGGAP BENCANA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Upaya penanganan darurat dilaksanakan berdasarkan rencana siaga yang disusun secara bersama dan diturunkan menjadi prosedur tetap yang diperoleh dari sumber ilmiah dan pembelajaran yang terjadi sebelumnya dan diujicoba secara teratur hingga mampu mengurangi timbulnya korban jiwa saat bencana dan korban tambahan lain saat perawatan korban	Rencana Siaga dan Kontijensi, prosedur tetap yang telah diujicoba
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi diikuti ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Atasi-risiko pengurangan risiko bencana dilaksanakan dalam dua tahapan perancangan dan pelaksanaan yakni tahapan kesiap-siagaan bencana dan tahapan saat pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana, pelaksanaan kedua tahapan ini berdasarkan pengetahuan komunitas tentang longkrah-langkah pengurangan risiko bencana dan juga berdasarkan dari hilamah pembelajaran bencana yang terjadi sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kepekaan komunitas untuk menghindari luputnya sebab-sebab dasar risiko bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Belum adanya rencana kesiapsiagaan yang ditujukan bagi penanganan darurat bencana, upaya penanganan dilaksanakan secara responsif berdasarkan kejadian dan tingkat kerusakan namun demikian latihan-latihan telah diberikan untuk komunitas walau sebagai latihan evaluasi hasil musyawarah	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum adanya rencana kesiapsiagaan yang ditujukan bagi penanganan darurat bencana dan pelatihan apapun terkait penanganan darurat bencana namun upaya penanganan darurat telah dilaksanakan secara responsif berdasarkan kejadian dan tingkat kerusakan	

PRIORITAS V : PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA

INDIKATOR III : TERSEDIAKA CADANGAN FINANSIAL DAN LOGISTIK SERTA MEKANISME ANTISIPASI YANG SIAP UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN DARURAT YANG EFEKTIF DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Tersedianya pemulihan jangka panjang terhadap aset vital pasca bencana dan tersedianya kebutuhan dasar masyarakat saat tanggap darurat dengan tersedianya anggaran khusus yang dapat difektifkan secara optimal hingga menjamin keselamatan masyarakat serta dalam waktu singkat masyarakat dapat menikmati kembali aset vital yang hilang saat bencana	Anggaran khusus untuk pelaksanaan pemulihan bencana
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi dilalui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang dikembangkan demi menjamin keberlanjutan kehidupan korban bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Belum adanya anggaran untuk pelaksanaan pemulihan wilayah setelah terjadi bencana, walau rencana pemulihan telah disusun namun upaya-upaya pemulihan yang dilaksanakan amat bergantung dari anggaran bantuan nasional/regional	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Belum adanya anggaran dan rencana untuk pelaksanaan pemulihan wilayah setelah terjadi bencana, upaya-upaya pemulihan dilaksanakan amat bergantung dari anggaran bantuan dan rencana nasional/regional	

PRIORITAS V : PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA

INDIKATOR IV : TERSEDIAKA PROSEDUR-PROSEDUR YANG SIAP UNTUK MELAKUKAN PERTUKARAN INFORMASI YANG RELEVAN SELAMA PENANGANAN DARURAT SERTA UNTUK MELAKUKAN TINJAUAN-TINJAUAN PASCA BENCANA

TINGKAT	DESKRIPSI TINGKAT	VERIFIKASI TINGKAT	OBJEK VERIFIKASI
5	Capaian komprehensif telah diperoleh dengan komitmen dan kapasitas yang terjaga di semua tingkat	Terbangunnya akses informasi yang cepat dan akurat bagi masyarakat dan dapat digunakan di setiap tingkatan berdasarkan pembelajaran yang memadai dari penanganan darurat yang telah terlaksana hingga membantu upaya penanganan pada daerah-daerah	
4	Capaian yang cukup berarti diperoleh, tetapi dilalui ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional	Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana yang terdokumentasi dengan baik sebagai dasar untuk tinjauan terhadap tindakan yang telah diambil yang ditunjang dengan wawancara terhadap pelaku yang terlibat demi peningkatan efektivitas prosedur komunikasi bagi masyarakat saat bencana	
3	Komitmen kelembagaan tercapai, tetapi capaian-capaian selain belum bersifat komprehensif juga belum cukup berarti	Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	
2	Kemajuan ada, tetapi kebijakan sistematis dan/atau komitmen kelembagaan belum ada	Walaupun belum ada prosedur standar tentang informasi dan komunikasi darurat penanganan bencana, tetapi beberapa kelompok komunitas telah berpartisipasi secara sukarela untuk memberikan informasi dengan keterbatasan sumberdaya	
1	Kemajuan kecil dengan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan	Prosedur informasi dan komunikasi belum tersedia, komunikasi dan informasi didapat dengan upaya pemerintah yang sangat terbatas dan tidak terjamin keberlanjutannya	

LAMPIRAN 5

Daftar Isian Ketahanan Daerah berdasarkan Indikator HFA



ANALISIS RISIKO BENCANA TSUNAMI

dan Nasional Penanggulangan Bencana

Panduan Penilaian Ketahanan Daerah

Pelaksanaan Focised Group Discussion Pemetaan Ketahanan Daerah

Berdasarkan 22 Indikator Pencapaian Kerangka Aksi I-Iyogo

KAJIAN RISIKO BENCANA TSUNAMI

Penilaian Ketahanan Daerah

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Diadaptasi dari Modul Komunitas Siaga Tsunami



Pengantar

Daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini diadaptasikan dari 22 Indikator Pencapaian Kerangka Aksi Hyogo (selanjutnya disebut KAH). KAH merupakan kesepakatan lebih dari 160 negara untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia melaporkan pencapaian KAH ke salah satu sekretariat PBB yang bernama UN-ISDR (United Nations International Strategic for Disaster Reduction).

Kuesioner ini disusun berdasarkan 22 indikator pencapaian KAH. Indikator yang dipersiapkan oleh PBB masih terlalu luas dan memang diperuntukkan untuk menilai pencapaian suatu negara. Oleh karena itu, Komunitas Siaga Tsunami (selanjutnya disebut KOGAMI) melakukan beberapa penyesuaian untuk menghitung pencapaian KAH pada tingkat kabupaten/kota maupun pada skala provinsi.

Simbol Pembantu Pengisian

Salah satu langkah adaptasi dalam menterjemahkan KAH dari skala nasional/negara menjadi skala daerah dengan memberikan petunjuk dan berbagai penyederhanaan lainnya. Untuk itu Pengisi diharapkan dapat memperhatikan simbol-simbol Pembantu Pengisian.

SIMBOL	
 Pengantar	Simbol digunakan dalam kuesioner ini untuk memudahkan pengisi kuesioner. Selain itu simbol ini juga digunakan untuk memudahkan proses analisis hingga mendapatkan Tingkat Ketahanan Daerah untuk pengurangan risiko bencana.
 Pertanyaan Pemandu	
 Pertanyaan Kunci	



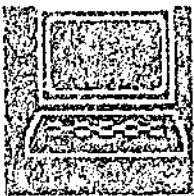
Pengantar

Untuk memudahkan Pengisi Kuesioner memahami pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini, diberikan beberapa pengantar terkait komponen yang perlu dijelaskan oleh Pengisi.



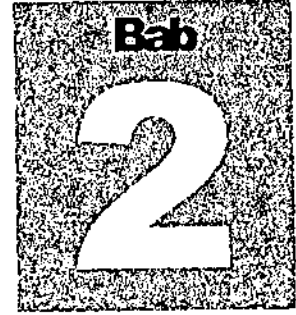
Pertanyaan Pemandu

Simbol ini menandakan bahwa bagian yang ditandai adalah untuk diisi oleh Pengisi Kuesioner. Bagian ini merupakan pertanyaan pemandu dan juga dapat digunakan sebagai objek klarifikasi untuk pertanyaan kunci yang diberikan sebelum atau sesudahnya.



Pertanyaan Kunci

Simbol ini digunakan untuk menandai bagian yang perlu diisi oleh Pengisi Kuesioner dan menjadi dasar penghitungan Tingkat Ketahanan Daerah.



Metode Penilaian

Tingkat ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana yang dihasilkan merupakan suatu pendekatan untuk memetakan kondisi daerah tentang berbagai komponen yang dibutuhkan untuk upaya pengurangan risiko bencana. Sebagai sebuah pendekatan, metode ini diharapkan mampu untuk memperlihatkan komponen apa saja yang perlu ditingkatkan pada suatu daerah agar lebih tangguh meredam risiko bencana. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan daerah dapat memfokuskan kebijakan penanggulangan bencananya ke arah yang tepat.

Tingkat kedalaman dan lebar pemetaan amat bergantung pada kemampuan fasilitator untuk mengembangkan pertanyaan panduan yang ada pada kuesioner. Kondisi ini mengakibatkan perlu suatu standar minimal tertentu bagi fasilitator yang akan memandu diskusi ini.

Sekilas tentang Prioritas dan Indikator HFA

HFA yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 Prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian.

Prioritas program pengurangan risiko bencana HFA dan indikator pencapaiannya adalah :

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian :
 - a. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan

- b. Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan
 - c. Terjalinnnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal
 - d. Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan indikator :
- a. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah
 - b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama
 - c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat
 - d. Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; dengan indikator :
- a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)
 - b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan
 - c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset
 - d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dengan indikator :

- a. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim
 - b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya
 - c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi
 - d. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)
 - e. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana
 - f. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, dengan indikator :
- a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya
 - b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana
 - c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana
 - d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah maka kita dapat membagi tingkat ketahanan tersebut kedalam 5 tingkatan, yaitu :

- **Level 1** Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan, (Nilai Total daerah 0-19,99).

- **Level 2** Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis. (Nilai Total Daerah 20-39,99)
- **Level 3** Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. (Nilai Total Daerah 40-59,99).
- **Level 4** Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. (Nilai Total Daerah 60-79,99)
- **Level 5** Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. (Nilai Total Daerah 80-100).

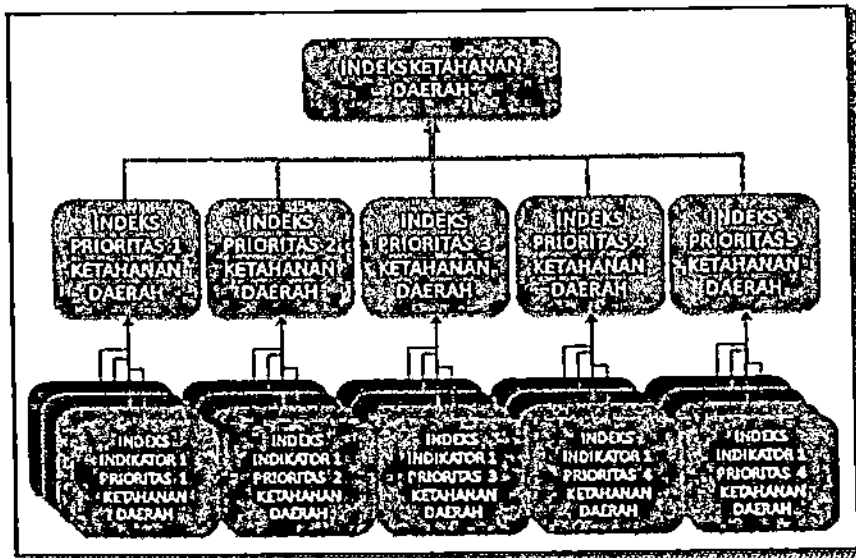
Struktur Kuesioner

Kuesioner terdiri dari 88 pertanyaan yang dibagi menjadi 22 bagian berdasarkan indikator pencapaian HFA. Setiap indikator HFA membutuhkan 4 pertanyaan untuk menentukan tingkat pencapaiannya. Struktur pertanyaan setiap indikator tersebut adalah :

- Pertanyaan pertama; mengidentifikasi apakah telah digalang inisiatif-inisiatif untuk menghasilkan capaian minimal pada indikator tersebut.
- Pertanyaan kedua; mengidentifikasi apakah telah dihasilkan capaian minimal yang dituju oleh indikator tersebut.
- Pertanyaan ketiga; mengidentifikasi apakah capaian tersebut telah memiliki kualitas dan/atau manfaat minimal seperti yang diharapkan oleh indikator tersebut.
- Pertanyaan keempat; mengidentifikasi apakah telah terjadi perubahan sistemik secara prinsipil berdasarkan output minimal pada indikator tersebut.

Struktur Penilaian Kuesioner

Penilaian kuesioner dilaksanakan dengan mengikuti struktur kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk mendapatkan sebuah tingkat ketahanan daerah. Tingkat Ketahanan Daerah dalam meredam risiko bencana ini diperoleh dengan menggabungkan Indeks Prioritas Ketahanan Daerah. Setiap Indeks Prioritas Ketahanan Daerah diperoleh dari Indeks Indikator Ketahanan Daerah. Struktur penilaian kuesioner ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **gambar 1** berikut.



Gambar 1. Struktur Penilaian Kuesioner Tingkat Ketahanan Daerah

Indeks indikator setiap prioritas ditentukan berdasarkan jawaban dari 88 pertanyaan pemandu. Untuk memastikan tingkat ketahanan setiap indikator, dibutuhkan maksimum 4 pertanyaan. Berdasarkan struktur pertanyaan, maka struktur penilaian dari setiap indikator adalah seperti tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hubungan Struktur Pertanyaan dengan Struktur Penilaian

NO.	STRUKTUR PERTANYAAN	FUNGSI PERTANYAAN	STRUKTUR PENILAIAN
1.	Pertanyaan Pertama	Identifikasi inisiatif-inisiatif untuk mencapai hasil minimal setiap indikator	Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 2
2.	Pertanyaan Kedua	Identifikasi capaian minimal telah diperoleh atau belum	Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 3
3.	Pertanyaan Ketiga	Identifikasi fungsi minimum dari capaian tersebut telah dicapai atau belum	Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 4
4.	Pertanyaan Keempat	Identifikasi perubahan sistemik dari fungsi yang telah terbangun berdasarkan capaian yang ada	Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut telah berada pada LEVEL 5

Jawaban “YA” atau “TIDAK” dalam pengisian form ini ditandai dengan angka. Bila jawaban “YA”, fasilitator memasukan angka “1” pada sheet Form Jawaban dalam Dokumen Pendukung 3. Software Penghitung Tingkat Ketahanan Daerah Berdasarkan HFA. Sedangkan bila jawaban “TIDAK”, fasilitator memasukkan angka “0” pada dokumen tersebut.

Contoh penentuan nilai tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.

CONTOH KASUS

Pada Prioritas 1 tentang MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA;

pada indikator 1 tentang Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan;

terdapat 4 pertanyaan untuk menentukan level ketahanan indikator tersebut, yaitu :

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana di daerah Anda? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara terencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB, SOTK dll)? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5)</i>	1	0

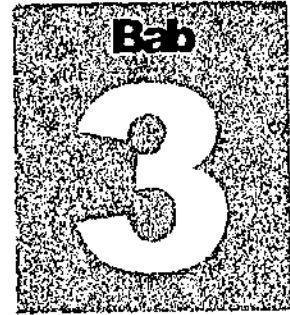
Setiap angka respon "YA" atau "TIDAK" kemudian dimasukkan kedalam Form Jawaban yang berada pada Dokumen Pendukung 3. Software Penghitung Tingkat Ketahanan Daerah Berdasarkan HFA seperti yang terlihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Tempat mengisi nilai setiap indikator

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1.	1	Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	
			2	
			3	
			4	

**MASUKAN
SETIAP NILAI
RESPON DI
KOLOM INI!**

Setelah 22 indikator telah diberi nilai, maka Indeks Ketahanan Daerah (baik Kabupaten/Kota ataupun provinsi) otomatis dapat dilihat pada sheet "LEVEL KOTA-KAB".



Fasilitator dan Peserta

P emetaan ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana amat bergantung dari ketelitian fasilitator untuk memandu diskusi para pemangku kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Selain fasilitator yang memiliki kemampuan yang memadai, kualitas diskusi juga amat bergantung pada keberagaman institusi penyelenggara penanggulangan bencana yang menjadi peserta diskusi. Oleh karenanya dibutuhkan syarat minimum kemampuan fasilitator dan minimum keterwakilan institusi penyelenggara penanggulangna bencana daerah.

Standar Minimal Fasilitator

A. Standar minimal pengetahuan fasilitator

1. Mengetahui secara umum Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo)
2. Mengetahui secara umum konsep manajemen penanggulangan bencana.
3. Memahami garis hubungan antara manajemen penanggulangan bencana dengan konsep pengurangan risiko bencana.

B. Standar minimal keterampilan fasilitator

1. Mampu mengembangkan inisiatif dan partisipasi peserta diskusi, minimal telah memiliki pengalaman memfasilitasi lebih dari 10 jam sebagai fasilitator utama.
2. Mampu bersikap berimbang dan memperhatikan seluruh pendapat yang ada.
3. Telah memahami panduan fasilitator ini.
4. Mampu menjalankan aplikasi program komputer dalam format excel.

Keterwakilan Insitusi Peserta Diskusi

Diskusi terfokus untuk memetakan ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana minimal dihadiri oleh instansi :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Perusahaan Swasta
9. Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat dan/atau Tokoh Agama
10. LSM

KAJIAN KETAHANAN DAERAH

Kuesioner

KOMUNITAS SIAGA TSUNAMI
Didukung oleh UNESCO,
TPS-PB KOTA PADANG, UNDP, DLL

PRIORITAS 1

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 1 :

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan



Kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana amat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Salah satu bukti komitmen daerah dalam mengurangi risiko bencana adalah dengan tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait.



Peraturan Daerah yang membahas KHUSUS tentang Penanggulangan Bencana di daerah Anda adalah :

1.
2.



Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana di daerah Anda? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara terencana? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB, SOTK dll)? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 5)	1	1

PRIORITAS 1

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 2 :

Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan

Salah satu bentuk perwujudan dari komitmen pemerintah dan institusi terkait penanggulangan bencana adalah dengan menyediakan berbagai sumberdaya baik anggaran maupun sumberdaya manusia serta fasilitas pendukung lainnya.

1. Berapakah jumlah personil yang terkait langsung dalam penanggulangan bencana di institusi Anda?
2. Berapakah Anggaran khusus untuk pengurangan risiko bencana di institusi Anda?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
5. Apakah di institusi Anda (pemerintah daerah/organisasi/kelompok) sudah ada lembaga yang khusus untuk melaksanakan aktivitas pengurangan risiko bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
6. Apakah institusi Anda telah memiliki anggaran khusus tiap tahunnya dalam APBD untuk pelaksanaan aktivitas pengurangan risiko bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
7. Menurut anda, apakah kebutuhan sumber daya yang terkait dengan PRB pada institusi Anda (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
8. Apakah jumlah anggaran yang digunakan institusi Anda dan kemana penggunaan anggarannya dapat dimonitoring oleh masyarakat atau komunitas lain diluar insititusi Anda? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9)	1	1

PRIORITAS 1

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 3 :

Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal

Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan peran serta aktif dari seluruh lapisan komunitas. Untuk menjamin keberlanjutan komitmen seluruh lapisan komunitas, peran-peran tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah secara tertulis khususnya mengenai mekanisme dan tanggung jawab masing-masing peran.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
9. Apakah telah ada jalinan kerja sama antara pemerintah dengan komunitas lokal dalam aktivitas PRB? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
10. Apakah dalam peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di daerah Anda telah dengan jelas mengatur mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan komunitas lokal secara relevan dan sistematis? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
11. Apakah dalam pembagian peran dan tanggung jawab, seluruh sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku melaksanakan perannya secara aktif? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
12. Apakah aktivitas PRB telah dipublikasikan secara transparan oleh media-media lokal - sebagai partisipasi komunitas media? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13)	1	0

PRIORITAS 1

MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 4 :

Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana

Untuk mempercepat perwujudan kebijakan daerah yang disusun berdasarkan aturan daerah tentang penanggulangan bencana membutuhkan forum yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini adalah berbagai insitusi pemangku kepentingan yang telah mendapat delegasi tugas pengurangan risiko bencana oleh daerah dalam peraturan daerah.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
13. Apakah telah ada yang memfasilitasi diskusi-diskusi informal antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 17, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
14. Apakah telah ada suatu forum yang berfungsi untuk mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di daerah yang terdiri dari aktor-aktor dari beda kelompok seperti pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 17, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
15. Apakah forum tersebut beranggotakan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menembus birokrasi dan kendala-kendala anggaran serta memiliki jaringan yang kuat untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 17, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
16. Menurut Anda apakah forum ini telah menghasilkan pencapaian yang berarti untuk pengurangan risiko bencana di daerah ini? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.17)	1	0

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 1 :

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah

Kebijakan pengurangan risiko bencana membutuhkan kajian risiko terhadap bencana-bencana yang berpotensi di suatu daerah. Tanpa kajian terlebih dahulu, besar kemungkinan kebijakan yang diterapkan tidak efektif. Kajian risiko bencana ini disusun berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal. Hasil kajian harus dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.

1. Apakah Anda berada pada daerah rawan bencana?
2. Dari mana Anda mengetahui bahwa Anda berada/tidak berada pada daerah rawan bencana?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
17. Apakah telah dihasilkan peta potensi bencana sebagai analisis awal terhadap risiko bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
18. Apakah telah ada Dokumen Kajian Risiko untuk seluruh potensi bencana di daerah Anda? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
19. Apakah Kajian Risiko Bencana-bencana tersebut selalu diperbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
20. Apakah Kajian Risiko Bencana Daerah telah dijadikan dasar bagi pembangunan dan penanaman modal pada tingkat lokal/nasional? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21)	1	0

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 2 :

Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama

Pelaksanaan Kajian Risiko Bencana membutuhkan data yang akurat. Pemerintah daerah perlu untuk membangun sistem yang kuat untuk mengarsipkan dan menyebarkan data-data terkait untuk proses analisis. Data-data tersebut dapat bersumber dari hasil pemantauan, hasil riset dan sebagainya.

1. Apakah Anda mengetahui Data PODES?
2. Apakah Anda dengan mudah mendapatkan data kejadian bencana 3 tahun lalu?
3. Biasanya dari institusi/media apa Anda mendapatkan data kejadian bencana tersebut?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
21. Apakah telah tersedia data-data pendukung terkait hasil analisis untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan lainnya ? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
22. Apakah data-data pendukung terkait hasil analisis untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana - seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan lainnya - dipublikasi dengan sistem informasi sehingga memungkinkan untuk diakses oleh komunitas di dalam daerah maupun komunitas di luar daerah? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
23. Apakah informasi data pendukung tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana daerah ? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
24. Apakah informasi data pendukung kajian risiko yang diperbarui secara periodik tersebut dijadikan referensi bagi daerah lain? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21)	1	0

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 3 :

Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat



Salah satu indikator siaga suatu daerah adalah masyarakat mengetahui kapan harus melaksanakan evakuasi ke tempat aman. Sistem Peringatan Dini bertujuan untuk memberikan informasi secepat mungkin dan seakurat mungkin untuk memulai atau tidak dibutuhkan evakuasi masyarakat ke tempat aman dari ancaman bencana tertentu.



1. Apakah Anda mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana di daerah Anda?
2. Apakah Anda mengetahui tanda apa yang digunakan oleh pemerintah untuk memerintahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi?



Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
25. Apakah masyarakat masih memanfaatkan kearifan lokal dan fenomena alam sebagai peringatan bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
26. Apakah daerah telah memiliki sistem peringatan dini untuk setiap bencana yang sering terjadi di daerah Anda? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
27. Apakah telah dilaksanakan simulasi (tabeltop/umum) untuk sistem peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
28. Apakah sistem peringatan dini siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat masyarakat? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29)</i>	1	0

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 4 :

Penilaian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

Bencana tidak mematuhi wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pemerintahan daerah tetangga dalam mengurangi risiko bencana yang melingkupi daerah-daerah perbatasan. Kerjasama yang dilaksanakan dapat dalam bentuk kerjasama untuk penyebaran sistem peringatan dini, kerjasama dalam berbagi sistem informasi bencana, dan sebagainya.

1. Apakah Anda mengetahui bencana yang berpotensi terjadi di daerah perbatasan kabupaten tempat Anda tinggal?
2. Apakah daerah Anda telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana untuk bencana-bencana yang terjadi di perbatasan daerah Anda dengan kabupaten lain?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
29. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana daerah seperti pada pertanyaan No. 18? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
30. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
31. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan antar daerah? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
32. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas telah diimplementasikan untuk pengurangan risiko bencana lintas batas? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33)	1	0

PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 1 :

Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

Pembangunan ketahanan dan budaya aman disuatu daerah amat bergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Data terapan yang aplikatif disajikan dalam sistem informasi yang efektif sehingga selalu dapat diakses oleh masyarakat.

1. Apakah Anda mengetahui bencana apa yang mungkin terjadi hari ini di daerah Anda atau daerah tetangga Anda?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
33. Apakah telah ada arsip yang berisikan data kejadian bencana yang terjadi di daerah anda selama 5 tahun terakhir? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
34. Apakah Anda dapat mencari informasi kejadian bencana apa saja yang mungkin terjadi pada hari ini di daerah anda dari sumber informasi tertulis yang tepercaya ? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
35. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi ditingkat nasional ? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
36. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana daerah ? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37)	1	0

PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 2 :

Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenal pengurangan risiko bencana dan pemulihan

Keberlanjutan Pembangunan ketahanan dan budaya aman disuatu daerah secara terus menerus amat bergantung kepada pendidikan dan pengetahuan. Pengurangan Risiko Bencana diajarkan di lembaga pendidikan formal sebaiknya tidak hanya diberikan dalam tingkatan teori, tapi juga praktik terkait.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
37. Apakah sudah ada peningkatan keterampilan dalam menangani keadaan darurat bencana di sekolah? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
38. Apakah sudah Terlaksana pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah ? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
39. Apakah pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah telah ditunjang dengan kurikulum yang terukur ? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
40. Apakah sudah ada transisi budaya menuju budaya pengurangan risiko bencana di sekolah ? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41)	1	0

PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 3 :

Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset

Salah satu indikator keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana daerah dapat dilihat dari rendahnya biaya pemulihan setelah bencana terjadi. Metode pengurangan biaya pemulihan dilakukan berdasarkan riset-riset yang dilaksanakan oleh para ahli dan akademisi. Riset tersebut ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal komunitas ahli dan akademisi semata, namun harus mampu diterapkan hingga tingkat rumah tangga.

1. Apakah ada hasil riset yang telah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di tempat tinggal Anda?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
41. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset yang berpotensi untuk menurunkan kerugian bila terjadi bencana di wilayah Anda? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
42. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset untuk memantau potensi bencana dan menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
43. Apakah di daerah Anda telah tersedia metode riset standar yang diakui dan digunakan secara kolektif untuk menilai multirisiko yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
44. Apakah Metode Riset tersebut telah terbukti untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan yang diakibatkan oleh upaya-upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45)</i>		

PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 4 :

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan

Slogan dan moto serta bentuk publikasi lainnya perlu digalang secara efektif dengan strategi yang tepat. Strategi informasi ini harus berdasarkan data riset dan pantauan yang kemudian diterjemahkan kedalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

1. Apakah institusi Anda pernah menyebarkan materi pengurangan risiko bencana (seperti leaflet, billboard, dll) kepada komunitas lain diluar komunitas Anda?
2. Apakah institusi Anda telah menetapkan beberapa materi standar yang minimal harus disampaikan ke masyarakat terkait pengurangan risiko bencana?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
45. Apakah di daerah Anda telah terdapat berbagai media permanen (baik media cetak, elektronik, billboard, poster atau event/acara terorganisir yang tetap ada) untuk mempublikasikan pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurangan risiko bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
46. Apakah institusi Anda telah memiliki standar minimal untuk materi publikasi dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
47. Apakah standar minimal materi publikasi tersebut diterapkan dalam strategi dan perencanaan terukur serta memperhitungkan momen Hari Pengurangan Risiko Bencana dalam pelaksanaannya? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
48. Apakah tersedia metode untuk mengukur keberhasilan strategi dan perencanaan publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49)</i>		

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 1 :

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Beberapa perencanaan dan tata kelola daerah terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam amat mempengaruhi tingkat risiko daerah. Pengaruh tersebut yang terbesar adalah kepada jumlah masyarakat yang berpotensi terkena bencana serta kemampuan masyarakat untuk kembali pulih setelah bencana.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
49. Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi secara proporsional terhadap Pengurangan risiko bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
50. Apakah telah ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
51. Apakah kebijakan tersebut telah memprioritaskan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dengan mengurangi faktor-faktor risiko dasar (ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur) serta perubahan iklim? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
52. Apakah kebijakan tersebut telah diaplikasikan secara berkelanjutan? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53)</i>	1	0

PRIORITAS 4 **MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR**

INDIKATOR 2 :

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya

Penduduk miskin biasanya berada di daerah rawan bencana. Pembangunan sosial untuk mengurangi kerentanan penduduk dapat dilaksanakan dengan membangun ketahanan jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk menekan terbentuknya kelompok masyarakat miskin, asuransi infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya.

1. Apakah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau program sejenisnya dilaksanakan di wilayah Anda?
2. Apakah koperasi masih berkembang di wilayah Anda?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
53. Apakah telah ada diselenggarakan aksi-aksi sosial dalam kelompok-kelompok komunitas yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
54. Apakah telah ada aksi-aksi sosial (seperti program ketahanan jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk menekan terbentuknya kelompok masyarakat miskin, asuransi infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya) untuk mengurangi kerentanan penduduk dari berbagai pemangku kepentingan yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
55. Apakah aksi- aksi tersebut tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah ancaman bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
56. Apakah telah terbangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek ketahanan jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 57)		

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 3 :

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi

Sektor ekonomi dan produksi merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Namun sebelum mampu untuk memberikan kontribusi, sektor ini harus mampu terlebih dahulu mengembangkan budaya aman di lingkungan kerjanya. Arah kebijakan sektor produksi dan ekonomi untuk turut serta dalam pengurangan risiko bencana biasanya terbatas pada saat tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana perlu diubah ke arah pembangunan budaya aman di masyarakat.

1. Setelah bencana besar terjadi yang membutuhkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, apakah terjadi kenaikan harga bahan bangunan ditempat Anda?

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
57. Apakah sektor produksi telah mulai mengembangkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
58. Apakah ada perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor produksi yang secara tidak langsung perlindungan tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan ketahanan komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
59. Apakah telah ada kegiatan-kegiatan yang terukur dan terarah berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan kapasitas komunitas dibidang ekonomi dan produksi yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
60. Apakah telah terbangun iklim yang kondusif bagi peningkatan dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi yang ditujukan untuk peningkatan ketahanan komunitas dalam bidang perekonomian? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61)	1	0

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 4 :

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan

Pengelolaan area pemukiman perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan penghuni dari risiko bencana yang mungkin timbul. Oleh karenanya dibutuhkan standar tertentu untuk mengelola kawasan hunian aman bagi masyarakat mulai dari pemilihan lahan hingga proses pembangunan serta dinamika kehidupan dalam hunian tersebut.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
61. Apakah telah ada rencana tata ruang wilayah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
62. Apakah ada tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan, IMB dan perluasannya? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
63. Apakah telah ada rancangan pengelolaan pemukiman penduduk yang sesuai dengan strategi rencana tata guna lahan hingga mampu meminimalkan risiko bencana? <i>(BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i>	1	0
64. Apakah pembangunan kawasan seluruh wilayah huni telah sesuai dengan rencana tata guna lahan? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65)</i>	1	0

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 5 :

Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana

Upaya pemulihan dampak bencana perlu mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemulihan tidak kembali hancur/rusak terkena bencana sejenis dan bencana lainnya pada masa datang.

<i>Pertanyaan Kunci</i>	<i>Respon</i>	
	<i>YA</i>	<i>TIDAK</i>
65. Apakah telah ada rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana walau disusun sepihak tanpa menampung aspirasi korban ? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 63, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
66. Apakah telah ada rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 63, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
67. Apakah telah ada rancangan proses - proses pemulihan pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko baru dari pembangunan? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 63, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
68. Apakah rancangan tersebut telah terlaksana? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 63)	1	0

PRIORITAS 4
MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 6 :

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur

Proyek-proyek skala besar yang dilaksanakan tentu akan mempengaruhi rona lingkungan awal suatu kawasan. Perubahan lingkungan tersebut tentu saja berimbas tidak hanya kepada berubahnya rona lingkungan, tapi mungkin juga menyebabkan perubahan tingkat risiko bencana pada suatu kawasan.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
69. Apakah telah diterapkan prosedur penilaian dampak lingkungan untuk proyek pembangunan besar? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
70. Apakah telah ada prosedur penilaian Analisis Risiko Bencana untuk proyek pembangunan besar terutama infrastruktur? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
71. Apakah prosedur tersebut dapat menilai dampak-dampak risiko bencana untuk proyek-proyek lain seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air dan energi selain infrastruktur ? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
72. Apakah pelaksanaan prosedur tersebut telah terwujud ke dalam strategi, rencana dan program pembangunan? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73)	1	0

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 1 :

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya



Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana.



Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
73. Apakah terdapat lembaga dipemerintahan yang didukung relawan untuk melakukan praktik penanganan darurat bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
74. Apakah telah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di daerah anda? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
75. Apakah personil BPBD tersebut memiliki kemampuan teknis dalam hal penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
76. Menurut penilaian Anda, apakah upaya penanganan darurat bencana yang pernah dilaksanakan oleh seluruh pihak telah efektif untuk menekan jumlah korban yang timbul? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77)	1	0

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 2 :

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana

Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
77. Apakah telah ada latihan-latihan evakuasi? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
78. Apakah sudah ada rencana kontinjensi untuk 2 potensi bencana di daerah anda ? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
79. Apakah upaya penangan darurat dilaksanakan berdasarkan rencana kontinjensi dan rencana pemulihan bencana? (BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
80. Apakah ada prosedur tetap sebagai turunan dari Rencana kontinjensi tersebut? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81)	1	0

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 3 :

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana

 Pelaksanaan upaya penanganan darurat bencana membutuhkan usaha luar biasa yang membutuhkan anggaran dan kebutuhan lainnya dalam skala besar untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan serta pembangunan fasilitas kritis yang rusak setelah dilaksanakan kajian cepat dan pencarian pertolongan korban yang ada. Daerah yang teridentifikasi berpotensi terjadi suatu bencana dalam skala besar perlu untuk memiliki cadangan anggaran dan kebutuhan lainnya sesuai dengan rencana kontinjensi daerah untuk bencana tersebut.



Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
81. Apakah telah ada mekanisme untuk penggalangan bantuan dari pihak lain bila terjadi bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
82. Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan darurat? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
83. Apakah anggaran tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan saat terjadi darurat bencana? (BILA "TIDAK" LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85, BILA "YA" LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
84. Apakah dalam anggaran khusus untuk darurat bencana tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan terhadap fasilitas kritis? (LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85)	1	0

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 4 :

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat

Evaluasi efektivitas penanganan darurat bencana dapat dilihat dari rangkaian komunikasi dari pihak terlibat dalam penanganan darurat bencana baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali operasi. Untuk dapat melakukan evaluasi ini, perlu ada pencatatan yang memadai terhadap seluruh proses operasi kedaruratan.

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
85. Apakah di daerah Anda telah memiliki prosedur operasi standar untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan darurat bencana yang ada di daerah Anda? (BILA 'TIDAK' PERTANYAAN SELESAI, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
86. Apakah dalam prosedur operasi standar penanganan darurat yang pemerintah atau insitusi Anda miliki telah terdapat prosedur untuk merekam (baik dalam pencatatan atau audiovisual) pertukaran informasi saat darurat bencana? (BILA 'TIDAK' PERTANYAAN SELESAI, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
87. Setelah terjadi bencana, apakah terjadi proses evaluasi operasi kedaruratan berdasarkan catatan komunikasi dengan mewawancarai para tokoh terkait untuk meningkatkan efektivitas operasi darurat di kemudian hari ? (BILA 'TIDAK' PERTANYAAN SELESAI, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)	1	0
88. Apakah prosedur-prosedur terkait operasi darurat bencana diperbarui berdasarkan hasil dari evaluasi pencatatan komunikasi yang terjadi saat operasi darurat bencana yang telah terjadi? (SELESAI)	1	0

LAMPIRAN 6

Jawaban Daftar Isian dan Perhitungan Tingkat Ketahanan

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

- Kabupaten Agam
- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kota Padang
 - Kota Pariaman
- Provinsi Sumatera Barat

FORM JAWABAN **TINGKAT KETAHANAN DAERAH**

KAB/KOTA : KABUPATEN AGAM

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1.1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	
			3	
			4	
1.2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	
			7	
			8	
1.3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	1
			10	
			11	
			12	
1.4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	
			15	
			16	
2.1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	
			19	
			20	
2.2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	1
			22	
			23	
			24	
2.3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	
			27	
			28	
2.4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	1
			30	
			31	
			32	
3.1		Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	1
			34	1
			35	
			36	
3.2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	1
			38	1
			39	
			40	

3.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analyst) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	1
		42	
		43	
		44	
3.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
		46	
		47	
		48	
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
		50	1
		51	1
		52	1
4.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	1
		54	1
		55	1
		56	1
4.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	1
		58	
		59	
		60	
4.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
		62	1
		63	1
		64	1
4.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	1
		66	1
		67	1
		68	
4.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	1
		70	
		71	
		72	
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
		74	
		75	
		76	
5.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
		78	
		79	
		80	
5.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
		82	
		83	
		84	
5.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
		86	
		87	
		88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait	40

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	40

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	40

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berjalannya forum/jejaring nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada disuatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarluaskan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat level masyarakat	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multi stakeholder.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenai	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya kajian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertangga pada bencana-bencana lintas daerah.	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berisikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terlaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana di sekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	100

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	100

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertipan, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	100

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	40

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1	.1 Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	40	1,5	60
	.2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	40	1,25	50
	.3 Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	40	0,75	30
	.4 Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	40	0,5	20
TOTAL NILAI PRIORITAS				160
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS II

:

MENGIDENTIFIKASI, MENGAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2	.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	40	1,25	50
	.2 Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	40	1	40
	.3 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	40	1,25	50
	.4 Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	40	0,5	20
TOTAL NILAI PRIORITAS				160
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
3.1	Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	60	0,75	45
3.2	Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	60	1,25	75
3.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu	40	0,75	30
3.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	40	1,25	50
TOTAL NILAI PRIORITAS				190
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

NO	INDIKATOR	INDIKATOR INDI-NO	Nilai Kerentanan	Nilai Kerentanan
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	100	0,75	75
.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	100	0,5	50
.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	40	0,5	20
.4.	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	100	0,75	75
.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	80	0,5	40
.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	40	1	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				75
INDEKS RENCANA				75

PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5	.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	40	1	40
	.2 Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
	.3 Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	40	1,25	50
	.4 Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	40	1	40
TOTAL INDEKS PRIORITAS				160
INDEKS PRIORITAS				2

KOTA :
PROVINSI :
REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	40	2
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	40	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan disemua tingkat	50	2
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	75	4
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	40	2
TOTAL NILAI PRIORITAS		49	
INDEKS KETAHANAN DAERAH			2

FORM JAWABAN **TINGKAT KETAHANAN DAERAH**

KAB/KOTA : PARIAMAN

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1.1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	
			3	
			4	
1.2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	1
			7	1
			8	
1.3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	1
			10	
			11	
			12	
1.4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	
			15	
			16	
2.1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	
			19	
			20	
2.2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	
			22	
			23	
			24	
2.3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	
			27	
			28	
2.4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	
			30	
			31	
			32	
3.1		Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	
			34	
			35	
			36	
3.2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	1
			38	1
			39	
			40	

3.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	
		42	
		43	
		44	
3.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
		46	
		47	
		48	
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
		50	
		51	
		52	
4.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	1
		54	
		55	
		56	
4.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	
		58	
		59	
		60	
4.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
		62	
		63	
		64	
4.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	
		66	
		67	
		68	
4.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	
		70	
		71	
		72	
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
		74	1
		75	1
		76	
5.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
		78	
		79	
		80	
5.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
		82	1
		83	
		84	
5.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
		86	
		87	
		88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA

KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait	40

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	80

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	40

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berlangsungnya forum/jaringan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di suatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarkan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	0

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruh tingkat level masyarakat	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi setara berkala oleh multi stakeholder.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenai	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya kajian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertetangga pada bencana-bencana lintas daerah.	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berisikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tertaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	0

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	0

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	0

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	80

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	40

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

No	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1.1	Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	40	1,5	60
.2	Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	80	1,25	100
.3	Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	40	0,75	30
.4	Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	40	0,5	20
TOTAL NILAI PRIORITAS				1525
INDEKS PRIORITAS				125

PRIORITAS II : MENGIDENTIFIKASI, MENGAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2.1	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	40	1,25	50
.2	Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	0	1	0
.3	Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	40	1,25	50
.4	Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	0	0,5	0
TOTAL NILAI PRIORITAS				25
INDEKS PRIORITAS				1

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
3.1	Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	0	0,75	0
.2	Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	60	1,25	75
.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu	0	0,75	0
.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	40	1,25	50
TOTAL NILAI PRIORITAS				312,5
INDEKS PRIORITAS				1

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	40	0,75	30
.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	40	0,5	20
.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	0	0,5	0
.4.	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	40	0,75	30
.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	0	0,5	0
.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	0	1	0
TOTAL NILAI PRIORITAS				20
INDEKS PRIORITAS				1

PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5	1 Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	80	1	80
	2 Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
	3 Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	60	1,25	75
	4 Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	40	1	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				56,25
INDEKS PRIORITAS				5

KOTA :
PROVINSI :
REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	52,5	2
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	25	1
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan disemua tingkat	31,25	1
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	20	1
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	56,25	3
TOTAL NILAI PRIORITAS		184,75	6
INDEKS KETAHANAN DAERAH		30,79	2

FORM JAWABAN **TINGKAT KETAHANAN DAERAH**

KAB/KOTA : PADANG

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1. 1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	1
			3	1
			4	
1. 2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	1
			7	1
			8	
1. 3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	1
			10	1
			11	1
			12	1
1. 4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	1
			15	1
			16	
2. 1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	1
			19	
			20	
2. 2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	1
			22	1
			23	
			24	
2. 3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	1
			27	1
			28	
2. 4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	1
			30	
			31	
			32	
3. 1		Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	1
			34	1
			35	
			36	
3. 2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	1
			38	1
			39	
			40	

3.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	1
		42	1
		43	
		44	
3.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
		46	1
		47	
		48	
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
		50	1
		51	1
		52	1
4.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	1
		54	1
		55	1
		56	
4.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	1
		58	
		59	
		60	
4.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
		62	1
		63	1
		64	
4.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	1
		66	1
		67	1
		68	
4.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	1
		70	
		71	
		72	
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
		74	1
		75	1
		76	
5.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
		78	
		79	
		80	
5.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
		82	1
		83	
		84	
5.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
		86	1
		87	
		88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadopsikan pada aturan lain terkait	80

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	80

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	100

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berlangsungnya forum/jejaring nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada disuatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	80

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarkan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat level masyarakat	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multi stakeholder.	80

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenal	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya kajian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertangga pada bencana-bencana lintas daerah.	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sistem Informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal bertsikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terlaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	100

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk pemertipan, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SAGAAN BENCANA	
INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	80

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SAGAAN BENCANA	
INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	60

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1	.1 Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	80	1,5	120
	.2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	80	1,25	100
	.3 Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	100	0,75	75
	.4 Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	80	0,5	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				335
INDEX PRIORITAS				1

PRIORITAS II : MENDENTIFIKASI, MENGAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

No.	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2.1	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	60	1,25	75
.2	Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	60	1	60
.3	Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	80	1,25	100
.4	Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	40	0,5	20
TOTAL NILAI PRIORITAS				63,75
INDEKS PRIORITAS				3

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

No	Indikator	Indeks Indikator	Nilai Kepentingan	Nilai Akhir
3.1	Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	60	0,75	45
.2	Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	60	1,25	75
.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu	60	0,75	45
.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	60	1,25	75
TOTAL NILAI PRIORITAS				60
INDEKS PRIORITAS				3

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

No	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	100	0,75	75
.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	80	0,5	40
.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	40	0,5	20
.4.	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	80	0,75	60
.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	80	0,5	40
.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	40	1	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				687,5
TOTAL NILAI INDEKS PRIORITAS				8

PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

No	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5	.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	80	1	80
	.2 Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
	.3 Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	60	1,25	75
	.4 Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	60	1	60
TOTAL NILAI PRIORITAS				245
INDEKS PRIORITAS				49

KOTA :
PROVINSI :
REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	83,75	4
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	63,75	3
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	60	3
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	68,75	3
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	61,25	3
TOTAL NILAI PRIORITAS		67,5	
INDEKS KETAHANAN DAERAH		23	

FORM JAWABAN **TINGKAT KETAHANAN DAERAH**

KAB/KOTA : PESISIR SELATAN

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1. 1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	
			3	
			4	
1. 2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	1
			7	
			8	
1. 3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	1
			10	
			11	
			12	
1. 4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	
			15	
			16	
2. 1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	
			19	
			20	
2. 2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	
			22	
			23	
			24	
2. 3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	
			27	
			28	
2. 4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	1
			30	
			31	
			32	
3. 1		Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	1
			34	
			35	
			36	
3. 2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	1
			38	
			39	
			40	

3.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	
		42	
		43	
		44	
3.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
		46	1
		47	
		48	
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
		50	1
		51	1
		52	
4.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	1
		54	1
		55	
		56	
4.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	1
		58	
		59	
		60	
4.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
		62	1
		63	
		64	
4.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	1
		66	
		67	
		68	
4.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	1
		70	
		71	
		72	
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
		74	1
		75	
		76	
5.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
		78	
		79	
		80	
5.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
		82	1
		83	
		84	
5.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
		86	1
		87	
		88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait	40

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	60

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	40

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berlangsungnya forum/jaringan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada disuatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarkan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	0

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat level masyarakat	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multi stakeholder.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenai	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya kajian dan upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertetangga pada bencana-bencana lintas daerah.	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berisikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tertaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	60

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1	.1 Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	40	1,5	60
	.2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	60	1,25	75
	.3 Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	40	0,75	30
	.4 Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	40	0,5	20
TOTAL NILAI PRIORITAS				46,75
INDEKS PRIORITAS				

PRIORITAS II : MENDENTIFIKASI, MENKAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2.1	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	40	1,25	50
.2	Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	0	1	0
.3	Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	40	1,25	50
.4	Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	40	0,5	20
TOTAL NILAI PRIORITAS				50
INDEKS PRIORITAS				1

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT

No	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
3	.1 Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	40	0,75	30
	.2 Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	40	1,25	50
	.3 Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu	0	0,75	0
	.4 Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	60	1,25	75
TOTAL NILAI PRIORITAS				155
INDEKS PRIORITAS				3,875

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KERENTINGAN	NILAI AKHIR
4	.1 Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	80	0,75	60
	.2 Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	60	0,5	30
	.3 Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	40	0,5	20
	.4. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	60	0,75	45
	.5 Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	40	0,5	20
	.6 Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	40	1	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				537,5
INDEKS PRIORITAS				7,2

PRIORITAS V

:

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

NO.	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5	.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	60	1	60
	.2 Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
	.3 Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	60	1,25	75
	.4 Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	60	1	60
TOTAL NILAI PRIORITAS				56,25
INDEKS PRIORITAS				3,1

KOTA :
PROVINSI :
REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	46,25	2
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	30	1
3	Menggunakan pengetahuan, Inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan disemua tingkat	38,75	2
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	53,75	2
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	56,25	3
TOTAL NILAI PRIORITAS		45	
INDEKS KETAHANAN DAERAH			2

FORM JAWABAN **TINGKAT KETAHANAN DAERAH**

KAB/KOTA : PADANG PARIAMAN

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1. 1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	1
			3	1
			4	
1. 2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	1
			7	
			8	
1. 3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	1
			10	1
			11	
			12	
1. 4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	1
			15	
			16	
2. 1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	1
			19	
			20	
2. 2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	1
			22	
			23	
			24	
2. 3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	
			27	
			28	
2. 4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	1
			30	1
			31	
			32	
3. 1		Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	1
			34	
			35	
			36	
3. 2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	1
			38	1
			39	
			40	

3.3		Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	1
			42	
			43	
			44	
3.4		Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
			46	1
			47	1
			48	
4.1		Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
			50	1
			51	1
			52	
4.2		Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	1
			54	1
			55	1
			56	
4.3		Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	1
			58	
			59	
			60	
4.4		Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
			62	1
			63	1
			64	
4.5		Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	1
			66	1
			67	
			68	
4.6		Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	1
			70	
			71	
			72	
5.1		Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
			74	1
			75	1
			76	
5.2		Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
			78	
			79	
			80	
5.3		Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
			82	1
			83	
			84	
5.4		Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
			86	1
			87	1
			88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait	80

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	60

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	60

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berfungsinya forum/jaringan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada disuatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarkan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	40

PRIORITAS II MENDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat level masyarakat	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multi stakeholder.	40

PRIORITAS II MENDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenai	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya kajian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertetangga pada bencana-bencana lintas daerah.	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring).	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sistem Informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berisikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tertaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan wafau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	80

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	80

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1	.1 Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	80	1,5	120
	.2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	60	1,25	75
	.3 Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	60	0,75	45
	.4 Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	60	0,5	30
TOTAL NILAI PRIORITAS				270
INDEKS PRIORITAS				1,35

PRIORITAS II : MENGIDENTIFIKASI, MENGAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2.1	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	60	1,25	75
.2	Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	40	1	40
.3	Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	40	1,25	50
.4	Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	60	0,5	30
TOTAL NILAI PRIORITAS				48,75
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DISEMUA

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
3	.1 Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	40	0,75	30
	.2 Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	60	1,25	75
	.3 Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu	40	0,75	30
	.4 Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	80	1,25	100
TOTAL NILAI PRIORITAS				235
INDEKS PRIORITAS				3

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

NO.	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
4	.1 Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	80	0,75	60
	.2 Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	80	0,5	40
	.3 Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	40	0,5	20
	.4. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	80	0,75	60
	.5 Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	60	0,5	30
	.6 Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	40	1	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				620
INDEKS PRIORITAS				5

PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILA KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	80	1	80
5.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
5.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	60	1,25	75
5.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	80	1	80
TOTAL NILAI PRIORITAS				66,25
INDEKS PRIORITAS				3

KOTA :
 PROVINSI :
 REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	67,5	3
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	48,75	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	58,75	3
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	62,5	3
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	66,25	3
TOTAL NILAI PRIORITAS		60,75	
INDEKS KETAHANAN DAERAH			3

FORM JAWABAN **TINGKAT KETAHANAN DAERAH**

KAB/KOTA : KEPULAUAN MENTAWAI

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1. 1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	1
			3	1
			4	
1. 2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	1
			7	
			8	
1. 3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	1
			10	1
			11	
			12	
1. 4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	1
			15	
			16	
2. 1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	
			19	
			20	
2. 2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	1
			22	
			23	
			24	
2. 3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	1
			27	
			28	
2. 4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	
			30	
			31	
			32	
3. 1		Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	1
			34	
			35	
			36	
3. 2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	
			38	
			39	
			40	

3.3	Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	
		42	
		43	
		44	
3.4	Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
		46	
		47	
		48	
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
		50	1
		51	
		52	
4.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	0
		54	
		55	
		56	
4.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	
		58	
		59	
		60	
4.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
		62	
		63	
		64	
4.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	1
		66	1
		67	1
		68	
4.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	
		70	
		71	
		72	
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
		74	1
		75	
		76	
5.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
		78	
		79	
		80	
5.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
		82	
		83	
		84	
5.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
		86	1
		87	1
		88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait	80

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	60

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	60

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berdunghnya forum/jejaring nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada disuatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarluaskan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat level masyarakat	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multi stakeholder.	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenai	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersedianya kajian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertetangga pada bencana-bencana lintas daerah.	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya Informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersedianya Sistem Informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berisikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Terlaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara ilmiah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA**INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terseleksi aksinya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	0

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA**INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan publik dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	0

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA**INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA**INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA**INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	0

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA**INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA**INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk**

Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA**INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan**

<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA**INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran Informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan**

<i>Deskripsi Kriteria</i>	<i>Indeks Indikator</i>
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur Informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	80

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1.1	Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	80	1,5	120
.2	Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	60	1,25	75
.3	Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	60	0,75	45
.4	Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	60	0,5	30
TOTAL NILAI PRIORITAS				675
INDEKS PRIORITAS				3

PRIORITAS II : MENGIDENTIFIKASI, MENGAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2	.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	40	1,25	50
	.2 Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	40	1	40
	.3 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	60	1,25	75
	.4 Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	0	0,5	0
TOTAL NILAI PRIORITAS				175
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
3	.1 Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	40	0,75	30
	.2 Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	0	1,25	0
	.3 Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu	0	0,75	0
	.4 Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	40	1,25	50
TOTAL NILAI PRIORITAS				200
INDEKS PRIORITAS				17

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILA KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	60	0,75	45
.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	0	0,5	0
.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	0	0,5	0
.4	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	40	0,75	30
.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	80	0,5	40
.6	Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	0	1	0
TOTAL NILAI PRIORITAS				75/75
INDEKS PRIORITAS				1

PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5	.1 Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	60	1	60
	.2 Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
	.3 Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	40	1,25	50
	.4 Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	80	1	80
TOTAL NILAI PRIORITAS				95
INDEKS PRIORITAS				71

KOTA :
PROVINSI :
REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	67,5	3
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	41,25	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	20	1
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	28,75	1
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	55	2
TOTAL NILAI PRIORITAS		42,5	
INDEKS KETAHANAN DAERAH			2

FORM JAWABAN

TINGKAT KETAHANAN DAERAH

PROPINSI : SUMATERA BARAT

PRIORITAS/ INDIKATOR		DESKRIPSI INDIKATOR	NO. PERT.	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1.1		Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	1	1
			2	1
			3	1
			4	1
1.2		Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	5	1
			6	1
			7	
			8	
1.3		Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	9	
			10	
			11	
			12	
1.4		Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	13	1
			14	1
			15	
			16	
2.1		Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	17	1
			18	
			19	
			20	
2.2		Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	21	1
			22	
			23	
			24	
2.3		Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	25	1
			26	1
			27	1
			28	
2.4		Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	29	
			30	
			31	
			32	
3.1		Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	33	1
			34	
			35	
			36	
3.2		Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenal pengurangan risiko bencana dan pemulihan	37	1
			38	1
			39	
			40	

3.3		Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	41	1
			42	1
			43	
			44	
3.4		Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.	45	1
			46	1
			47	
			48	
4.1		Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	49	1
			50	1
			51	1
			52	
4.2		Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya	53	1
			54	1
			55	1
			56	
4.3		Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	57	1
			58	
			59	
			60	
4.4		Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	61	1
			62	1
			63	1
			64	
4.5		Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	65	1
			66	1
			67	
			68	
4.6		Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.	69	
			70	
			71	
			72	
5.1		Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	73	1
			74	1
			75	
			76	
5.2		Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	77	1
			78	
			79	
			80	
5.3		Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	81	1
			82	1
			83	
			84	
5.4		Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	85	1
			86	
			87	
			88	

KUESIONER

TINGKAT KETAHANAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR KERANGKA AKSI HYOGO

NAMA
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR I Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait	100

INDIKATOR II Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sumber Daya (Dana, Sarana dan Prasarana serta Personil) yang dialokasikan khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana.	60

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR III Terjalannya partisipasi komunitas dan desentralisasi melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	
Deskripsi Kriteria	Nilai Indikator
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan mekanisme Pembagian Sumber Daya, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang jelas antara pemerintah dan kelompok masyarakat.	0

PRIORITAS I MEMASTIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI PRIORITAS LOKAL HINGGA NASIONAL DENGAN BASIS KELEMBAGAAN YANG KUAT BAGI	
INDIKATOR IV Berlangsungnya forum/jejaring nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Forum/kelompok yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di suatu daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menembus batasan (birokrasi, pendanaan, jaringan kerja dll) demi mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan risiko bencana yang disepakati bersama	60

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR I Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan informasi kerentanan dan meliputi penilaian risiko untuk sektor-sektor	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR II Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya sistem informasi publik untuk memantau dan menyebarluaskan data bahaya, data kerentanan dan data ketahanan yang diarsip secara baik dan diperbarui terus menerus	40

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR III Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruh tingkat level masyarakat	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Sistem peringatan dini yang stabil untuk segala jenis bencana yang menjangkau semua level masyarakat dan dievaluasi secara berkala oleh multi stakeholder.	80

PRIORITAS II MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM UPAYA PENGURANGAN	
INDIKATOR IV Penilaian risiko lokal dan nasional mempertimbangkan risiko-risiko regional/lintas batas guna menggalang kerjasama regional mengenai	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya kajian dan Upaya pengurangan risiko bencana antar wilayah yang bertetangga pada bencana-bencana lintas daerah.	0

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR I Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh komunitas lokal berisikan data, sejarah dan perkembangan risiko bencana yang selalu diperbarui dan terintegrasi dengan sistem nasional/regional	40

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR II Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terlaksananya pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah yang ditunjang dengan kurikulum yang terukur untuk semua pihak sekolah meski terbatas pada beberapa risiko bencana yang ada pada daerah tersebut	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR III Adanya metode riset untuk penilaian multirisiko serta analisis manfaat dan biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya metode riset dan alat untuk menilai multirisiko pada beberapa bencana secara liniah dengan memadukan kearifan lokal yang melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan tingkat lokal dan telah dapat diterapkan secara umum ditingkat lokal	60

PRIORITAS III TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEAMANAN DAN KETAHANAN DI SEMUA	
INDIKATOR IV Adanya strategi kesadaran seluruh komunitas untuk pelaksanaan praktik budaya ketahanan bencana dengan jangkauan luas bagi masyarakat baik di	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya strategi pembangunan kesadaran serta kampanye pembangunan kesadaran publik untuk praktik budaya pengurangan risiko bencana yang terbukti secara efektif membangun ketahanan komunitas untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR I Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan Integral dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup,	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sumber daya alam maupun tata guna lahan yang memperhatikan unsur-unsur pengurangan risiko bencana	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR II Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial tengah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terselenggaranya aksi-aksi sosial dari berbagai pemangku kepentingan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang disusun atas data dan informasi yang selalu diperbarui berkaitan ketahanan jaringan pangan, perekonomian dan asuransi pada daerah berisiko tinggi	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR III Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor-sektor produksi yang mencakup semua sektor kemitraan public dan swasta untuk membantu mengurangi dampak keseluruhan dari bencana	40

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR IV Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia telah dirancang dengan tepat dan ketat yang memuat semua strategi unsur-unsur rencana tata guna tanah termasuk penertiban, pengawasan dan pengontrolan pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan yang berguna untuk mengelola pemukiman kota yang makin lama makin meluas ditujukan untuk meminimalkan dampak risiko-risiko bencana yang ditimbulkannya	80

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR V Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana telah tersusun dengan mempertimbangkan norma, standar dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang disusun oleh para pemangku kepentingan demi ketahanan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	60

PRIORITAS IV ADANYA UPAYA-UPAYA PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR BENCANA	
INDIKATOR VI Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur penilaian dampak risiko bencana ke dalam pembangunan terbatas pada bidang-bidang utama seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air, energi dan infrastruktur yang telah diterapkan pada pembangunan	0

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR I Siap sedianya kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme penanggulangan risiko bencana dengan perspektif	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Terbentuknya lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kebijakan serta sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai yang ditunjang oleh sukarelawan walau belum ditunjang dengan kapasitas teknis serta mekanisme kesiapsiagaan yang memadai dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR II Tersedianya rencana kesiap-siagaan bencana dan rencana antisipasi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersusunnya rencana siaga dan prosedur yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengetahuan komunitas tentang upaya penanganan darurat dan pemulihan bencana berdasarkan pembelajaran yang terjadi sebelumnya serta selalu diujicoba secara teratur	40

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR III Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan rencana dan program-program pemulihan wilayah setelah terjadi bencana dengan persiapan yang matang terhadap akses terhadap dana darurat, desentralisasi gudang makanan sesuai dengan kebutuhan dan skenario walau masih membutuhkan sumber-sumber nasional dan regional untuk pemenuhannya	60

PRIORITAS V PERKUAT KESIAP-SIAGAAN BENCANA	
INDIKATOR IV Tersedianya prosedur-prosedur yang siap untuk melakukan pertukaran informasi yang relevan selama penanganan darurat serta untuk melakukan	
Deskripsi Kriteria	Indeks Indikator
Tersedianya prosedur informasi dan komunikasi darurat saat penanganan bencana dimana seluruh komunikasi didokumentasikan untuk dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran baik yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas prosedur informasi dan komunikasi bagi masyarakat saat bencana	40

PRIORITAS I : MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI PRIORITAS
1	.1 Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	100	1,5	150
	.2 Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	60	1,25	75
	.3 Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal	0	0,75	0
	.4 Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana	60	0,5	30
TOTAL NILAI PRIORITAS				255
INDEKS PRIORITAS				1

PRIORITAS II : MENGIDENTIFIKASI, MENGAJI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN PERINGATAN DINI

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
2	.1 Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah	40	1,25	50
	.2 Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama	40	1	40
	.3 Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	80	1,25	100
	.4 Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko	0	0,5	0
TOTAL NILAI PRIORITAS				175
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS III : MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN SUATU BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN DI SEMUA

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
3	.1 Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)	40	0,75	30
	.2 Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan	60	1,25	75
	.3 Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu	60	0,75	45
	.4 Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan	60	1,25	75
TOTAL NILAI PRIORITAS				56,25
INDEKS PRIORITAS				5

PRIORITAS IV : MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MENDASAR

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
4.1	Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	80	0,75	60
.2	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana	80	0,5	40
.3	Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi	40	0,5	20
.4.	Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)	80	0,75	60
.5	Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana	60	0,5	30
.6	Slap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur	0	1	0
TOTAL NILAI PRIORITAS				320
INDEKS PRIORITAS				2

PRIORITAS V : MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

NO	INDIKATOR	INDEKS INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI AKHIR
5.1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya	60	1	60
.2	Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana	40	0,75	30
.3	Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana	60	1,25	75
.4	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	40	1	40
TOTAL NILAI PRIORITAS				51,25
INDEKS PRIORITAS				2

KOTA :
PROVINSI :
REPUBLIK INDONESIA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	63,75	3
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	47,5	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	56,25	3
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	52,5	2
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	51,25	2
TOTAL NILAI PRIORITAS		54,25	
INDEKS KETAHANAN DAERAH			3